



Gotong Royong
Membangun
Untuk *Rumah*
Rakyat

✉ satker.sumbar@pkp.go.id
📷 [pkp_perumahan_sumatera3](#)

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera III



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat Menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

Mengacu pada Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa unit instansi pemerintah selaku entitas akuntabilitas kinerja unit kerja untuk melaksanakan sistem kerja yang berdaya guna dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan sesuai dengan tata cara penerapan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menindaklanjuti persiapan penyusunan Laporan Kinerja, sehingga setiap Unit Kerja harus membuat laporan monitoring evaluasi kinerja bulanan unit kerja ditandatangani pimpinan unit kerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan dinamika Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Output Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung mencapai Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan





Permukiman Sumatera III sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun awal Dokumen Perencanaan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk memberikan informasi kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja dan yang seharusnya dicapai sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja ini merupakan capaian kinerja atas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam periode Tahun Anggaran 2025, dengan berdasar kepada indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabilitas di lingkungan kementerian PKP.

Penyajian Laporan ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan, untuk itu kami berlapang hati dalam menerima kritik guna penyempurnaan Laporan di masa mendatang.

Padang, 10 Januari 2026

Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat



R. Hidayat, S.T

NIP : 19840819 201402 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka unit organisasi Direktorat Jenderal Perumahan berkembang semakin besar dengan terbentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan sebanyak 19 Balai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Balai ini berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat.

Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Nomor 194 KPTS/Sj/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Nomor 155/ KPTS/Dd/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/ KPTS/Dk/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 150/ KPTS/Dp/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.



Provinsi Sumatera Barat berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III yang memiliki wilayah administratif di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat secara umum adalah untuk membantu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III di dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Sumatera Barat.

1. Tujuan pertama adalah "Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif".
2. Tujuan kedua adalah "Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Kegiatan utama yang dibangun oleh Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

- a. Penanganan Permukiman Kumuh Sebanyak 43,63 Ha
- b. Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 10 Unit;
- c. Penanganan Permukiman Kumuh 68,04 Ha;
- d. Rumah Swadaya Perkotaan 191 unit;
- e. Rumah Khusus Perumahan Perdesaan 140 unit;
- f. Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 521 unit

Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 ini mendapatkan alokasi anggaran 4 DIPA yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Dirjen Kawasan Permukiman, DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan, dan DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan

1. DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 741.375.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman sebesar Rp 19.675.454.000 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);



3. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan sebesar Rp 4.724.051.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
4. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan sebesar Rp 85.492.615.000 (Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%
1	Keperluan Perkantoran	1 Dokumen	140.452.000	140.452.000	139.430.795	99,27	100	130.000.000	92,56
2	Langganan Daya dan Jasa	1 Layanan	58.000.000	58.000.000	43.147.771	74,39	100	45.000.000	77,59
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	108.235.000	108.235.000	106.811.252	98,68	100	106.811.252	98,68
4	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	434.688.000	434.688.000	434.688.000	100	100	434.688.000	100
TOTAL			741.375.000	741.375.000	724.077.818	97,67	100	716.499.252	

Sumber : Hasil Rekapitulasi i-eMonitoring MyPKP Tahun 2025

Tabel Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	87.124.000	87.124.000	83.675.510	96,04	100	87.124.000	100	
2	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	195.500.000	97,75	100	195.500.000	97,75	Sisa lelang



No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu RKAHL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
3	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Dokumen	120.000.000	120.000.000	118.500.000	98,75	100	118.500.000	98,75	Sisa lelang
4	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1 Dokumen	754.117.000	754.117.000	465.702.594	61,75	100	754.117.000	100	
5	Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1 Laporan	1.199.122.000	1.199.122.000	462.307.667	38,55	81,2	1.082.074.000	90,24	Anggaran tidak terserap
6	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Dokumen	353.842.000	353.842.000	234.777.270	66,35	100	237.154.000	67,02	
7	Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Laporan	556.006.000	556.006.000	144.000.000	25,9	100	237.154.000	42,65	
8	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	10 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100	200.000.000	100	
9	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1 Laporan	174.277.000	174.277.000	89.071.120	51,11	100	174.277.000	100	
10	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	2 Paket	14.416.579.000	14.416.579.000	12.633.529.300	87,63	81,2	13.775.201.000	95,55	Sisa lelang
11	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	2 Paket	1.614.387.000	1.614.387.000	1.614.365.875	100	100	1.614.387.000	100	
TOTAL			19.675.454.000	19.675.454.000	16.241.429.336	82,55	85,08	18.475.488.000		

Sumber : Hasil Rekapitulasi i-eMonitoring MyPKP Tahun 2025



Tabel Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	507.104.000	507.104.000	376.212.665	74,19	100	507.104.000	100
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	191 Unit	3.820.000.000	3.820.000.000	3.820.000.000	100	98,95	3.820.000.000	100
3	Pengawasan Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	396.947.000	396.947.000	389.714.813	98,18	100	396.947.000	100
TOTAL			4.724.051.000	4.724.051.000	4.585.927.478	97,08	99,15	4.724.051.000	

Sumber : Hasil Rekapitulasi i-eMonitoring MyPKP Tahun 2025

Tabel Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
1	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	113.829.000	113.829.000	111.702.086	98,13	100	113.829.000	100	
2	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya	140 Unit	68.767.526.000	68.767.526.000	62.040.181.119	90,22	100	62.267.526.000	90,55	Potensi tidak terserap sebesar 6.5 M, berdasarkan hasil Notisi Audit Pembayaran oleh BPKP.
3	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	140 Unit	262.924.000	262.924.000	81.510.033	31	100	100.000.000	38,03	Diblokir sebesar Rp. 162.924.000
4	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	521 Unit	10.420.000.000	10.420.000.000	10.420.000.000	100	99,42	10.420.000.000	100	
5	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	948.440.000	948.440.000	945.157.579	99,65	100	948.440.000	100	
6	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	1 Laporan	79.896.000	79.896.000	72.272.900	90,46	100	79.896.000	100	

Laporan Kinerja
TA 2025SATKER PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROV. SUMBAR

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu RAKAL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
7	Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulan Bencana	123 Unit	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0	0	0	0	Diblokir sebesar Rp. 4.900.000.000
TOTAL			85.492.615.000	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	94,2	73.929.691.000		

Sumber : Hasil Rekapitulasi i-eMonitoring MyPKP Tahun 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvii

Bab I. PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Stuktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	I-4
I.2.1 Struktur Organisasi	I-4
I.2.2 Sumber Daya Manusia	I-19
I.3 Sarana Dan Prasarana	I-24
I.4 Sistematika Pelaporan	I-27
 Bab II. PERENCANAAN KINERJA.....	 II-1
II.1 Dokumen Perencanaan.....	II-1
II.1.1 Dokumen Renstra Satker PKP Provinsi Sumatera Barat.....	II-7
II.1.1.1 Tujuan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.....	II-9
II.1.1.2 Sasaran Program	II-10
II.1.1.3 Output Kegiatan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	II-11
II.1.2 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan	II-12
II.1.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.....	II-12
II.1.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Entitas Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat.....	II-13
II.1.3 Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	II-14



II.1.3.1	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Kawasan Permukiman (Kawasan Pesisir).....	II-16
II.1.3.2	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Perumahan Perkotaan.....	II-17
II.1.3.3	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Perumahan Perdesaan	II-18
II.1.4	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.....	II-39
II.1.4.1	Review DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo, Kota Padang	II-39
II.1.4.2	Review DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.....	II-45
II.1.5	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	II-53
II.1.5.1	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo, Kota Padang	II-53
II.1.5.2	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	II-56
II.2	Perjanjian Kinerja.....	II-58
II.2.1	Perjanjian Kinerja dari DIPA Sekretariat Jenderal;	II-59
II.2.2	Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Kawasan Permukiman;	II-61
II.2.3	Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Perumahan Perkotaan;	II-63
II.2.4	Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan.	II-65
II.2.5	Metode Pengukuran	II-67
II.2.6	Target Tahun Ini Menurut Rencana Strategis.....	II-68
II.3	Daftar Isian Pelaksana Anggaran.....	II-70
II.3.1	DIPA Sekretariat Jenderal	II-70
II.3.2	DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	II-71
II.3.3	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	II-72
II.3.4	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	II-73



Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
III.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	III-1
III.2 Capaian Kinerja Satker	III-2
III.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	III-27
III.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi.....	III-28
III.2.3 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian.....	III-30
III.3 Perbandingan Kinerja Satker	III-31
III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020– 2025	III-31
III.3.2 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020– 2025	III-34
III.4 Analisis Realisasi Anggaran	III-34
III.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-46
 Bab IV. PENUTUP.....	 IV-1
IV.1 Simpulan Umum	IV-3
IV.2 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut	IV-5
 LAMPIRAN.....	 1



DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Jumlah Jenis Pengawai Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025.....	I-19
Tabel I-2	Daftar Nama Pegawai Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	I-20
Tabel I-3	Daftar Aset Tetap/Pendukung pada BMN di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	I-25
Tabel II-1	Target dan Capaian kinerja tahun 2020 – 2024.....	II-3
Tabel II-2	Rekap Backlog Provinsi Sumatera Barat	II-5
Tabel II-3	Dokumen Perencanaan berdasarkan Sasaran Strategi Dan Program Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2025	II-11
Tabel II-4	Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sumatera III Tahun 2025-2029	II-12
Tabel II-5	Arah kebijakan dan strategi Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025-2029.....	II-13
Tabel II-6	Data Daerah penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (Kawasan Pesisir) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-16
Tabel II-7	Data Daerah penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-17
Tabel II-8	Data Daerah penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-18
Tabel II-9	Lokasi Alokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaa, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-21
Tabel II-10	Lokasi Alokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaa, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-22
Tabel II-11	Progres Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaa, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-23



Tabel II-12	Progres Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir Berdasarkan 0-30-100% di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ..	II-24
Tabel II-13	Progres Fisik Kegiatan BSPS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-25
Tabel II-14	RKTL Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-26
Tabel II-15	Kendala dan Masalah Kegiatan BSPS Perumahan Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-27
Tabel II-16	Kendala dan Masalah Kegiatan BSPS Perumahan Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-28
Tabel II-17	Kendala dan Masalah Kegiatan BSPS Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-29
Tabel II-18	Rekap Daftar Penerima Bantuan Yang Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Terhadap Kegiatan BSPS Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat	II-30
Tabel II-19	Daftar Penerima Bantuan yang Terdampak Bencana di Provinsi	II-31
Tabel II-20	Progres Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-41
Tabel II-21	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-43
Tabel II-22	Kendala Permasalahan dan Tindak Lanjut Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ..	II-44
Tabel II-23	Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	II-49
Tabel II-24	Kurva S Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	II-50
Tabel II-25	Kurva Addendum 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	II-51
Tabel II-26	Kendala/Permasalahan dan Tindak Lanjut Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	II-52
Tabel II-27	Time Schedule Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang Tahun 2025	II-54



Tabel II-28	Time Schedule Kegiatan Peningkatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung	II-57
Tabel II-29	Tabel Pengukuran Kinerja.....	II-68
Tabel II-30	Target Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	II-68
Tabel II-31	Daftar DIPA dan pagu Anggaran di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025.....	II-70
Tabel II-32	Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025.....	II-71
Tabel II-33	Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025	II-72
Tabel II-34	Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025	II-73
Tabel II-35	Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025	II-73
Tabel III-1	Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Sekretariat Jenderal Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-5
Tabel III-2	Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Sekretariat Jenderal Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-5
Tabel III-3	Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	III-6
Tabel III-4	Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	III-7
Tabel III-5	Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-9
Tabel III-6	Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-10
Tabel III-7	Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-11



Tabel III-8	Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-13
Tabel III-9	Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-15
Tabel III-10	Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-15
Tabel III-11	Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-16
Tabel III-12	Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-17
Tabel III-13	Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-19
Tabel III-14	Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-20
Tabel III-15	Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-21
Tabel III-16	Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-23
Tabel III-17	Rekapitulasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-24
Tabel III-18	Prognosis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output (RO) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-26
Tabel III-19	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	III-27
Tabel III-20	Perbandingan Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Tahun 2025	III-28
Tabel III-21	Realisasi Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.....	III-28
Tabel III-22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2025	III-32
Tabel III-23	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 – 2025	III-34
Tabel III-24	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	III-35
Tabel III-25	Selisih Pagu Awal dan Pagu Akhir Tahun 2025.....	III-36



Tabel III-26	Perbandingan Rencana, Realisasi dan Prognosis Anggaran TA. 2025	III-36
Tabel III-27	Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-38
Tabel III-28	Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-38
Tabel III-29	Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-40
Tabel III-30	Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-40
Tabel III-31	Capaian Output Akuntabilitas di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-42
Tabel III-32	Akuntabilitas Keuangan Anggaran Satker PKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025	III-44
Tabel III-33	Efisiensi SDM Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-46
Tabel IV-1	Rincian Realisasi dan Pengembalian Anggaran di Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	IV-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 : Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	I-18
Gambar I-2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	I-22
Gambar I-3 : Grafik Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	I-23
Gambar I-4 : Komposisi SDM Berdasarkan Aparatur di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	I-24
Gambar II-1 : Lokasi Kegiatan BPS pada Kawasan Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-20
Gambar II-2 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-34
Gambar II-3 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-35
Gambar II-4 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tahun 2025.....	II-35
Gambar II-5 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat Tahun 2025.....	II-36
Gambar II-6 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BPS Perumahan Perkotaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	II-36
Gambar II-7 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BPS Kawasan Pesisir Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II-38
Gambar II-8 : Dokumentasi Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah	II-40



Gambar II-9 :	Dokumentasi Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah	II-44
Gambar II-10 :	Profil Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	II-48
Gambar II-11 :	Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.....	II-52
Gambar II-12 :	Profil Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang	II-54
Gambar II-13 :	Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Sanitasi Rumah Kawasan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang.....	II-55
Gambar II-14 :	Dokumentasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.....	II-58
Gambar II-15 :	Perjanjian Kinerja Awal DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)	II-59
Gambar II-16 :	Perjanjian Kinerja Awal DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II).....	II-60
Gambar II-17 :	Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)	II-60
Gambar II-18 :	Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II).....	II-61
Gambar II-19 :	Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II).....	II-61
Gambar II-20 :	Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Direktorat Kawasan Permukiman antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)	II-62
Gambar II-21 :	Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)	II-62
Gambar II-22 :	Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II).....	II-63
Gambar II-23 :	Perjanjian Kinerja Awal DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)	II-63
Gambar II-24 :	Perjanjian Kinerja Awal DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II).....	II-64
Gambar II-25 :	Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)	II-64
Gambar II-26 :	Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II).....	II-65



Gambar II-27 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I).....	II-65
Gambar II-28 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)	II-66
Gambar II-29 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I).....	II-66
Gambar II-30 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II).....	II-67
Gambar III-1 : Grafik Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-4
Gambar III-2 : Grafik Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-8
Gambar III-3 : Grafik Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-14
Gambar III-4 : Grafik Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-18
Gambar III-5 : Grafik Akuntabilitas Keuangan Anggaran Satker PKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025	III-37
Gambar III-6 : Grafik Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	III-44



BAB I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG



Sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, maka Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aturan penulisan laporan kinerja antara lain, sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat terus mengupayakan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari Sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LaKIP).

Penyusunan LaKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah terhadap penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Uraian yang terdapat didalam LaKIP ini menjabarkan perjalanan yang telah dilakukan oleh sebuah instansi dalam masa kerja selama tahun anggaran sampai dengan selesai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025;
2. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai dengan ukuran-ukuran keberhasilan berupa indikator-indikator kinerja non keuangan;
3. Hubungan kinerja dan hasil dengan sumber daya;
4. Permasalahan dan kendala serta rekomendasi untuk perbaikan kinerja Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

LaKIP tahun 2025 yang disusun oleh Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Perumahan selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 15 Tahun 2025, LaKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja. Capaian Kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima



tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 ini mendapatkan alokasi anggaran 4 DIPA yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Dirjen Kawasan Permukiman, DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan, dan DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan

1. DIPA Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 741.375.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman sebesar Rp 19.675.454.000 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
3. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan sebesar Rp 4.724.051.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
4. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan sebesar Rp 85.492.615.000 (Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

DIPA-DIPA tersebut diperuntukkan untuk mendukung tercapainya Sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Tujuan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Sumatera Barat". Capaian Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 8 indikator kinerja yang mendukung 2 Program yang dilaksanakan oleh 5 Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai sasaran program tersebut dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan "Mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau" serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III".

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.



I.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

I.2.1 Struktur Organisasi

Landasan Hukum Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- (a) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- (d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
- (e) Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: Nomor 1 tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (f) Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Nomor 194 KPTS/Sj/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP;
- (g) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Nomor 155/ KPTS/Dd/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
- (h) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/ KPTS/Dk/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa



Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;

- (i) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 150/KPTS/Dp/2025 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Perjabat Perbendaharaan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Adapun Tugas Dan Tanggungjawab Pejabat Perbendaharaan Negara di Lingkungan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yaitu

A. Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker)

Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b) Menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/ keuangan;
- c) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- d) Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- e) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- f) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan Kepala Satuan Kerja mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b) Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan



keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;

- f) Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- g) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA, meliputi:
 - Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
 - Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP- UP/TUP; dan
 - Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
- b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
- e) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, meliputi:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
 - Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
 - Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok



barang/material dan/atau persiapan teknis diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak lain yang tagih kepada negara, pengujian dilakukan terhadap:
 - Kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - Kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
 - Syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka;
 - Tagihan uang muka berupa besaran uang muka yang dapat dibayarkan sesuai kelengkapan dokumen tagihan;
 - Kebenaran perhitungan tagihan;
 - Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN; dan
 - Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
- g) Menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak lain yang tagih kepada negara, pengujian dilakukan terhadap;
 - Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
 - Membuat dan menandatangani SPP;
- h) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan yang meliputi: laporan pelaksanaan kegiatan; laporan penyelesaian tagihan kepada negara; laporan bulanan yang memuat perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani, tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa, tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP nya; dan Jangka waktu penyelesaian tagihan.
- i) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



- j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab PPK sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas kebenaran material SPK/Kontrak dan tanda bukti pertanggungjawaban yang sah lainnya dan akibat yang timbul dari SPK/kontrak tersebut;
- b) Bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara yang timbul sebagai akibat tindakan yang dilakukan;
- c) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.

C. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

PP-SPM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, meliputi:
 - Kelengkapan dokumen pendukung SPP (Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP, Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja);
 - Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
 - Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/ jasa;
 - Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/ kontrak/ surat keputusan;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara; dan



- Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/ kontrak.
- b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; Menerbitkan SPM, meliputi:
 - Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
 - Menandatangani SPM;
 - Memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
- d) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- e) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, meliputi:
 - Jumlah SPP yang diterima;
 - Jumlah SPM yang diterbitkan; dan
 - Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

Tanggung Jawab PP-SPM yaitu:

- a) Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan
- b) Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.

D. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi: 1. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan 2. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
- b) Melaksanakan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran, meliputi:
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat



berharga dalam pengelolaannya;

- Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara;
 - Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- c) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- d) Melaksanakan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi: meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan pemeriksaan kebenaran atas hak tagih yang meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagih yang harus dibayar dan jadwal waktu pembayaran.
- e) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- f) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen;
- g) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran.

Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran yaitu:

- a) Bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Persediaan;
- b) Bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- c) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

E. Kepala Urusan Administrasi

Kepala Urusan Adminstrasi mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan serta cara pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan swakelola maupun kontraktual;



- b) Melakukan penyiapan kerangka acuan kegiatan (TOR) dan dokumen tender;
- c) Melakukan penataan administrasi evaluasi pelelangan;
- d) Melakukan penyiapan dokumen kontrak;
- e) Melakukan penyusunan laporan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- f) Melakukan penyiapan konsep Petunjuk Tindak Turun Tangan (PT3);
- g) Melakukan Penyiapan Berita Acara Serah Terima pekerjaan kontraktual;
- h) Melakukan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- i) Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan program dan anggaran berdasarkan DIPA APBN dan RKA-KL;
- j) Menyiapkan dan memfile dokumen-dokumen kegiatan, antara lain: 1). Perjanjian Kontrak/kerjasama beserta perubahan/adendumnya; 2). Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan 3). Berita Acara Serah Terima pekerjaan selesai untuk kegiatan kontraktual;
- k) Melakukan pengumpulan laporan-laporan hasil pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual.

Kepala Urusan Administrasi mempunyai Tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab atas terselenggaranya tata laksana administrasi umum dan perencanaan di lingkungan Satuan Kerja;
- b) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Anggaran/Barang.

F. Kepala Urusan Teknik

Kaur Teknik mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan;
- b) Program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja;
- c) Melaksanakan koordinasi terkait dengan penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerja dan Petunjuk Operasional;
- d) Melakukan penyiapan rencana kegiatan satuan kerja;
- e) Melakukan penyiapan dokumen lelang;
- f) Menyusun usulan Revisi DIPA;
- g) Melakukan penyiapan dan penjabaran Kerangka Acuan Kerja (KAK);



- h) Membantu Kepala Satker dalam melakukan penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- i) Melakukan penyiapan dokumen Tender/Kontrak;
- j) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

Kepala Urusan Teknik mempunyai Tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Bertanggung Jawab atas terselenggaranya tata laksana pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Kerja;
- b) Bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Anggaran/Barang.

G. Petugas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA)

Petugas UAKPA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;
- b) Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi SAK;
- c) Menerima data SABMN dari petugas akuntansi barang;
- d) Melakukan verifikasi atas RTH yang dihasilkan aplikasi SAK dengan dokumen sumber (DS);
- e) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- f) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- g) Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan
- h) Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA;
- i) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA;
- j) Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Petugas UAKPA mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;



- c) Menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan, dan/atau dokumen pengelolaan, membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- d) Melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN termasuk tanah dan Bangunan ke dalam daftar barang;
- e) Melaporkan BMN yang didaftarkan dan dicatat dalam daftar barang;
- f) Melakukan penghimpunan data BMN selain Tanah dan/atau Bangunan;
- g) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- h) Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- i) Menyusun laporan BMN dan laporan kondisi barang tingkat UAKPA;
- j) Menyiapkan pendistribusian laporan BMN dan laporan kondisi barang tingkat UAKPA;
- k) Menyiapkan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

H. Petugas Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)

Petugas UAKPB mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan proses pembukuan;
- b) Menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan, membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- c) Melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN termasuk Tanah dan Bangunan kedalam daftar barang, meliputi: 1.Penetapan Status Penggunaan BMN; 2.Pemanfaatan BMN; 3.Penghapusan BMN; 4.Pemindah tangan BMN; dan 5.Inventarisasi BMN.
- d) Melaporkan BMN yang didaftarkan dan dicatat dalam daftar barang;
- e) Melakukan penghimpunan data BMN selain tanah dan/atau bangunan;
- f) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- g) Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- h) Menyusun Laporan BMN dan Laporan Kondisi Barang Tingkat UAKPB;



- i) Menyiapkan pendistribusian laporan BMN dan laporan kondisi barang tingkat UAKPB;
- j) Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Petugas UAKPB mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKG);
- b) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;

I. Asisten Pelaksanaan

Asisten Pelaksanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan usulan revisi DIPA APBN dan RKA-KL;
- b) Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan serta cara pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- c) Melakukan penyusunan rencana anggaran biaya untuk keperluan lelang kegiatan kontraktual;
- d) Melakukan penyiapan kerangka acuan kegiatan (TOR) dan dokumen tender;
- e) Melakukan penataan administrasi evaluasi pelelangan;
- f) Melakukan penyiapan dokumen kontrak;
- g) Melakukan penyusunan laporan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- h) Melakukan penyiapan konsep Petunjuk Tindak Turun Tangan (PT3);
- i) Melakukan Penyiapan Berita Acara Serah Terima pekerjaan kontraktual;
- j) Melakukan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- k) Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan program dan anggaran berdasarkan DIPA APBN dan RKA-KL;
- l) Menyiapkan dan memfile dokumen-dokumen kegiatan, antara lain:
1.Perjanjian Kontrak/kerjasama beserta perubahan/adendumnya; 2.Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan 3.Berita Acara Serah Terima pekerjaan selesai untuk kegiatan kontraktual.



- m) Melakukan pengumpulan laporan-laporan hasil pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual.

J. Asisten Umum dan Keuangan

Asisten Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen terkait urusan administrasi umum dan keuangan;
- b) Melakukan penata usahaan kantor dan kepegawaian;
- c) Melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d) Penyusunan jadwal alokasi anggaran;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi pengguna anggaran;
- f) Melakukan penyusunan laporan berkala realisasi anggaran;
- g) Melakukan penyusunan laporan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan.

K. Asisten Perencana/Teknik

Asisten Perencana/Teknik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang perencanaan teknik dan penyusunan;
- b) Program pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja;
- c) Melaksanakan koordinasi terkait dengan penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerja dan Petunjuk Operasional;
- d) Melakukan penyiapan rencana kegiatan satuan kerja;
- e) Melakukan penyiapan dokumen lelang;
- f) Menyusun usulan Revisi DIPA.

Tanggung Jawab Asisten Perencana/Teknik yaitu:

- a) Bertanggung Jawab atas terselenggaranya tata laksana pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Kerja;
- b) Bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Anggaran/Barang.

L. Petugas E– Monitoring

Petugas E – Monitoring mempunyai tugas sebagai berikut:



- a) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi;
 - Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;
 - Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan);
 - Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja
 - Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan;
- b) Mengisi data pelaksanaan kegiatan kedalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-Monitoring online;
- c) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring offline;
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan;
- e) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan.

Tanggung Jawab Petugas E – Monitoring yaitu :

- a) Bertanggung jawab atas kebenaran Laporan Pelaksanaan Kegiatan (back up data maupun cetakan);
- b) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

M. Petugas Persediaan dan Barang Milik Negara

Petugas Persediaan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mencatat seluruh barang milik Negara yang berasal dari APBN;
- b) Melakukan pencatatan barang milik Negara yang dipelihara/diperbaiki pada kartu pemeliharaan;
- c) Menyiapkan laporan barang milik Negara sesuai dengan format yang ditentukan dan aturan pengelolaan barang milik Negara;
- d) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik Negara yang rusak atau tidak digunakan lagi.

Petugas Persediaan dan Barang Milik Negara mempunyai Tanggung Jawab sebagai berikut:



- a) Bertanggung jawab kebenaran Laporan barang milik Negara yang telah dibuat;
- b) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

N. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengadaan langsung;

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai Tanggung Jawab sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas proses pengadaan langsung;
- b) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

O. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai Tugas sebagai berikut:

Memastikan bahwa barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa dalam keadaan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh PPK dan penyedia barang/jasa, meliputi :

- Jumlah barang/jasa yang diserahkan cukup;
- Spesifikasi teknis barang/jasa sesuai dengan yang diisyaratkan;
- Waktu penyerahan tidak terlambat;
- Barang/jasa berfungsi dengan baik;

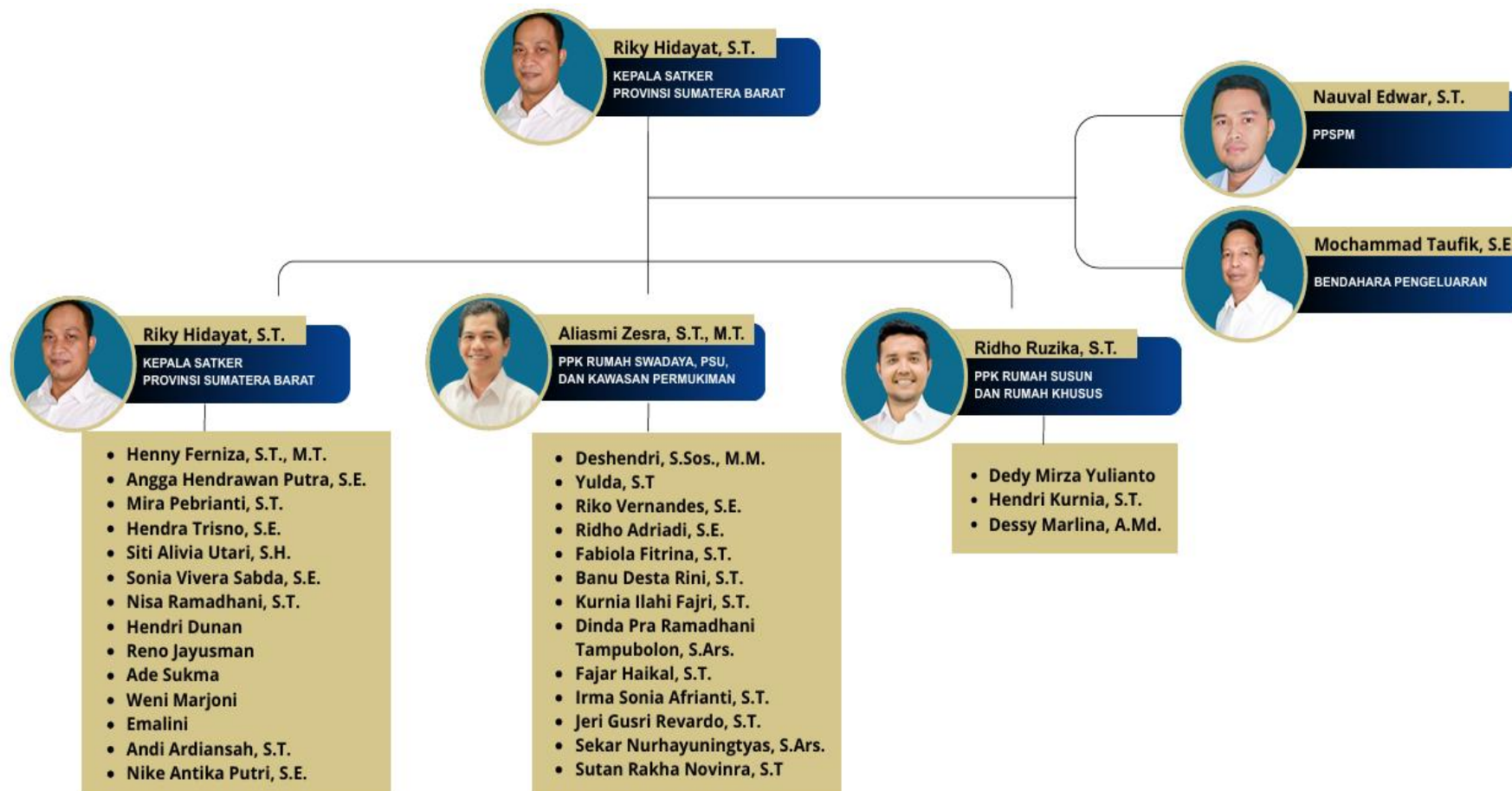
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai Tanggung Jawab sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan barang/jasa yang diterima;
- b) Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.



Laporan Kinerja TA 2025

SATKER PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROV. SUMBAR



Gambar I-1 : Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

I.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya. Terutama dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten.

Pemegang peran penting dalam keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya bergantung kepada Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia pada organisasi pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur negara yang merupakan unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Terutama dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten. Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat memiliki komposisi pegawai antara lain sebagai berikut:

Tabel I-1 Jumlah Jenis Pengawai Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025

Jenis Pegawai	Tahun Anggaran					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PNS Kementerian PKP	8	8	10	8	8	8
PNS Daerah Diperbantukan	3	3	1	-	-	-
CPNS Kementerian PKP	-	-	-	-	-	10
PPPK Kementerian PKP	-	-	-	-	6	17
PPPK Paruh Waktu Kementerian PKP	-	-	-	-	-	1
Pegawai Non PNS Substantif	11	11	11	10	7	-
Konsultan Individu	14	14	7	9	-	-
Tenaga Ahli	5	5	6	5	6	2
Tenaga Pendukung	-	-	-	-	5	-
Outsourcing	7	7	5	4	4	4
Jumlah Pegawai	48	48	40	36	36	42



**Tabel I-2 Daftar Nama Pegawai Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

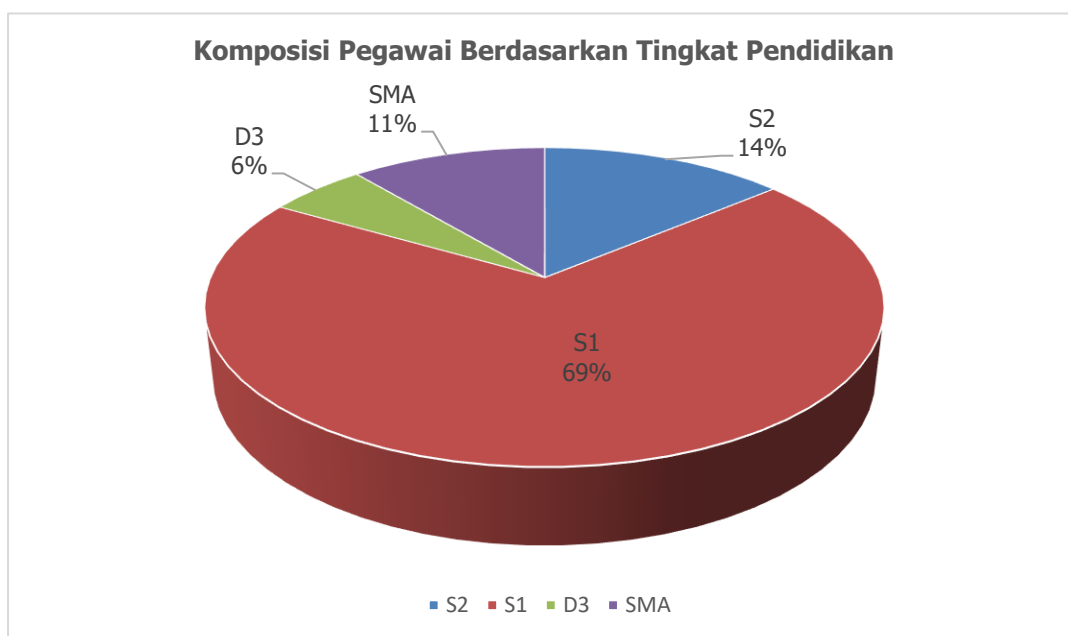
NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Riky Hidayat, S.T	19840819 201402 1 001	III/c	Kepala Satuan Kerja
2	Ridho Ruzika, S.T	19951012 201802 1 002	III/c	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Aliasmi Zesra, ST, MT	19750713 20071 1 006	III/b	Pejabat Pembuat Komitmen
4	Nauval Edwar, S.T	19920122 201802 1 003	III/b	PP - SPM
5	Mochammad Taufik, S.E	19710429 201412 1 001	III/c	Bendahara Pengeluaran
6	Deshendri, S.Sos.,M.M	19661231 200604 1 059	IV/a	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya
7	Dedy Mirza Yulianto, ST., MT	19740707 200312 1 004	IV/b	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya
8	Henny Ferniza, S.T.,M.T.	19811022 200604 2 007	IV/c	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Madya
9	Irma Sonia Afrianti, S.T	20000317 202506 2 012	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
10	Fajar Haikal, S.T	20010226 202506 1 004	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
11	Nike Antika Putri, S.E	19981008 202506 2 015	III/a	Arsiparis Ahli Pertama
12	Jeri Gusri Revardo, S.T	19980829 202506 1 009	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13	Dharma Febiansyah, S.T	19981129 202506 1 006	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
14	Sutan Rakha Novinra, S.T	19981129 202506 1 006	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15	Andi Ardiansah, S.T	19930623 202506 1 007	III/a	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
16	Fahrul Fajar, S.T	20000515 202506 1 011	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
17	Sekar Nurhayuningtyas Syahfitri, S.T	19950316 202506 2 008	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
18	Dinda Pra Ramadhani Tampubolon, S. Ars	20011101 202506 2 017	III/a	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
19	Fabiola Fithrina, ST	19741017 202421 2 001	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
20	Riko Vernandes, SE	19831125 202421 1 004	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama



NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
21	Mira Febrianti, ST	19800211 202421 2 059	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan permukiman Ahli Pertama
22	Hendri Kurnia, ST	19860131 202421 1 001	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
23	Ridho Adriadi, SE	19810811 202421 1 002	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
24	Yulda, ST	19690925 202421 1 001	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan permukiman Ahli Pertama
25	Angga Hendrawan Putra, S.E	19860122 202321 1 008	IX	Jab. Fungsional Perencana Ahli Pertama
26	Kurnia Illahi Fajri,S.T.	19860122 202321 1 008	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
27	Hendra Trisno, SE	19850124 202521 1 064	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
28	Nisa Ramadhani, ST	19940310 202521 2 052	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
29	Sonia Vivera Sabda, SE	19931211 202521 2 063	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
30	Siti Alivia Utari, SH	19901028 202521 2 067	IX	Penata Layanan Operasional
31	Banu Desta Rini, ST	19931211 202521 2 063	IX	Jab. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
32	Dessy Marlina, A.Md	19791222 202521 2 015	VII	Pengelola Layanan Operasional
33	Hendri Dunan	19800130 202521 1 027	V	Operator Layanan Operasional
34	Fitra Mulia, S.T	19930324 202521 1 059	IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
35	Lutfiani Eka Putri, S.T	19800427 202521 2 029	IX	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
36	Nora Rahayu, S.H	19870227 202521 2 072	-	Penata Layanan Operasional
37	Putri Ayu Wulandari, S.T	-	-	Tenaga Ahli
38	Ardional, S.H	-	-	Tenaga Ahli
39	Ade Sukma Pratama, S.Hum	-	-	Outsourcing
40	Wendi Marjoni	-	-	Outsourcing

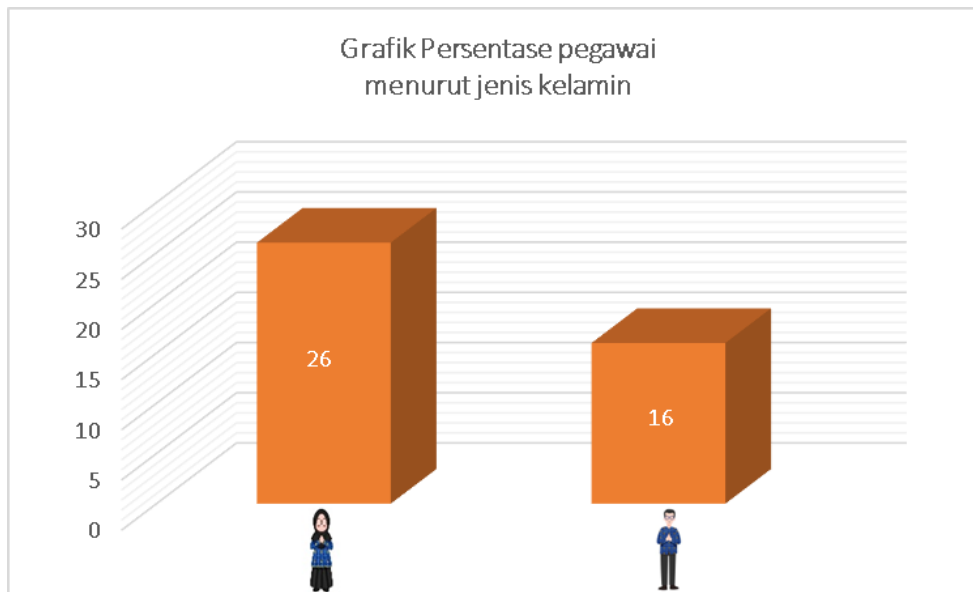
NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
41	Reno Jusman	-	-	Outsourcing
42	Emalini, A.Md	-	-	Outsourcing

Komposisi Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan tingkat pendidikan tertinggi Strata 2 sebanyak 5 (lima) orang, Strata 1 sebanyak 25 orang, Diploma III sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 4 Orang. Data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik pada gambar berikut:

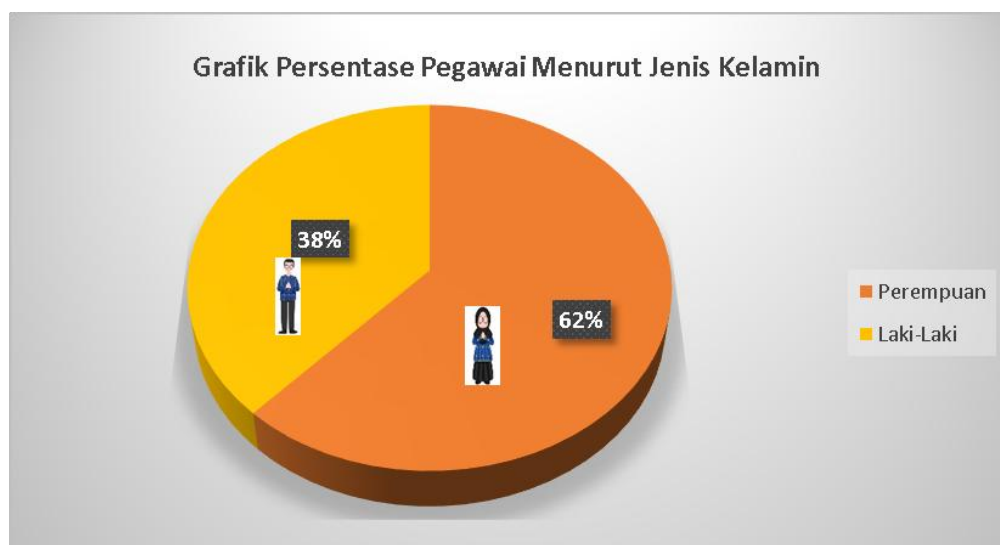


Gambar I-2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan pegawai yang direkrut adalah pegawai teknis yang sebagian besar adalah laki-laki. Pegawai teknis tersebut mayoritas ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan di lapangan (*On site*). Jumlah pegawai Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan komposisi pegawai laki-laki dengan jumlah terbanyak 16 orang (38%), sedangkan pegawai perempuan sebanyak 26 orang (62%).

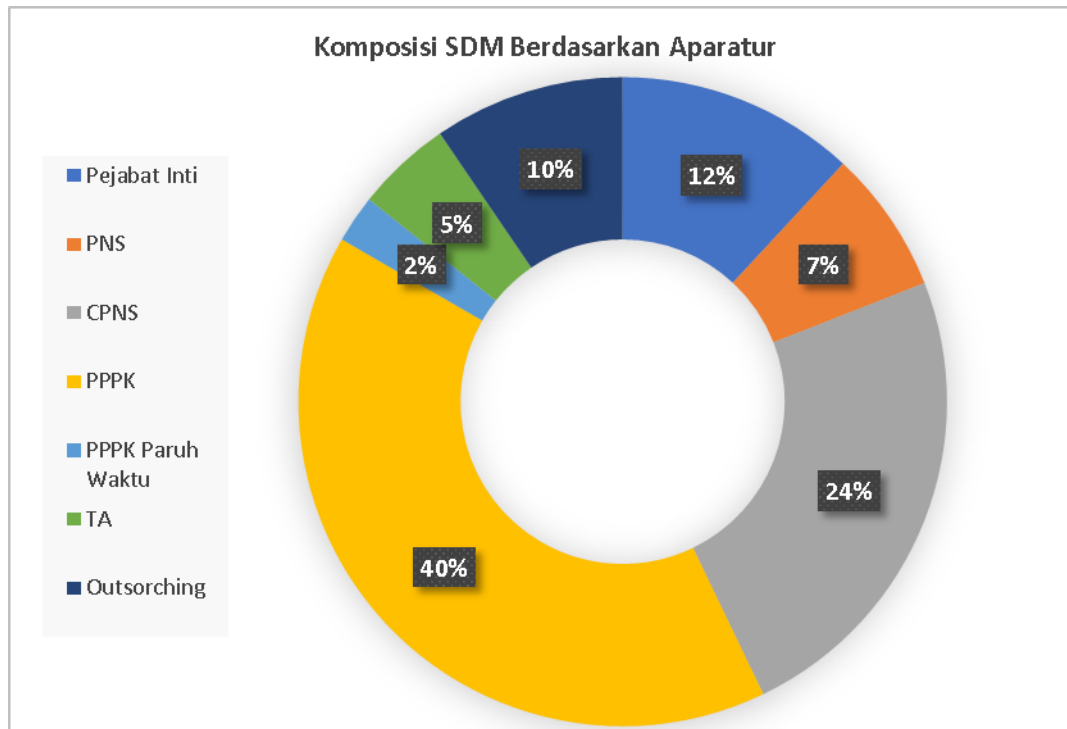


Gambar I-3 : Grafik Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat



Dalam usaha pencapaian tujuan organisasi/lembaga, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesinmesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut staff (sumber daya manusia) yang mengelola hal-hal tersebut. Sumber daya aparatur di lingkungan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak 42 orang dengan rincian 5 orang Pejabat Inti, 3 orang PNS, 10

orang CPNS, 17 orang PPPK, 1 orang PPPK Paruh Waktu, 2 orang Tenaga Ahli, 4 orang Outsourcing. Dari keseluruhan sumber daya aparatur di lingkungan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:



Gambar I-4 : Komposisi SDM Berdasarkan Aparatur di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

I.3 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar terorganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Aset intrakomptabel atau aset tetap adalah aset tetap yang digunakan dalam kegiatan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pencapaian kegiatan. Aset/barang pengguna intrakomptabel Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 memiliki rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel I-3 Daftar Aset Tetap/Pendukung pada BMN di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No. Urut	Kelompok	Sub. Kelompok	Sub-Sub Kelompok	Jumlah (Unit)	Jumlah (Rp)	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat/Hilang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alat Kantor	Alat Kantor & Rumah Tangga	Lemari Kayu	7 Unit	17.677.624	7	-	-
2	Alat Kantor	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rak Besi	4 Unit	7.756.832	4	-	-
3	Alat Kantor	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Brangkas	1 Unit	5.000.000	1	-	-
4	Alat Kantor	Alat Kantor Lainnya	White Board	1 Unit	939.232	1	-	-
5	Alat Kantor	Alat Kantor Lainnya	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	2.915.000	-	1	-
6	Alat Kantor	Alat Kantor Lainnya	LCD Projector/ Infocus	2 Unit	18.500.000	1	-	-
7	Alat Rumah Tangga	Meubelair	Meja Kerja Besi / Metal	1 Unit	1.139.208	1	-	-
8	Alat Rumah Tangga	Meubelair	Meja Kerja Kayu	33 Unit	45.081.956	30	-	3
9	Alat Kantor & Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga	Kursi Besi / Metal	53 Unit	43.956.928	44	9	-
10	Alat Rumah Tangga	Meubelair	Meja Rapat	3 Unit	5.630.280	3	-	-
11	Alat Rumah Tangga	Alat Pendingin	Lemari Es	1 Unit	2.188.708	1	-	-
12	Alat Rumah Tangga	Alat Pendingin	A.C. Split	8 Unit	33.133.664	8	-	-



No. Urut	Kelompok	Sub. Kelompok	Sub-Sub Kelompok	Jumlah (Unit)	Jumlah (Rp)	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat/Hilang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Alat Kantor & Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga	Televisi	2 Unit	13.877.916	2	-	-
14	Alat Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dispenser	1 Unit	1.138.708	1	-	-
15	Alat Kantor	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rak Peralatan	2 Unit	2.128.159	2	-	-
16	Alat Studio	Peralatan	Camera Digital	3 Unit	31.855.000	3	-	-
17	Alat Studio	Peralatan	Video Conference	1 Unit	52.000.000	1	-	-
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Drone	3 Unit	84.975.000	2	1	-
19	Alat Komunikasi	Alat Studio Komunikasi & Pemancar	Facsimile	1 Unit	1.500.000	1	-	-
20	Alat Komunikasi	Alat Studio Komunikasi & Pemancar	Fingerprint	1 Unit	2.500.000	1	-	-
21	Peralatan Komunikasi Navigasi	Peralatan Komunikasi Navigasi	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	1 Unit	6.875.000	1	-	-
22	Komputer	Peralatan Komputer	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13 Unit	58.467.124	10	3	-
23	Komputer	Peralatan Komputer	PC Unit	9 Unit	94.163.108	1	8	-
24	Komputer	Personal Komputer	Note book	20 Unit	286.155.550	11	9	-
25	Komputer	Peralatan Komputer	Laptop	1 Unit	72.000.000	1	-	-
26	Komputer	Peralatan Komputer	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 Unit	16.000.000	3	-	-
27	Alat Kantor & Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga	Sice	2 Unit	5.178.416	2	-	-



No. Urut	Kelompok	Sub. Kelompok	Sub-Sub Kelompok	Jumlah (Unit)	Jumlah (Rp)	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat/Hilang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Alat Kantor & Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga	Tempat Sampah	1 Unit	529.208	1	-	-

I.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja diharapkan dapat menjadi acuan teridentifikasinya langkah – langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka perbaikan strategis untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lakip, dan Pemen PKP No 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PKP. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi; latar belakang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Perumahan Dan



Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat serta sistematika penyajian dalam penyusunan laporan kinerja ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang meliputi Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Metode Pengukuran antara target dan realisasi serta target Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sesuai dengan Renstra.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan target dan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat baik fisik maupun keuangan, perbandingan kinerja organisasi, analisis capaian kinerja, efisiensi dan efektivitas serta evaluasi manfaat.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan serta langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Bab II.

PERENCANAAN KINERJA

II.1 DOKUMEN PERENCANAAN

Dokumen Perencanaan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 2025 – 2029 adalah rencana tahunan yang melampirkan target lima tahunan yang melampirkan target lima tahunan yang menggambarkan Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan, Tujuan Satuan Kerja, Target Kinerja, yang mengacu kepada Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III 2025 – 2029. Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III merupakan turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2025 – 2029 yang juga merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran lengkap dengan indikator.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kewajiban negara dalam rangka pemenuhan hak dasar Masyarakat.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menetapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pemerataan Pembangunan antar wilayah. Maka dari itu, Pemerintah menetapkan Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional



yang menekankan percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), termasuk diantaranya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III untuk wilayah kerja Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.

BP3KP Sumatera III (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III) merupakan hasil proses reorganisasi dan transformasi kelembagaan dari unit sebelumnya, yaitu BP2P Sumatera III (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan tersebut dilaksanakan seiring dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024.

Pada periode RPJMN 2020-2024, urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasca pelaksanaan reorganisasi, BP2P Sumatera III beralih menjadi BP3KP Sumatera III yang selanjutnya berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Perubahan juga terjadi pada tingkat Satuan Kerja dimana untuk Periode 2019-2024, bernama Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat namun pada periode 2025-2029 ini menjadi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan target capaian kinerja pada periode perencanaan Tahun 2020–2024, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sejumlah sasaran kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III. Sasaran tersebut meliputi:

- a. Menyediakan 23.621 Unit rumah oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat melalui:
 - 1) Pembangunan 1.578 Unit rumah susun;
 - 2) Pembangunan 150 Unit rumah khusus;
 - 3) Penanganan 18.720 Unit rumah tidak layak huni (RTLH) milik MBR.



- b. Menyediakan PSU yang melayani 3.178 Unit rumah milik MBR.
- c. Tersusunnya Perencanaan Penyediaan Perumahan sebanyak 3 Dokumen.

Secara keseluruhan, sasaran tersebut mencerminkan komitmen Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah Sumatera Barat.

Pencapaian kinerja antara rencana dan realisasi pertahun yang dibebankan pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1 Target dan Capaian kinerja tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Capaian Tahunan	Target Renstra	%	Capaian Tahunan	Target Renstra	%	Capaian Tahunan	Target Renstra	%	Capaian Tahunan	Target Renstra	%	Capaian Tahunan	Target Renstra	%
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan	Laporan	3	3	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	3	33%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah	Unit	7,410	7,720	96%	2,048	2,050	100%	3,588	7,410	48%	6,042	3,660	165%	4,284	7,410	58%
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	0	0		179	30	597%	102	40	255%	135	40	338%	42	129	33%
4	Jumlah Ramah Susun yang terpelihara	Unit	12	0		0	30		8	30	27%	8	0		0	12	
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	0	0		0	251		1	402		0	500		140	480	29%
6	Jumlah Rumah Khusus yang	Unit	0	12		0	4		0	12		75	12	625%	0	60	
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan fasilitas layanan	Unit	0	0		58	500	12%	50	687	7%	893	875	102%	451	451	100%
8	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana	Layanan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
9	Jumlah Layanan Dukungan	Layanan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
10	Jumlah Layanan	Layanan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mendukung penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, diperlukan pemetaan kondisi perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Barat. Pemetaan ini mencakup identifikasi potensi yang dapat dikembangkan serta permasalahan yang perlu ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.

Potensi

Sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan identifikasi terhadap berbagai potensi yang dimiliki



Provinsi Sumatera Barat. Potensi ini merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja pada periode perencanaan.

1. Pengembangan Lokasi Strategis sebagai Kawasan Pertumbuhan Permukiman Baru

Provinsi Sumatera Barat memiliki sejumlah lokasi strategis yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan permukiman baru yang terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya pada wilayah yang memiliki keterkaitan dengan pusat kegiatan ekonomi, jaringan transportasi, dan pelayanan dasar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan hunian layak secara terencana dan terpadu.

2. Potensi Pengembangan Perumahan di Kawasan Perkotaan

Kabupaten/kota dengan pusat pertumbuhan perkotaan memiliki potensi pengembangan perumahan perkotaan dan perumahan vertikal, termasuk rumah susun dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi.

3. Potensi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Perdesaan

Kabupaten dengan karakteristik wilayah perdesaan yang luas memiliki potensi pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah melalui pendekatan berbasis swadaya masyarakat. Kearifan lokal serta budaya gotong royong di tingkat nagari menjadi modal sosial yang mendukung efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program.

4. Potensi Pembangunan dan Penataan Permukiman di Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir memiliki potensi pengembangan dan penataan kawasan permukiman pesisir, termasuk pembangunan rumah khusus dan peningkatan kualitas permukiman, dengan tetap memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

5. Ketersediaan Lahan Potensial untuk Pengembangan Perumahan

Masih terdapat lahan potensial di beberapa wilayah kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perumahan, termasuk perumahan bagi



MBR dan pembangunan rumah khusus, dengan tetap mengacu pada ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Permasalahan

Di Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman masih menghadapi berbagai permasalahan strategis yang bersifat kompleks dan saling terkait, sehingga memerlukan penanganan secara terintegrasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Permasalahan tersebut berpengaruh langsung terhadap pencapaian pemerataan akses hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Adapun permasalahan utama yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya backlog kependhunian dan kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Backlog perumahan yang masih signifikan mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak dan terjangkau. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat, tingginya jumlah rumah tidak layak huni, serta pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang terus meningkat yang belum diimbangi dengan penyediaan rumah yang memadai, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tabel II-2 Rekap Backlog Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024	2025
A	KABUPATEN				
1	AGAM	43.223	43.223	28.089	20.650
2	DHARMASRAYA	10.618	12.316	15.138	16.830
3	KEPULAUAN MENTAWAI	853	853	889	969
4	LIMA PULUH KOTA	16.991	16.991	16.991	16.991
5	PADANG PARIAMAN	25.272	25.272	25.272	25.272
6	PASAMAN	14.828	14.828	8.076	8.164
7	PASAMAN BARAT	18.678	10.748	10.748	10.748
8	PESISIR SELATAN	30.244	30.244	31.260	31.260
9	SIJUNJUNG	9.222	9.222	9.222	9.222
10	SOLOK	26.476	26.476	26.476	26.476
11	SOLOK SELATAN	9.315	9.315	9.978	10.787



NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024	2025
12	TANAH DATAR	28.784	28.784	28.784	28.784
B	KOTA				
1	KOTA BUKITTINGGI	2.424	2.424	2.552	2.550
2	KOTA PADANG	59.736	50.095	55.108	58.782
3	KOTA PADANG PANJANG	6.013	7.033	2.877	8.173
4	KOTA PARIAMAN	2.743	2.743	2.743	2.743
5	KOTA PAYAKUMBUH	6.961	6.361	14.041	14.041
6	KOTA SAWAHLUNTO	2.107	2.107	7.067	8.655
7	KOTA SOLOK	7.531	4.880	6.319	6.319
JUMLAH TOTAL		322.019	303.915	301.630	307.416

2. Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah RTLH yang masih tinggi dan tersebar di berbagai kabupaten/kota belum sepenuhnya dapat ditangani secara optimal akibat keterbatasan kapasitas program, dukungan anggaran, serta keterbatasan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi ini berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat.

3. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh

Permasalahan kawasan permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan yang tidak memenuhi standar layak huni, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti air minum, sanitasi layak, sistem drainase lingkungan, jalan lingkungan, serta pengelolaan persampahan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya kerentanan sosial dan kesehatan masyarakat.

4. Masih tingginya risiko bencana terhadap kawasan permukiman

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, penanganan permukiman di kawasan rawan bencana, termasuk wilayah pesisir, belum sepenuhnya terintegrasi dengan upaya mitigasi bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko keselamatan masyarakat dan kerugian akibat bencana.



5. Ketepatan sasaran dan mutu bantuan perumahan belum optimal

Pelaksanaan bantuan perumahan masih menghadapi permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterbatasan kualitas hasil pembangunan, serta belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaku pembangunan. Kondisi ini menyebabkan manfaat program bantuan perumahan dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat belum sepenuhnya tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

6. Keterbatasan data dan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman

Ketersediaan data dan informasi terkait backlog perumahan, RTLH, kawasan permukiman kumuh, serta kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terintegrasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan, penetapan sasaran program, serta pengukuran capaian kinerja dalam dokumen perencanaan.

II.1.1 Dokumen Renstra Satker PKP Provinsi Sumatera Barat

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III 2025–2029 adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan, Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perumahan, Tujuan dan Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan 2025 – 2029. Renstra Direktorat Jenderal Perumahan 2025 – 2029 merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025 – 2029 yang telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran lengkap dengan indikator pencapaian sasaran serta cara mencapai tujuan yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.



Tujuan dan Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III memiliki tujuan secara umum, yaitu "Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif".

Tujuan Balai P3KP Sumatera III merupakan rumusan dari isu strategis, potensi, serta permasalahan yang menjadi wewenang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, maka disusun sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;
3. Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak;
4. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen; dan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan intern.



Sasaran Program BP3KP Sumatera III dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis Kementerian PKP, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan.

II.1.1.1 Tujuan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Satuan Kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Barat merupakan arah yang ingin dicapai dalam periode perencanaan sebagai wujud kontribusi dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, harus selaras dengan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa:

1. Tujuan pertama adalah "Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif".
2. Tujuan kedua adalah "Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
2. Meningkatkan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
3. Meningkatkan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
4. Meningkatkan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
5. Meningkatkan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
6. Meningkatkan luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
7. Meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
8. Meningkatkan tata kelola dan pengawasan internal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.



II.1.1.2 Sasaran Program

Sasaran Program Satuan Kerja merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai hasil antara (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sasaran ini disusun sebagai penjabaran dari tujuan Satuan Kerja dan menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja serta pengukuran capaian kinerja selama periode perencanaan. Sasaran program Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat harus selaras dengan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III. Adapun dua sasaran strategis Kementerian PKP yaitu:

1. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu "Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan".
2. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Sementara itu, sasaran program BP3KP Sumatera III adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan penanganan permukiman kumuh;
3. Meningkatkan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak;
4. Meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen; dan
6. Meningkatkan kualitas pengawasan intern.

Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat disusun untuk mendukung sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. Berikut adalah sasaran kegiatan Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat:

1. Meningkatkan hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan penanganan permukiman kumuh;
3. Meningkatkan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak;
4. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen.

II.1.1.3 Output Kegiatan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, maka ditetapkan output kegiatan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Penetapan output ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan capaian dalam pencapaian tujuan.

Tabel II-3 Dokumen Perencanaan berdasarkan Sasaran Strategi Dan Program Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2025

No	Program/Kegiatan	Dokumen Perencanaan Tahun 2020-2024 (Unit/Layanan)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni						
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3	1	1	1	1	1
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	7.410	2.048	3.588	6.042	4.284	718
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	0	179	102	135	42	0
4	Jumlah Rumah Susun yang terpelihara	12	0	8	8	0	0
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	0	0	1	0	140	140
6	Jumlah Rumah Khusus yang terpelihara	0	0	0	75	0	0
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan fasilitas layanan bantuan PSU	0	58	50	893	451	0
B.	Meningkatnya efektivitas dan efesiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan						
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	1

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

II.1.2 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan

II.1.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta memperhatikan mandat fungsi balai sebagai unit pelaksana teknis, kondisi eksisting, dan kebutuhan wilayah kerja, maka kebijakan Balai P3KP Sumatera III dirumuskan untuk mendukung implementasi kebijakan nasional secara efektif, terintegrasi, dan terukur sebagai berikut.

Tabel II-4 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sumatera III Tahun 2025-2029

No	Kebijakan	Strategi
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan	a. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi: penyediaan rekomendasi kebijakan pembangunan dan/atau peningkatan kualitas, dan pembiayaan perumahan, penyediaan rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. b. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. c. Penyediaan Rumah Layak Huni: pembangunan unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas, pembangunan rumah khusus, pembangunan rusun. d. Penanganan Permukiman Kumuh e. Penyediaan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern	a. Penyediaan layanan Perkantoran b. Penyediaan Layanan Umum c. Penyediaan Layanan Sarana Internal d. Penyediaan Layanan Data dan Informasi e. Penyediaan Layanan BMN



II.1.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Entitas Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta memperhatikan mandat fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unit pelaksana teknis. Maka arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel II-5 Arah kebijakan dan strategi Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025-2029

No	Kebijakan	Strategi
1	Pembangunan Penyediaan Rumah Baru yang Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah Tangga Layak Huni (RTLH)	a. Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. b. Pelaksanaan bantuan pembangunan rumah susun yang diberikan oleh pemerintah. c. Melakukan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana, yaitu pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. d. Meningkatkan kualitas bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yaitu bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. e. Meningkatkan kualitas sanitasi rumah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan fungsi sanitasi yang layak guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin. f. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
2	Menerapkan Peraturan Keuangan, BMN dan Kepegawaian sebagai Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan	a. Penyediaan layanan dukungan manajemen perkantoran. b. Menyediakan perlengkapan dan peralatan perkantoran.



II.1.3 Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Keluarga Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Pemberian stimulan rumah swadaya perlu disertai dengan upaya pendampingan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Stimulan rumah swadaya dikemas dalam Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya. Program ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya.

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, disebutkan bahwa Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas tiga kegiatan yaitu 1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); 2) Bantuan Sarana Hunian Usaha; dan 3) Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS). Dalam Pasal 80 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis



Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya oleh Direktorat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko. Telah terbentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025. BP3KP merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk BSPS. Terbentuknya BP3KP diharapkan dapat meningkatkan kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya di tiap wilayah. Untuk mewujudkan penyelenggaraan program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tepat tahapan penyelenggaraan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko perlu menetapkan Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Swadaya.

Maksud Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan diprioritaskan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tujuan Kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Pemberi BSPS adalah Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Bentuk BSPS terdiri atas uang dan/atau barang.

- **BSPS Bentuk Uang**

BSPS dalam bentuk Uang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK). BSPS dalam Bentuk Uang dapat digunakan untuk upah kerja.

- **BSPS Bentuk Barang**

BSPS dalam bentuk barang terdiri atas:

- a. BSPS dalam bentuk Bahan Bangunan Untuk Rumah
- b. BSPS dalam bentuk Rumah, atau



c. BSPS dalam bentuk Bahan Bangunan untuk PSU.

Jenis Kegiatan BSPS

Jenis Kegiatan BSPS terdiri atas: Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Prasarana dan sarana Umum.

• Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs)

Jenis Kegiatan Pembangunan Baru meliputi kegiatan:

- Pembangunan Baru (PB) pengganti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total;
- Pembangunan Rumah Baru (PB) di atas kavling tanah matang;

• Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)

Jenis Peningkatan Kualitas meliputi kegiatan:

- PK Ringan dari RTLH dengan tingkat kerusakan ringan atau tidak terpenuhi kesehatan bangunan
- PK Sedang dari RTLH dengan tingkat kerusakan sedang; dan
- PK Berat dari RTLH dengan tingkat kerusakan berat.

• Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Pembangunan PSU dilaksanakan secara swadaya oleh penerima BSPS dalam bentuk bahan bangunan dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota yang dapat berupa tenaga pendamping, upah, dan peralatan kerja yang bersumber dari APBD.

II.1.3.1 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Kawasan Permukiman (Kawasan Pesisir)

Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Kawasan Permukiman (Kawasan Pesisir) di Provinsi Sumatera Barat yaitu berada pada Kabupaten Padang Pariaman dengan alokasi Penerima Bantuan BSPS 10 (sepuluh) unit yang tersebar pada Jorong Limau Puriuk dan Campago Selatan.

Tabel II-6 Data Daerah penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (Kawasan Pesisir) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Daftar Tahun 2025							
NO	KOTA	KECAMATAN	JORONG	ALOKASI	JUMLAH	TFL	KOORDINATOR
1.	Kab. Padang Pariaman	V Koto Timur	Limau Puriuk	6	10	Yasmet, A.Md	Fikriadi, S.T
		V Kampung Dalam	Campago Selatan	4			
TOTAL				10			



II.1.3.2 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Perumahan Perkotaan

Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Perumahan Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat yaitu berada pada Kota Padang dan Kota Solok dengan alokasi Penerima Bantuan BSPS 191 (seratus sembilan puluh satu) unit

Tabel II-7 Data Daerah penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	ALOKASI	JUMLAH	TFL	KOORDINATOR
1	Kota Padang	Koto Tengah	Aie Pacah	1	43	1. Rio Farma, S.E 2. Nurrahman Rizky, S.T	Fikriadi, S.T
			Balai Gadang	1			
			Dadok Tunggul Hitam	9			
			Koto Panjang Ikua Koto	4			
			Lubuk Minturun	9			
			Padang Sarai	6			
			Pasie Nan Tigo	2			
		Kuranji	Kuranji	11	46	1. Annisa Intan Vahmi, S.E 2. Andam Ayuanda Putri, S.T	
			Ampang	5			
			Anduring	7			
			Gunung Sarik	24			
			Pasar Ambacang	9			
			Sungai Sapih	1			
		Lubuk Begalung	Kampung Baru Nan XX	2	38	1. Resti Rafika, S.PT 2. Oza Nori Nomya, S.T	Abrar. Z, S.Tp
			Pampangan Nan XX	2			
			Tanah Sirah Piai Nan XX	6			
			Tanjung Aua Nan XX	1			
		Lubuk Kilangan	Bandar Buat	1			
			Koto Lalang	3			
			Tarantang	6			
		Pauh	Cupak Tengah	4			
			Koto Lua	1			
			Lambung Bukit	2			
			Limau Manis	5			
			Pisang	5			

NO	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	ALOKASI	JUMLAH	TFL	KOORDINATOR
		Padang Selatan	Mata Air	5	41	1. Syafrina, S.T 2. M. Indry Haikal Kamil, S.Hut.	
			Rawang	3			
			Seberang Padang	2			
			Seberang Palinggam	2			
		Padang Timur	Ganting Parak Gadang	3			
			Jati	2			
			Parak Gadang Timur	5			
			Simpang Haru	1			
		Padang Utara	Alai Parak Kopi	7			
			Gunung Pangilun	11			
2	Kota Solok	Lubuk Sikarah	Vi Suku	15	23	Arfatma, S.T	
			Tanah Garam	2			
		Tanjung Harapan	Kampung Jawa	6			
JUMLAH				191			

II.1.3.3 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Perumahan Perdesaan

Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Perumahan Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat yaitu berada pada Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan dengan alokasi Penerima Bantuan BSPS 521 (lima ratus dua puluh satu) unit. Untuk lebih rinci daerah-daerah yang mendapatkan BSPS di Wilayah Perumahan Perdesaan dapat dilinta lebih rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel II-8 Data Daerah penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kabupaten	Jumlah Kuota	No	Kecamatan	No	Nagari/Desa/Kel	Kuota	TFL	KORKAB
1	Kab. Agam	17	1	Candung	1	Bukik Batabuah	4	Budi Haryono, ST	Andi Putra Halomoan, S.Pd.T (17 PB)
			2	Lubuk Basung	2	Garagahan	8		
					3	Lubuk Basung	2		
					4	Manggopoh	2		
			3	Palembayan	5	Sungai Puar	1		
2	Kab. Dharmasraya	50	4	Koto Baru	6	Koto Padang	6	Rianton, S.PSI	Refy Bakhrizal, ST (50 PB)
			5	Koto Besar	7	Koto Tinggi	10		
			6	Pulau Punjung	8	Gunung Selasih	5		



No	Kabupaten	Jumlah Kuota	No	Kecamatan	No	Nagari/Desa/Kel	Kuota	TFL	KORKAB		
					9	Sungai Dareh	7	Hendrik Efendi, ST			
			7	Sembilan Koto	10	Koto Nan Empat Dibawuh	4				
			8	Sitiung	11	Gunung Medan	9				
					12	Sungai Duo	9				
3	Kab. Pasaman	46	9	Lubuk Sikaping	13	Aia Manggih Utara	20	3. Endang Susumaningsih, ST, MT 4. Hana Khairi Afriyanli, M.PD	Andi Putra Halomoan, S.Pd.T (46 PB)		
					14	Durian Tinggi	12				
					15	Tanjung Baringin	14				
4	Kab. Solok Selatan	385	10	Koto Parik Gadang Diateh	16	Pakan Rabaa	20	1. Dian Afriadi, ST 2. Netti Surianingsih, S.E 3. Fazis, S.T	Difra Yuwandra, S.T (224 PB)		
					17	Pakan Rabaa Tengah	18				
					18	Pakan Rabaa Timur	10				
					19	Pakan Rabaa Utara	20				
			11	Pauh Duo	20	Alam Pauh Duo	12	Syafardi, A.MD Benny Setiadi Syahputra, S.SOS			
					21	Kapau Alam Pauh Duo	7				
					22	Luak Kapau Alam Pauh Duo	8				
					23	Pauh Duo Nan Batigo	8				
			12	Sangir	24	Lubuk Gadang	38	1. Bagas Satria Silvano, S.E 2. Fahdel Muhammad Natsir, S.H 3. Fauzul Syafwan, A.MD			
					25	Lubuk Gadang Utara	26				
					26	Lubuk Gadang Timur	12				
					27	Lubuk Gadang Selatan	45	1. Wendra Ramadhana, S.T 2. Diana Afrilina, A.MD			
			13	Sangir Balai Janggo	28	Sungai Kunyit	5	1. Hendra Saputra, S.T 2. Febri Satrianto, S.PD	Suhardi, S.T (161 PB)		
					29	Sungai Kunyit Barat	6				
					30	Talao Sungai Kunyit	7				
					31	Talunan Maju	3				
			14	Sangir Batang Hari	32	Abai	10	1. Doni Primadi, S.T 2. Angga Prima Syokti, S.T			
							33			Dusun Tengah	8
							34			Ranah Pantai Cermin	7
							35			Sitapus	9
					36	Lubuk Ulang Aling	7	1. Feri, S.T 2. Dedi Ruandi, A.MD			
					37	Lubuk Ulang Aling Selatan					
					38	Lubuk Ulang Aling Tengah	8				
			15	Sangir Jujuan	39	Bidar Alam	4	Mobri Pansi, S.T			
							40			Lubuk Malako	5
							41			Padang Air Dingin	5
							42			Padang Gantiang	3
					43	Padang Limau Sundai	3				
			16	Sungai Pagu	44	Bomas	7	1. Aldo Afritama,			

No	Kabupaten	Jumlah Kuota	No	Kecamatan	No	Nagari/Desa/Kel	Kuota	TFL	KORKAB
					45	Koto Baru	5	A.MD 2. M.Habiburrahman, S.E	
					46	Pasar Muara Labuh	8		
					47	Sako Selatan Pasia Talang	11		
					48	Sako Pasia Talang	5		
					49	Pasir Talang	6	1. Edrial, S.T 2. Rifa Marlina, S.E	
					50	Pasir Talang Timur	9		
					51	Pasir Talang Barat	6		
					52	Pulakek Koto Baru	5		
					53	Pasir Talang Selatan	5		
					54	Sako Utara Pasia Talang	4		
5	Kab. Tanah Datar	23	17	Lima Kaum	55	Baringin	10	Roni Samindra Nur, S.E	Refy Bakhrizal, ST (23 PB)
			18	Sungai Tarab	56	Sungai Tarab	13		
JUMLAH							521		

ALOKASI PELAKSANAAN BSPTS TA 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT

521 unit

No	Kabupaten	Alokasi Tertangani
1	Agam	17 Unit
2	Pasaman	46 Unit
3	Dharmasraya	50 Unit
4	Tanah Datar	23 Unit
5	Solok Selatan	385 Unit



Gambar II-1 : Lokasi Kegiatan BSPTS Pada Kawasan Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pembangunan rumah swadaya merupakan program pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni. Program ini pada dasarnya merupakan stimulan atau pendorong bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat sehingga menjadi layak huni. Dengan bantuan dan stimulan dari pemerintah, diharapkan masyarakat secara bersama-sama bisa turut membantu memperbaiki rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik dalam bentuk material bangunan, dana, tenaga dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong royong di masyarakat agar kembali kuat. Adapun laporan yang terkait dengan penyelenggaraan

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah jumlah unit Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Adapun capaian kinerja sasaran tersebut di atas selama TA 2025 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan alokasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah sawadaya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada 8 Kabupaten/Kota dengan 30 (tiga puluh) Kecamatan, 95 (sembilan puluh lima) Desa/kelurahan, jumlah alokasi penerima bantuan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) alokasi dan jumlah KPB (Kelompok Penerima Bantuan) 76 (tujuh puluh enam), untuk lebih rincinya dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel II-9 Lokasi Alokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaa, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Alokasi	KPB
DELINEASI PERDESAAN	18	56	521	57
1. Kab. Solok Selatan	7	39	385	45
2. Kab. Pasaman	1	3	46	4
3. Kab. Agam	3	5	17	2
4. Kab. Tanah Datar	2	2	23	2
5. Kab. Dharmasraya	5	7	50	4
DELINEASI PERKOTAAN	10	37	191	18
6. Kota Solok	2	3	23	2
7. Kota Padang	8	34	168	16
DELINEASI PESISIR	2	2	10	1
8. Kab. Padang Pariaman	2	2	10	1
Jumlah	30	95	722	76

Sumber : Hasil Rekapitulasi Kegiatan Tahun 2025



Tabel II-10 Lokasi Alokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaa, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO.	KABUPATEN/KOTA	INSTRUKSI VERIFIKASI (unit)	BA VERIFIKASI (unit)	SURAT PENETAPAN CPB DIRJEN (unit)	SK PPK (unit)	JUMLAH PENCAIRAN (Rp.)	BELUM SK PPK (unit)	JUMLAH YANG BELUM PENCAIRAN (unit)
DELINEASI PERDESAAN		764	521	521	518	10.360.000.000	3	60.000.000
1	Kab. Solok Selatan	503	385	385	382	7.640.000.000	3	60.000.000
2	Kab. Pasaman	104	46	46	46	920.000.000	-	-
3	Kab. Agam	17	17	17	17	340.000.000	-	-
4	Kab. Tanah Datar	23	23	23	23	460.000.000	-	-
5	Kab. Dharmasraya	117	50	50	50	1.000.000.000	-	-
DELINEASI PERKOTAAN		323	191	191	190	3.800.000.000	1	20.000.000
6	Kota Solok	51	23	23	23	460.000.000	-	-
7	Kota Padang	272	168	168	167	3.340.000.000	1	20.000.000
DELINEASI PESISIR		10	10	10	10	200.000.000	-	-
8	Kab. Padang Pariaman	10	10	10	10	200.000.000	-	-
TOTAL		1097	722	722	718	14.360.000.000	4	80.000.000



Tabel II-11 Progres Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaa, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Propinsi : Sumatera Barat
Periode : 30 Desember 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	RENCANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Progres (%)
		ALOKASI	PENGUSULAN DAN PENETAPAN LOKASI*	PENYIAPAN TIM PELAKSANA*	SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN*	PENGORGANISASIAN CALON PENERIMA BANTUAN	SOSIALISASI DAN PENYULUHAN	PENYUSUNAN PROPOSAL	PENETAPAN SK PENERIMA BANTUAN	Pencairan (dari KPPN ke rekening Penerima Bantuan)	Penyerahan/Transfer ke rekening Penerima Bantuan	Pemesanan Tahap 1	Penerimaan Tahap 1	Transparansi ke Toko	Pelaksanaan Konstruksi Tahap 1	Penarikan Upah Tahap 1	Progres 30%	LPD 1	Pemesanan Tahap 2	Penerimaan Tahap 2	Transparansi ke Toko	Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2	Penarikan Upah Tahap 2	Fisik 100%	LPD 2	
1	KAB. SOLOK SELATAN	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	382	380	313	380	202	296	231	382	258	83	259	-	12	-	100,00 77,43
2	KAB. PASAMAN	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	46	-	29	-	100,00 89,58
3	KAB. AGAM	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	-	17	17	-	17	-	1	-	100,00 86,15
4	KAB. TANAH DATAR	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	-	16	-	100,00 94,74
5	KAB. DHAMASRAYA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13	48	-	50	44	-	45	-	6	-	100,00 81,77
JUMLAH DELINEASI PERDESAAN		521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	518	516	449	516	301	430	300	518	388	106	390	-	64	-	100,00 79,97
1	KOTA SOLOK	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	-	23	23	23	23	-	22	-	11	-	100,00 86,04
2	KOTA PADANG	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	167	167	164	47	164	26	165	163	96	160	-	18	-	100,00 86,12
JUMLAH DELINEASI PERKOTAAN		191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	190	190	187	47	187	49	188	186	96	182	-	29	-	100,00 86,11
1	KAB. PADANG PARIAMAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	-	4	-	100,00 93,75
JUMLAH DELINEASI PESISIR		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	-	4	-	100,00 93,75
PROVINSI SUMATERA BARAT		722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	719	716	649	713	357	627	359	716	584	212	582	-	97	-	100,00 81,78

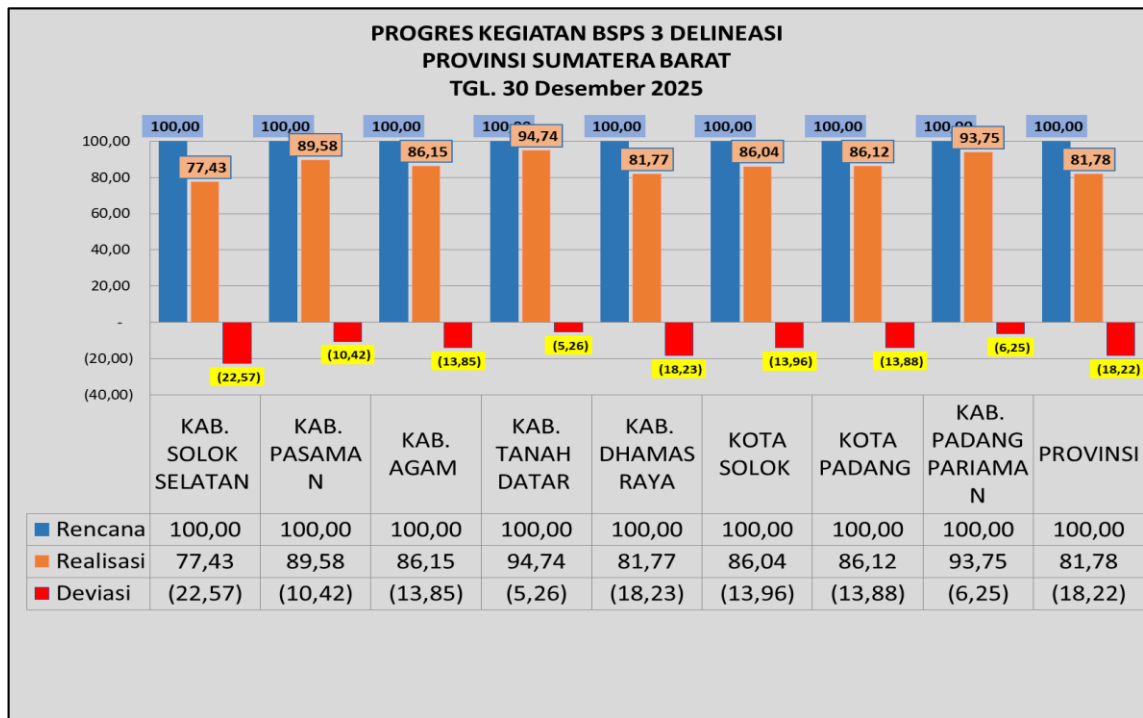


Progres kegiatan BSPS sampai dengan saat ini :

1. Penerimaan bahan bangunan Tahap I & II di masing-masing PB.
2. Pelaksanaan konstruksi Tahap-I & II secara paralel di semua lokasi dampingan fasilitator.
3. Pembayaran Upah Tukang Tahap I kecuali Kabupaten Agam.
4. Secara umum rata-rata progres kegiatan BSPS Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tgl. 30 Desember 2025 sebesar 81,78 % dan rencana 100,00 % sehingga terjadi Deviasi Minus sebesar 18,22 % dari Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang ada, dengan rincian sebagai berikut :
 - Delineasi Perdesaan : Progres 79,97 %, Deviasi : -20,03 %
 - Delineasi Perkotaan : Progres 86,11 %, Deviasi : -13,89 %
 - Delineasi Pesisir : Progres 93,75 %, Deviasi : -6,25 %

Tabel II-12 Progres Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir Berdasarkan 0-30-100% di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	RENCANA	PROGRES					KETERANGAN
		ALOKASI	0 %	0-30 %	30 %	30-100 %	100 %	
1	KAB. SOLOK SELATAN	385	5	84	37	247	12	3 PB Pengganti
2	KAB. PASAMAN	46	-	-	-	17	29	
3	KAB. AGAM	17	-	-	-	16	1	
4	KAB. TANAH DATAR	23	-	-	-	7	16	
5	KAB. DHAMASRAYA	50	-	2	3	39	6	
JUMLAH DELINEASI PERDESAAN		521	5	86	40	326	64	3 PB Pengganti
1	KOTA SOLOK	23	-	-	1	11	11	
2	KOTA PADANG	168	1	-	4	145	18	1 PB Pengganti
JUMLAH DELINEASI PERKOTAAN		191	1	-	5	156	29	
1	KAB. PADANG PARIAMAN	10	-	-	-	6	4	
JUMLAH DELINEASI PESISIR		10	-	-	-	6	4	-
PROVINSI SUMATERA BARAT		722	6	86	45	488	97	4 PB Pengganti



Tabel II-13 Progres Fisik Kegiatan BSPS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NOV				DES				RL	Progr es	Real	
I	II	III	IV	I	II	III	IV				
-	-	-	-	1,50	0,50	-	-	2,00	99,17	1,98	
-	-	0,12	0,04	0,39	1,07	0,36	-	1,98			
-	-	-	-	4,50	4,50	-	-	9,00	80,89	7,28	
-	-	-	-	0,60	3,61	2,68	0,39	7,28			
-	-	-	-	1,25	3,75	-	-	5,00	29,36	1,47	
-	-	-	-	-	-	0,85	0,62	1,47			
-	-	-	-	-	11,25	3,75	-	15,00	80,61	12,09	
-	-	0,44	0,21	1,52	2,37	6,36	1,20	12,09			
-	-	-	-	-	1,25	1,25	-	2,50	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	0,63	1,88	-	2,50	13,43	0,34	
-	-	-	-	-	-	0,17	0,17	0,34			
-	-	-	-	-	-	1,50	0,50	2,00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Progres rata-rata B						71,78	
				Progres rata-rata A+B						81,78	



Tabel II-14 RKTU Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	RC RL	Vol	BOBOT	BULAN																				RC RL	Persentase					
					JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV					DES				Progr es	Real
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
A. TAHAP PERSIAPAN																															
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi*	RC RL	722	1,00									1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00	1,00
2	Penyiapan Tim Pelaksana*	RC RL	722	1,00									1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00	1,00
3	Seleksi Calon Penerima Bantuan*	RC RL	722	2,00									1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	100,00	2,00
4	Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan	RC RL	722	1,00									-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100,00	1,00
5	Sosialisasi dan Penyuluhan	RC RL	722	2,00									-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	100,00	2,00
6	Penyusunan Proposal*	RC RL	722	3,00									-	-	-	-	0,75	1,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	100,00	3,00
B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI				10,00																					Progres rata-rata A		10,00				
7	Penetapan SK Penerima BSPS oleh PPK	RC RL	722	10,00									-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	100,00	10,00
8	Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening Giro Satker	RC RL	722	2,00									-	-	-	-	-	1,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	100,00	2,00
9	Penyaluran Dana ke Tabungan Penerima Bantuan	RC RL	722	2,00									-	-	-	-	-	-	1,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	100,00	2,00
10	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap I	RC RL	722	2,00									-	-	-	-	-	-	-	1,93	0,02	0,05	-	-	-	-	-	-	2,00	99,58	1,99
11	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I	RC RL	722	9,00									-	-	-	-	-	-	-	0,03	1,86	0,02	0,01	0,07	0,00	-	-	-	9,00	99,17	8,93
12	Transfer Dana BSPS tahap I ke Toko Bahan Bangunan	RC RL	722	5,00									-	-	-	-	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	5,00	89,89	4,49
13	Pelaksanaan konstruksi tahap I	RC RL	722	15,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	98,75	14,81
14	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap I	RC RL	722	2,50									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	49,45	1,24
15	Progres Fisik Rumah 30%	RC RL	722	2,50									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	86,84	2,17
16	Laporan Penggunaan Dana Tahap I	RC RL	722	2,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	49,72	0,99
17	Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II	RC RL	722	2,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	99,17	1,98
18	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II	RC RL	722	9,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	80,89	7,28
19	Transfer Dana BSPS tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan	RC RL	722	5,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	29,36	1,47
20	Pelaksanaan konstruksi tahap II	RC RL	722	15,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	80,61	12,09
21	Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap II / sekaligus tahap I dan II*	RC RL	722	2,50									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Progres Fisik Rumah 100%	RC RL	722	2,50									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	13,43	0,34
23	Laporan Penggunaan Dana Tahap II	RC RL	722	2,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan :				90,00																					Progres rata-rata B		71,78				
TOTAL				100,00																					Progres rata-rata A+B		81,78				

**Tabel II-15 Kendala dan Masalah Kegiatan BSPS Perumahan Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Kendala	Penyebab	Strategi
1.	Masih ada tersisa 3 PB lagi dari 25 PB awal yang mundur setelah SK Penetapan Dirjen dan SK PPK.	Menolak menerima bantuan program BSPS atas keinginan sendiri.	Telah dilakukan verifikasi terhadap CPB pengganti dan telah dilaporkan Berita Acara hasil verifikasinya ke Balai dan tinggal menunggu SK Dirjen.
2.	Secara umum terjadi keterlambatan progres kegiatan hampir di semua lokasi kegiatan.	1. Akumulasi dari terlambatnya selesai proses verifikasi & pergantian CPB. 2. Terlambatnya penyelesaian proposal terutama dokumen teknisnya. 3. Terlambatnya penyelesaian proses PTT dan ada hasil PTT melebihi HPS PPK, maka PTT diulang kembali. 4. Ada toko yang sudah dikontrak oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) namun mundur dari penyedia karena pertimbangan lokasi yg jauh dan sebagainya.	1. Semua lokasi difasilitasi toko bahan bangunan untuk melakukan suplay material 100% langsung dengan tetap pembayaran 2 kali sebagaimana aturan yang ada sehingga kondisi jalan & jarak tempuh akan menjadi pertimbangan oleh toko pada saat Pemilihan Toko Terbuka (PTT). 2. Percepatan penyelesaian dokumen sesuai kebutuhan program. 3. Percepatan pelaksanaan PTT ulang atau survey untuk lokasi yang melebihi HPS PPK & yang mundur setelah kontrak dgn KPB.
3.	Pasca bencana banjir & tanah longsor, ada sebanyak 249 PB berpotensi tidak akan selesai sampai dengan tgl. 31 Desember 2025.	1. Rata-rata karena toko penyedianya kesulitan mendapatkan material lokal (Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu), 2. Terganggunya suplay material non pabrikan dari Kota Padang ke Kab/Kota lainnya karena kondisi jalan yang sering macet di ruas Sitinjau Lawik (Padang-Solok). 3. Sulit mencari tukang tambahan untuk mempercepat penyelesaian rumah-rumah PB.	1. Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan suplay material ke PB yang masih bisa untuk dilakukan, baik bahan pabrikan maupun yang non pabrikan. 2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama. 3. Difasilitasi saudara-saudara PB yg bersangkutan agar bisa membantu utk bekerja dan ini akan mengurangi PB dari aspek pembayaran upah.

**Tabel II-16 Kendala dan Masalah Kegiatan BPS Perumahan Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Kendala	Penyebab	Strategi
1.	Delineasi Perkotaan ada lagi 1 CPB yang mundur setelah SK Penetapan Dirjen.	Karena terjadi CPB konflik keluarga.	Telah ada CPB yang diverifikasi namun menunggu Instruksi Verifikasi serta SK Dirjen.
2.	Secara umum terjadi keterlambatan progres kegiatan hampir di semua lokasi kegiatan.	1. Akumulasi dari terlambatnya selesai proses verifikasi & pergantian CPB. 2. Terlambatnya penyelesaian proposal terutama dokumen teknisnya. 3. Terlambatnya penyelesaian proses PTT.	1. Semua lokasi difasilitasi toko bahan bangunan untuk melakukan suplay material 100% langsung dengan tetap pembayaran 2 kali sebagaimana aturan yang ada sehingga kondisi jalan & jarak tempuh akan menjadi pertimbangan oleh toko pada saat Pemilihan Toko Terbuka (PTT). 2. Percepatan penyelesaian dokumen sesuai kebutuhan program. 3. Percepatan pelaksanaan PTT dilokasi yang belum terlaksana.
3.	Pasca bencana banjir & tanah longsor, ada sebanyak 83 PB berpotensi tidak akan selesai sampai dengan tgl. 31 Desember 2025.	1. Rata-rata karena toko penyediaanya kesulitan mendapatkan material lokal (Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu), 2. Kondisi jalan penghubung yang relatif rusak dengan posisi PB yang menyebar serta 3. Dan ada juga tukang yang sudah berjanji mau mengerjakan dan memilih kerja ditempat lain. 4. Ada 6 PB yang terkena bencana langsung.	1. Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan suplay material ke penerima bantuan yang masih bisa untuk dilakukan, baik bahan pabrikan maupun yang non pabrikan. 2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama. 3. Difasilitasi saudara-saudara PB yg bersangkutan agar bisa membantu utk bekerja dan ini akan mengurangi PB dari aspek pembayaran upah. 4. Untuk yang terkena bencana langsung agar didata dengan lengkap untuk dilaporkan ke pihak terkait.
4.	PB atas nama Yusni tidak lagi bisa melanjutkan kegiatan Pembangunan rumahnya.	1. Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam 2. Rumah sekarang posisinya	1. Korkot dan TFL telah melakukan analisa lapangan dan menyimpulkan bahwa

No	Kendala	Penyebab	Strategi
		di pinggir sungai buatan bencana banjir bandang.	posisi rumah semakin berbahaya dan tidak layak lagi sebagai rumah yang aman sebagai tempat tinggal. 2. Korkot dan TFL telah melibatkan KPB serta pemangku kepentingan lainnya untuk menganalisa kasus ini. 3. Korkot dan TFL telah membuat berita acara lengkap dengan justifikasi lapangan yang diperkuat dengan foto2 terhadap rumah ybs.

Tabel II-17 Kendala dan Masalah Kegiatan BPSK Kawasan Prmukiman di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kendala	Penyebab	Strategi
1.	Ada 1 (Satu) PB atas nama Darmiati meninggal dunia, dan terlambat memulai pelaksanaan fisik rumahnya sehingga berpotensi tidak akan selesai tgl.31 Desember 2025.	1. Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengganggu aktifitas pelaksanaan fisik di lapangan. 2. Toko penyedia agak terkendala dalam mendapatkan papan untuk dinding rumah karena kurangnya pasokan pasca bencana alam di Provinsi Sumatera Barat.	1. Setelah dilakukan pendekatan dengan saudara PB yang bersangkutan, maka pelaksanaan konstruksi akan dimulai setelah do'a 7 (Tujuh) harian. 2. Difasilitasi toko bahan bangunan agar menuntaskan seluruh kebutuhan PB, baik bahan pabrikan maupun yang non pabrikan dengan memanfaatkan cuaca bagus tentunya.
2.	Ada 2 PB yang berpotensi tidak akan selesai tgl.31 Desember 2025.	Terkena bencana banjir langsung.	1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama. 2. Untuk yang terkena bencana langsung agar didata dengan lengkap untuk dilaporkan ke pihak terkait. 3. Hingga saat ini proses pelaksanaan konstruksi telah berjalan normal kembali.



DAMPAK BENCANA

Bencana Banjir Bandang yang Terjadi Di Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 November 2025, maka terdapat Penerima Bantuan yang terdampak bencana tersebut. Adapun Rekap Daftar Penerima Bantuan Yang Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Terhadap Kegiatan BSPS Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

Tabel II-18 Rekap Daftar Penerima Bantuan Yang Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Terhadap Kegiatan BSPS Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

REKAP LOKASI TERDAMPAK BENCANA BANJIR & TANAH LONGSOR TERHADAP KEGIATAN BSPS PERDESAAN, PERKOTAAN DAN PESIR TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT										
NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ NAGARI	ALOKASI	PB TIDAK TERDAMPAK	PB YANG TERDAMPAK	JENIS TINDAKAN		DAMPAK PASCA BENCANA	UPAYA PENANGANAN
							PKRS	BONGKAR BANGUN BARU		
1	SOLOK SELATAN	7	38	385	154	231	143	88	1. Rata-rata karena toko penyedia kesulitan mendapatkan material lokal (Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu), 2. Kondisi jalan penghubung yang relatif rusak dengan posisi PB yang menyebar serta 3. Ada 14 PB berada di lokasi terisolir. 4. Dan ada juga tukang yang sudah berjanji mau mengerjakan rumah PB lebih memilih kerja mendulang/mencari emas.	1. Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan suplay material ke PB yang masih bisa untuk dilakukan, baik bahan pabrikasi maupun yang non pabrikasi. 2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama terutama yg terisolir. 3. Difasilitasi saudara-saudara PB yg bersangkutan agar bisa membantu utk bekerja dan ini akan mempercepat progres serta mengurangi PB dari aspek pembayaran upah.
2	PASAMAN	1	4	46	46	0	0	0	Secara umum semua PB aman dan bisa selesai 31 Desember 2025	
3	AGAM	3	5	17	10	7	2	5	PB baru memulai pekerjaan fisik rumahnya pada tanggal 29 Nov 2025 karena sering turun hujan atau cuaca ekstrim dan PB yang bersangkutan semuanya tidak yakin akan selesai 31 Desember 2025.	Difasilitasi penambahan tukang atau saudara-saudara PB yg bersangkutan agar bisa membantu utk bekerja dan ini akan mempercepat serta mengurangi PB dari aspek pembayaran upah.
4	TANAH DATAR	2	2	23	23	0	0	0	Secara umum semua PB aman dan bisa selesai 31 Desember 2025	
5	DHARMASRAYA	5	7	50	39	11	7	4	1. Rata-rata karena toko penyedia kesulitan mendapatkan material lokal (Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu), 2. Sulit mencari tukang tambahan untuk mempercepat penyelesaian rumah-rumah PB. 3. Terganggunya suplay material non pabrikasi dari Kota Padang ke Dharmasraya karena kondisi jalan yang sering macet di ruas Sitiinjau Lawik (Padang-Solok).	1. Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan suplay material ke PB yang masih bisa untuk dilakukan, baik bahan pabrikasi maupun yang non pabrikasi. 2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama. 3. Difasilitasi saudara-saudara PB yg bersangkutan agar bisa membantu utk bekerja dan ini akan mempercepat progres serta mengurangi PB dari aspek pembayaran upah.
Delineasi Perdesaan		18	56	521	272	249	152	97		
6	SOLOK	2	2	23	19	4	2	2	1. Rata-rata karena toko penyedia kesulitan mendapatkan material lokal (Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu), 2. Ada 2 PB yang terkena langsung oleh banjir sehingga mengakibatkan material yang sudah diantar toko penyedia hanyut terbawa arus.	1. Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan suplay material ke penerima bantuan yang masih bisa untuk dilakukan, baik bahan pabrikasi maupun yang non pabrikasi. 2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama.
7	PADANG	6	22	168	89	79	70	9	1. Rata-rata karena toko penyedia kesulitan mendapatkan material lokal (Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu), 2. Kondisi jalan penghubung yang relatif rusak dengan posisi PB yang menyebar serta 3. Dan ada juga tukang yang sudah berjanji mau mengerjakan dan memilih kerja ditempat lain.	3. Difasilitasi saudara-saudara PB yg bersangkutan agar bisa membantu utk bekerja dan ini akan mempercepat progres serta mengurangi PB dari aspek pembayaran upah. 4. Untuk yang terkena bencana langsung agar didata dengan lengkap untuk dilaporkan ke pihak terkait.
Delineasi Perkotaan		8	24	191	108	83	72	11		
8	PADANG PARIAMAN	2	2	10	9	1	1	0	1. Terlambat memulai pekerjaan fisik rumah atas nama Darmiati karena PB yang bersangkutan meninggal dunia dan menunggu 7 hari setelah penguburan. 2. Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengganggu aktifitas pelaksanaan fisik di lapangan. 3. Toko penyedia agak terkendala dalam mendapatkan papan untuk dinding rumah karena kurangnya pasokan pasca bencana alam di Provinsi Sumatera Barat.	1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama. 2. Untuk yang terkena bencana langsung agar didata dengan lengkap untuk dilaporkan ke pihak terkait. 3. Hingga saat ini proses pelaksanaan konstruksi telah berjalan normal kembali.
Delineasi Pesisir		2	2	10	9	1	1	0		
TOTAL JUMLAH		28	82	722	389	333	225	108	Secara keseluruhan ada sebesar 46,12 % yang terdampak bencana ini.	



Tabel II-19 Daftar Penerima Bantuan yang Terdampak Bencana di Provinsi

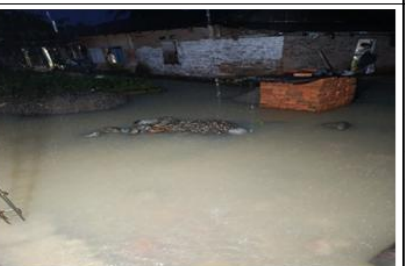
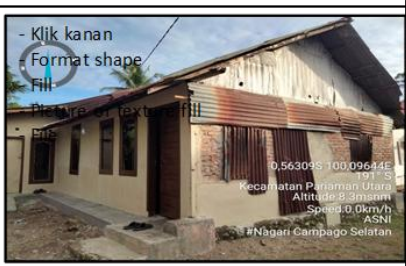
DAFTAR PENERIMA BANTUAN YANG TERKENA BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
TERHADAP KEGIATAN BSPPS PERKOTAAN DAN PESIRIR TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA PB	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	KONDISI PASCA BENCANA	
1	Novrizki Asdepa	Jl. Sersan Basir RT/RW 002/005	Tanah Garam	Lubuk Sikarah	Kota Solok	Pekerjaan terhenti karena curah hujan yang realtif tinggi.	Masih bisa untuk dilanjutkan
2	Syamzwirzal	Jl. Ir Soekarno RT/RW 001/001	Tanah Garam	Lubuk Sikarah	Kota Solok	Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam.	Masih bisa untuk dilanjutkan
3	Ermita Susanti	Komplej Niur Melambai	Pasie Nan Tigo	Koto Tengah	Kota Padang	Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam.	Masih bisa untuk dilanjutkan
4	Roro Eriawan	Kampung Jambak	Gunung Sarik	Kuranji	Kota Padang	Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam.	Masih bisa untuk dilanjutkan
5	Yusni	Gurun Panjang	Gunung Sarik	Kuranji	Kota Padang	Tidak lagi bisa melanjutkan kegiatan karena : 1. Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam 2. Rumah sekarang posisinya di pinggir sungai buatan bencana banjir bandang.	Informasi dari Korkot & TFL berdasarkan analisa lapangan, posisi rumah semakin berbahaya dan tanah di bawah bangunan rumahnya sudah semakin terkikis oleh air sungai dan tidak layak lagi sebagai rumah yang aman untuk tempat tinggal.
6	Nurlinan	Jl. Pertanian	Lubuk Minturun	Koto Tengah	Kota Padang	Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam.	Masih bisa untuk dilanjutkan
7	Rosman	Palanggaran	Campago Selatan	V Koto	Kab. Padang Pariaman	Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam.	Masih bisa untuk dilanjutkan
8	Asni	Palanggaran	Campago Selatan	V Koto	Kab. Padang Pariaman	Bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak terendam.	Masih bisa untuk dilanjutkan



NO	DATA PENERIMA BANTUAN		FOTO 0 %	FOTO KONDISI TERKINI	KETERANGAN/KONDISI KEGIATAN
1	NO BNBA	: 78			- Pekerjaan sdh 30%, (Sisi kiri bangunan awal)
	NAMA	: NOVRIZKI ASODEPA			- Kegiatan terkendala, tidak terdampak banjir
	ALAMAT	: Jl. Sersan Basir RT/RW 002/004			tetapi terdampak oleh curah hujan yang tinggi
	Kelurahan	: Tanah Garam			sehingga kegiatan terhenti beberap hari
	BENTUK KEGIATAN	: PKRS			- Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah
	BIAYA BSPTS	: 20.000.000			
2	NO BNBA	: 79			- Pekerjaan sudah 30%
	NAMA	: SYAMZWIRZAL			- Kegiatan terkendala, terdampak banjir 2 kali
	ALAMAT	: JL. Ir Soekarno RT001/RW			tanggal 23 dan 27 November 2025, sehingga
	Kelurahan	: VI SUKU			sehingga kegiatan terhenti beberap hari, mate
	BENTUK KEGIATAN	: PKRS			rial pasir hanyut dan semen terendam air
	BSPTS	: 20.000.000			- Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah
3	NO BNBA	: 31			- Kegiatan terkendala, terdampak banjir 2 kali
	NAMA	: ERNITA SUSANTI			tanggal 23 dan 27 November 2025, sehingga
	ALAMAT	: Komplek niur melambai			sehingga kegiatan terhenti beberap hari, mate
	Kelurahan	: Pasia nan tigo			rial pasir hanyut dan semen terendam air
	BENTUK KEGIATAN	: PKRS			- Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah
	BIAYA BSPTS	: 20.000.000			
4	NO BNBA	: 57			- Kegiatan terkendala, terdampak banjir 2 kali
	NAMA	: RORI ERIAWAN			tanggal 23 dan 27 November 2025, sehingga
	ALAMAT	: Kampung Jambak			sehingga kegiatan terhenti beberap hari, mate
	NAGARI	: Gunung Sarik			rial pasir hanyut dan semen terendam air
	BENTUK KEGIATAN	: PKRS			- Rumah sudah berada di Pingir Sungai
	BIAYA BSPTS	: 20.000.000			- Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah

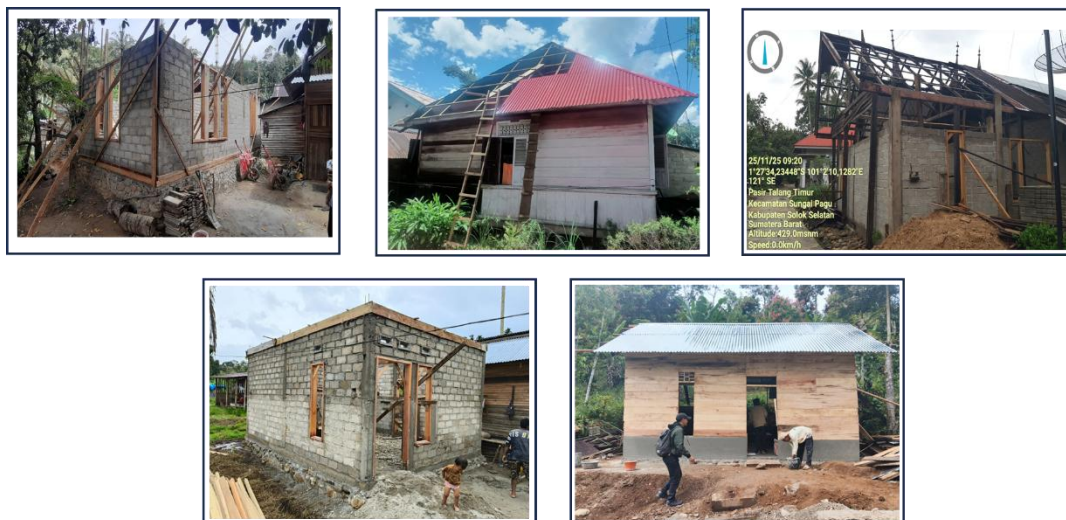


6	NO BNBA	: 120			- Kegiatan terkendala, terdampak banjir 2 kali tanggal 23 dan 27 November 2025, sehingga kegiatan terhenti beberap hari, material pasir hanyut dan semen terendam air - Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah
	NAMA	: YUSNI			
	ALAMAT	: Gurun panjang			
	NAGARI	: Gunung Sarik			
	BENTUK KEGIATAN	: PKRS			
	BIAYA BSPS	: -			
5	NO BNBA	: 86			- Pekerjaan sudah 30% - Kegiatan terkendala, terdampak banjir 2 kali tanggal 23 dan 27 November 2025, sehingga kegiatan terhenti beberap hari, material pasir hanyut dan semen terendam air - Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah - Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah
	NAMA	: Nurliana			
	ALAMAT	: JL.Pertanian			
	NAGARI	: Lubuk Minturun			
	BENTUK KEGIATAN	: PKRS			
	BIAYA BSPS	: 20.000.000			
7	NO BNBA	: 421			- Pekerjaan sudah 30% - Kegiatan terkendala, terdampak banjir 2 kali tanggal 23 dan 27 November 2025, sehingga kegiatan terhenti beberap hari, material pasir hanyut dan semen terendam air - Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah
	NAMA	: Rosman			
	ALAMAT	: Palangaran			
	NAGARI	: Campago Selatan			
	BENTUK KEGIATAN	: PKRS			
	BIAYA BSPS	: 20.000.000			
8	NO BNBA	: 604			- Pekerjaan menuju 30% - Kegiatan terkendala, terdampak banjir 2 kali tanggal 23 dan 27 November 2025, sehingga kegiatan terhenti beberap hari, material pasir hanyut dan semen terendam air - Pencairan Dana Toko Tahap 1 sudah
	NAMA	: Asni			
	ALAMAT	: Palanggaran			
	NAGARI	: Campago Selatan			
	BENTUK KEGIATAN	: Rehab			
	BIAYA BSPS	: 20.000.000			



Tindaklanjut/Penanganan Permasalahan Kegiatan Kegiatan akan dilakukan dalam rangka percepatan kegiatan BSPS :

1. Melakukan monitoring secara kontiniu dengan berkunjung langsung ke lokasi kegiatan terutama yang berpotensi terkendala/bermasalah serta lokasi lainnya sehingga jikalau ada yang berpotensi bermasalah segera difasilitasi penanganannya, termasuk pasca bencana banjir & tanah longsor.
2. Melakukan rapat atau zoom dengan TFL maupun Korkab dalam rangka pengendalian kegiatan maupun penanganan kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan.
3. Mendorong seluruh pelaku untuk selesaikan administrasi kegiatan sesuai tahapan tanpa menunggu tertimpa oleh tahapan berikutnya.
4. Memberikan fasilitasi kepada TFL dan Korkab terkait percepatan progres pelaksanaan fisik di masing-masing lokasi dampingan TFL.
5. Mendorong TFL dan Korkab untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan sehingga kerja besar ini bisa kita kerjakan secara bersama.



Gambar II-2 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BSPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Gambar II-3 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BSPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Gambar II-4 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BSPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tahun 2025



Gambar II-5 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BSPS Perumahan Perdesaan Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat Tahun 2025



Gambar II-6 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BSPS Perumahan Perkotaan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Nama PB	:	MAIYUNI DAWATI	Kota	:	PADANG
Alamat	:	SAWAH LAING	Provinsi	:	SUMATERA BARAT
Kelurahan	:	GUNUNG SARIK	Nomor BNBA	:	30
Kecamatan	:	KURANJI	Nomor KTP	:	1371094805760005



Progres Fisik 0 %



Progres Fisik 30-<100 %



Progres Fisik 100 %

Nama PB	:	Ria Anggraini	Kota	:	Solok
Alamat	:	Jl. Banda Balantai RT004/RW006	Provinsi	:	Sumatera Barat
Kelurahan	:	Kampung Jawa	Nomor BNBA	:	70
Kecamatan	:	Tanjung Harapan	Nomor KTP	:	1372024201930001



Progres Fisik 0 %



Progres Fisik 30-<100 %



Progres Fisik 100 %



Kondisi Terkini

Nama Penerima Bantuan	:	Yusmarni
NIK	:	1308054404880002
Alamat	:	jl st syahril jr kp lintang
Kecamatan	:	LUBUAK SIKAPING
Kabupaten/kota	:	PASAMAN
Provinsi	:	SUMATRA BARAT
Nilai Bantuan	:	RP.20.000.000
Nilai Swadaya	:	Rp. 8.881.590
Titik Koordinat	:	+0,124,0N+100,1719E
Prioritas Perbaikan	:	Rehap Total

NB : Pada foto dokumentasi harus ada keterangan stamp map (waktu, tanggal, dan lokasi (menggunakan GPS))



0 %



30- 50 %



100%



Kondisi Terkini

Nama Penerima Bantuan	: Dewi emelinda wati
NIK	: 1403016512777087
Alamat	: jl. proklamasi no 48
Kecamatan	: LUBUAK SIKAPING
Kabupaten/kota	: PASAMAN
Provinsi	: SUMATRA BARAT
Nilai Bantuan	: RP.20.000.000
Nilai Swadaya	: Rp. 17.352.844
Titik Koordinat	: +0,1285N+100,1678E
Prioritas Perbaikan	: Rehap Total

NB : Pada foto dokumentasi harus ada keterangan stamp map (waktu, tanggal, dan lokasi (menggunakan GPS))



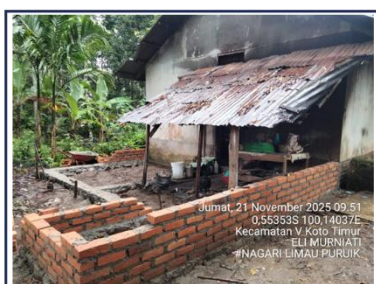
0 %



30- 50 %



100%



Gambar II-7 : Dokumentasi Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan BSPS Kawasan Pesisir Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

II.1.4 PERENCANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

II.1.4.1 Review DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo, Kota Padang

Lokasi pekerjaan peningkatan kualitas sanitasi rumah ini terletak di Kawasan Pasia Nan Tigo, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :

DIPA APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-146.03.1.691438/2025 tanggal 02 Desember 2024. Total perkiraan pagu adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Review Ded Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo, Kota Padang adalah sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan yang meliputi seluruh pekerjaan awal dan sebelumnya pekerjaan seperti penyusunan mobilisasi personil tenaga ahli dan penunjang, penyiapan bahan pustaka dan data sekunder, pengumpulan dokumen perencanaan terdahulu;
- b. Melakukan survei primer dan sekunder untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam menyusun program dan rencana dalam melaksanakan perencanaan teknis;
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan utilitas yang akan dibangun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas; dan
- d. Penyusunan dokumen perencanaan Site plan, meliputi: gambar rencana dan penyesuaian terhadap pola eksisting.
- e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Detail/Detail Engineering Design (DED) untuk fasilitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sesuai ruang lingkup kegiatan.
- f. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan hasil perencanaan teknis dan harga satuan terbaru; dan

Koordinasi dan pelaporan, termasuk rapat koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis terkait dan masyarakat, penyusunan laporan pendahuluan dan laporan akhir, dan penyampaian dokumen dalam bentuk cetak dan digital sesuai ketentuan.

Output (keluaran) dari kegiatan ini Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasia Nan Tigo ini berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari:

- 1). Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasia Nan Tigo dengan detail sebagai berikut.

- Laporan Pendahuluan;
- Gambar rencana teknis kerja (ukuran kertas A3);
- Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- Engineering Estimate (EE) dan BOQ;
- Spesifikasi Teknis;
- Laporan Akhir; dan
- Soft copy laporan (dalam bentuk flash disk 64 gb).

A. Volume dan Satuan Ukur

Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang

DATA UMUM	
Luasan Kumuh	52,64 Ha
Skor Kumuh	55 (Kumuh Sedang)
Pekerjaan Bangunan Rumah	11 Unit
Pekerjaan Jalan Lingkungan	718 m
Pekerjaan Drainase	3.040 m
Pekerjaan Pengelolaan Persampahan	-
Pekerjaan Ruang Terbuka	-
Pekerjaan Penyediaan Air Minum	-
Pekerjaan Sarana Proteksi Kebakaran	-
Konsultan SPV/MK	CV. BINTANG SEMBILAN KONSULTAN, PT. POLA PEMBANGUNAN KONSULTAN (KSO)
Tgl Kontrak	03 November 2025
Nilai Kontrak/ Nilai Add	Rp 295.289.500,00/ Rp. 198.728.000,00
Kontraktor Pelaksana	CV. RIAU ANDALAN UTAMA
Tgl Kontrak	21 Oktober 2025
Nilai Kontrak/ Nilai Add	Rp 7.546.874.300,00 / Rp. 8.299.814.800,00

DATA PEMAKAIAN ALAT BERAT		DATA JUMLAH PEKERJA		RENCANA 92,20%		REALISASI 87,37%		DEVIASI -4,83%	
Jenis Alat berat	Jumlah	Posisi/Kedudukan	Jumlah	WAKTU PELAKSANAAN		RENCANA SERAH TERIMA			
Excavator Mini	1 Unit	Mandor	3 Orang	Waktu Pelaksanaan	72 Hari Kalender	PHO	31 Desember 2025		
Mini Crane	1 Unit	Tukang	8 Orang	Waktu Terpakai	69 Hari Kalender	FHO	28 Juni 2026		
Dump Truck	2 Unit	Pekerja	19 Orang	Sisa Waktu	3 Hari Kalender				
.....	 Unit			PROGRES KEUANGAN SUPERVISI		PROGRES KEUANGAN FISIK			
Total Alat Berat	4 Unit	Total Jumlah Pekerja	30 Orang	Rencana	70 %	Rencana	70 %		
				Realisasi	85 %	Realisasi	85%		

Gambar II-8 : Dokumentasi Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah



Tabel II-20 Progres Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	MC - 1		ADDENDUM I		Persentase Progres Pekerjaan						Realisasi
			VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
				%		%		%		%		%	%
A	PEKERJAAN JALAN												
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga	Keg	1,00	0,04	1,00	0,04	0,50	0,02	-	-	0,50	0,02	50,00
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	Keg	1,00	0,04	1,00	0,03	0,93	0,03	0,03	0,00	0,97	0,03	96,55
3	Papan nama kegiatan	Bh	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	100,00
4	Pengukuran ulang (Stake Out) dan Penggambaran	M	718,00	0,03	718,00	0,02	657,10	0,02	30,45	0,00	687,55	0,02	95,76
	SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN			0,11		0,10		0,08		0,00		0,08	
II.	PEKERJAAN PERKERASAN BETON												
1	Timbunan Dan Pematatan Sirtu	M3	132,10	0,41	138,00	0,39	130,00	0,36	8,00	0,02	138,00	0,39	100,00
2	Pengecoran beton menggunakan Ready Mixed mutu Fc 25 Mpa. termasuk	M3	323,10	8,36	323,10	7,60	308,08	7,24	7,51	0,18	315,59	7,42	97,68
3	Timbunan Tanah Didatangkan + Dipadatkan	M3			97,20	0,21	97,20	0,21	-	-	97,20	0,21	100,00
	SUB TOTAL PEKERJAAN PERKERASAN BETON			8,76		8,19		7,82		0,20		8,01	
B	PEKERJAAN DRAINASE												
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Keg	1,00	0,01	1,00	0,01	0,50	0,01	-	-	0,50	0,01	50,00
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Keg	1,00	0,03	1,00	0,02	0,75	0,02	0,13	0,00	0,88	0,02	87,50
3	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	1,00	0,01	100,00
4	Stake out trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan	M	3.040,00	0,18	3.142,00	0,17	2.800,00	0,15	222,30	0,01	3.022,30	0,16	96,19
	SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN			0,23		0,21		0,18		0,01		0,20	
II.	PEKERJAAN SALURAN												
1	Pasang Profil Melintang Dan Memanjang Saluran	M1	304,00	0,11	314,20	0,10	295,00	0,09	19,20	0,01	314,20	0,10	100,00
2	Bongkaran Beton Dengan Jack Hammer	M3	45,00	0,03	45,00	0,03	16,67	0,01	28,33	0,02	45,00	0,03	100,00
3	Pembongkaran Pasangan Lama	M3	36,00	0,09	36,00	0,08	36,00	0,08	-	-	36,00	0,08	100,00
4	Pekerjaan Dewatering												
	Kistdam Pasir/Tanah Dibungkus Karung Plastik Bagor 43 X 65 Cm	Bh	1.000,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kerangka Kayu Untuk Kistdam Pasir/Tanah Ukuran 43 X 65 Cm	M3	333,33	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengoperasian Per-Jam Pompa Air Diesel Daya 7.5 Kw (Kapasitas 0.5 M3/S)	Jam	4.500,00	2,61	4.500,00	2,37	1.680,00	0,88	840,00	0,44	2.520,00	1,33	56,00
5	Penggalian Tanah Biasa Sedalam	M3	1.581,05	2,09	1.651,90	1,98	1.322,64	1,59	230,48	0,28	1.553,12	1,87	94,02
6	Pas. Kayu Dolken Ø8 - 10 Cm	M			1.600,00	1,14	1.520,00	1,08	80,00	0,06	1.600,00	1,14	100,00
7	Saluran U-Ditch 60X60X100 Cm Dengan Lantai Kerja F C 10 Mpa	M	1.997,00	30,02	1.997,00	27,30	1.904,00	26,03	20,00	0,27	1.924,00	26,30	96,34
8	Saluran U-Ditch 80X80X100 Cm Dengan Lantai Kerja F C 10 Mpa	M	1.043,00	27,73	1.145,00	27,68	1.000,00	24,17	-	-	1.000,00	24,17	87,34
9	Tutup U-Ditch (Tipe LD) Untuk U-Ditch 60X60X100 Cm	M	1.997,00	13,07	1.931,00	11,49	1.882,00	11,20	30,00	0,18	1.912,00	11,38	99,02
10	Tutup U-Ditch (Tipe LD) Untuk U-Ditch 80X80X100 Cm	M	1.043,00	9,13	1.145,00	9,11	1.000,00	7,96	-	-	1.000,00	7,96	87,34
11	Pembuatan s.d Pengecoran beton mutu rendah fc' 20 MPa. slump (100	M3	99,05	1,76	55,73	0,90	-	-	39,01	0,63	39,01	0,63	70,00
12	Pengurugan Kembali Galian Tanah	M3	359,34	0,40	387,04	0,39	356,60	0,36	19,79	0,02	376,39	0,38	97,25
13	Angkut Material Hasil Galian oleh Dump Truck sejauh 1,5 Km	M3	1.302,71	0,34	1.345,86	0,32	1.225,76	0,29	78,07	0,02	1.303,82	0,31	96,88
14	Pekerjaan Penutup Saluran (Piat ducker)												
	a. Pekerjaan Pembuatan s.d Pengecoran beton fc' 20 Mpa	M3			16,50	0,27	3,38	0,05	1,65	0,03	5,03	0,08	30,45
	b. Pekerjaan Bekisting	M2			86,90	0,17	21,14	0,04	17,38	0,03	38,52	0,08	44,32
	c. Pekerjaan Pembesian	KG			3.116,54	0,80	583,10	0,15	467,48	0,12	1.050,59	0,27	33,71
15	Pas. Batu Kali Fc 12,5 Mpa	M3			37,92	0,49	37,92	0,49	-	-	37,92	0,49	100,00



Laporan Kinerja TA 2025

SATKER PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROV. SUMBAR

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	MC - 1		ADDENDUM I		Persentase Progres Pekerjaan						Realisasi
			VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	Minggu Lalu		Minggu Ini		s/d Minggu Ini		
							Volume	Bobot	Volume	Bobot	Volume	Bobot	
				%		%		%		%		%	%
16	Box Culvert 80X80X100 Cm fc' 10 Mpa	M			48,00	4,39	-	-		-	-	-	-
	SUB TOTAL PEKERJAAN SALURAN			88,16		89,00		74,48		2,10		76,58	
C	PEKERJAAN REHAP RUMAH (11 UNIT)												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Penyelenggaraan SMK3	KEG	11,00	0,01	11,00	0,01	11,00	0,01	-	-	11,00	0,01	100,00
	SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN			0,01		0,01		0,01		-		0,01	
II	PEKERJAAN PONDASI												
1	Pek.Galian Tanah Pondasi	M3	53,63	0,09	53,63	0,08	53,63	0,08	-	-	53,63	0,08	100,00
2	Pek.Pasangan Aanstampang	M3	35,75	0,27	35,75	0,25	35,75	0,25	-	-	35,75	0,25	100,00
3	Pek.Pasangan Batu Kali	M3	34,85	0,50	34,85	0,45	34,85	0,45	-	-	34,85	0,45	100,00
	SUB TOTAL PEKERJAAN PONDASI			0,86		0,78		0,78		-		0,78	
III	PEKERJAAN DINDING												
1	Pek.Membuat 1 m kolom praktis beton bertulang (11 x 11) Cm	M1	352,00	0,57	352,00	0,52	352,00	0,52	-	-	352,00	0,52	100,00
2	Pek. Membuat 1 m Ring balok beton bertulang (10 x 15) Cm	M1	192,50	0,41	192,50	0,37	192,50	0,37	-	-	192,50	0,37	100,00
3	Pek. Membuat 1 m Sloof beton bertulang (15 x 20) Cm	M1	357,50	0,85	357,50	0,77	357,50	0,77	-	-	357,50	0,77	100,00
4	Pek. Memasang Stek Besi untuk dinding dan pondasi	Btg	33,00	0,03	33,00	0,02	33,00	0,02	-	-	33,00	0,02	100,00
	SUB TOTAL PEKERJAAN DINDING			1,86		1,69		1,69		-		1,69	
IV	PEKERJAAN LANTAI												
1	Pek. Timbunan (Tanah yang di datangkan)	M3	8,93	0,01	8,93	0,01	8,93	0,01	-	-	8,93	0,01	100,00
	SUB TOTAL PEKERJAAN LANTAI			0,01		0,01		0,01		-		0,01	
	JUMLAH BOBOT			100,00		100,00		85,05		2,31		87,37	
Catatan:													
BOBOT REALISASI												:	87,37
BOBOT RENCANA												:	92,20
DEVIASI												:	-4,83



Tabel II-21 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MC-1 (%)	BOBOT ADD I (%)	BOBOT REALISASI ADD I (%)	BOBOT SISA (%)	Minggu Ke											FFESTASI	KET		
						1					6		8							
						BULAN KE-1					BULAN KE-2		BULAN KE-3							
						21/10/2025 s/d 26/10/2025	27/10/2025 s/d 02/11/2025	03/11/2025 s/d 09/11/2025	10/11/2025 s/d 16/11/2025	17/11/2025 s/d 23/11/2025	24/11/2025 s/d 30/11/2025	01/12/2025 s/d 07/12/2025	08/12/2025 s/d 14/12/2025	15/12/2025 s/d 21/12/2025	22/12/2025 s/d 28/12/2025	29/12/2025 s/d 31/12/2025				
A	PEKERJAAN JALAN																100%			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,11	0,10	0,01	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02				
II.	PEKERJAAN PERKERASAN BETON	8,76	8,19	3,01	5,18				1,10	1,10	0,86	0,86	1,30	1,30		1,30				
B	PEKERJAAN DRAINASE																			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,23	0,21	0,01	0,20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05				
II.	PEKERJAAN SALURAN	88,16	89,00	33,35	55,65			6,02	6,02	15,22	9,27	9,27	12,00	18,65	18,65	6,35	50%			
C	PEKERJAAN REHAP RUMAH (11 UNIT)																			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	REALISASI KONTRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	PEKERJAAN PONDASI	0,86	0,78	0,78	-			0,17	0,17	0,17			0,09	0,09	0,09	0,09				
III.	PEKERJAAN DINDING	1,86	1,69	1,35	0,34						0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09				
IV.	PEKERJAAN LANTAI	0,01	0,01	0,01	0,01				0,01				0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		100,00	100,00	38,53	61,47															
RENCANA KEMAJUAN MC-1		RENCANA PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83	12,18	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11				
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25	39,43	51,55	63,66	75,77	87,89	100,00				
REALISASI KEMAJUAN MC-1		REALISASI PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83	7,95	7,17								
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25	35,20	42,37								
RENCANA KEMAJUAN ADD - I		RENCANA PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83	7,95	7,17	13,46	20,11	20,11	7,80				
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25	35,20	42,37	51,99	72,09	92,20	100,00				
REALISASI KEMAJUAN ADD - I		RENCANA PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83	7,95	7,17	6,35	40,17	2,31					
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25	35,20	42,37	44,88	85,05	87,37					
		DEVIASI CEPAT/LAMBAT											-7,10	12,96	-4,83					



Pek. Bangunan Rumah*



Pek. Bangunan Rumah*



Pek. Bangunan Rumah*



Pek. Drainase*



Pek. Drainase*



Pek. Drainase*



Pek. Jalan Rabat Beton*



Pek. Jalan Rabat Beton*



Pek. Jalan Rabat Beton*

Gambar II-9 : Dokumentasi Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah

Tabel II-22 Kendala Permasalahan dan Tindak Lanjut Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	KENDALA PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	STATUS (CLOSE/ OPEN)	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL)
1	Banyak obstacle pada lokasi galian drainase pada ruas 31 seperti pipa PDAM, tiang listrik dan pohon pelindung	Berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait untuk dilakukan relokasi dan pendampingan pekerjaan galian untuk drainase	Close	
2	Cuaca Hujan dilokasi Pekerjaan Dengan Itensitas Tinggi Dalam Minggu Ini	Pekerja Menggunakan jas hujan dan Untuk galian Saluran Drainase yang Tergenang Menggunakan Pompa Air	Close	



II.1.4.2 Review DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Pemerintah telah menyelaraskan target dari Tujuan Ke-6 Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, khususnya pada target 6.2 yang menyatakan "Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan setara untuk semua serta mengakhiri buang air besar sembarangan, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan, anak perempuan, dan mereka yang berada dalam situasi rentan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mengamanatkan memastikan layanan sanitasi aman dan inklusif, terutama di kawasan kumuh dan pedesaan, Penanganan BABS (Buang Air Besar Sembarangan), dan Pengembangan sistem air limbah domestik terkelola (off-site/on-site) dengan target akses sanitasi aman minimal 30% penduduk pada 2029 (sebagai tahap awal untuk mencapai 70% pada 2045 sesuai RPJPN) dan penurunan kawasan kumuh melalui perbaikan infrastruktur dasar termasuk sanitasi.

Dalam upaya mencapai target RPJMN tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur sanitasi dalam rangka pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik bagi 1,6 Juta Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2025.

Data BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa akses sanitasi layak Indonesia telah mencapai angka 82.36% (termasuk didalamnya 10.21% akses sanitasi aman). Berdasarkan data tersebut, masih terdapat kesenjangan akses sebesar 7.64% untuk akses sanitasi layak (termasuk 4.79% akses sanitasi aman) untuk pencapaian akses sanitasi. Di sisi lain cakupan infrastruktur air limbah domestik juga masih belum mencukupi untuk menyediakan akses bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan percepatan pemenuhan akses sanitasi layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal memerlukan intervensi Pemerintah dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi seluruh individu/masyarakat khususnya di daerah rawan sanitasi sesuai dengan Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sebagai dasar teknis pelaksanaan pemenuhan akses sanitasi layak, merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dimana Air Limbah Domestik (ALD) adalah air sisa dari suatu hasil kegiatan yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang



berhubungan dengan pemakaian air yang terdiri atas air limbah kakus (black water); dan air limbah non kakus (grey water).

Penanganan sanitasi rumah meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah ALD di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja. SPALD-S terdiri atas:

1. Skala individual diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal; dan
2. Skala komunal diperuntukkan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan dan/atau Mandi Cuci Kakus (MCK).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang diatur oleh UU No.59/2024, ditetapkan target sanitasi aman bagi minimal 70 % rumah tangga pada tahun 2045, serta akses air minum perpipaan kota 100 % pada tahun yang sama. Untuk fase awal (RPJMN 2025–2029), target pencapaian sanitasi aman sebesar 30 % telah dirancang sebagai fondasi menuju target RPJPN.

Pada periode RPJMN 2025–2029, prioritas sanitasi meliputi penanganan BABS, air limbah, dan sistem persampahan, serta menjadi bagian dari upaya penanggulangan stunting dan peningkatan IPM. Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, diperlukan upaya Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh yang terencana, terpadu, dan sistematis. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh khususnya pada kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 agar dapat tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu didukung dengan kegiatan Perencanaan dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Provinsi Sumatera Barat ini dan diharapkan juga perencanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk berikutnya dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fisik.

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyusun perencanaan detail pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Provinsi Sumatera Barat, sehingga tersedia dokumen rencana teknis yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas sanitasi rumah.



Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan berkualitas pada ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, agar dapat memenuhi standar pelayanan minimum, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan. Selain itu, dokumen perencanaan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai rencana dengan standar dan prosedur yang tercantum dalam spesifikasi (tepat mutu), tepat biaya, dan tepat waktu. Pada akhirnya, hasil pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, sehingga pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan aset menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Sasaran dari kegiatan perencanaan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis peningkatan kualitas sanitasi rumah yang meliputi data kondisi eksisting, konsep penanganan, gambar rencana (Detail Engineering Design/DED), spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu

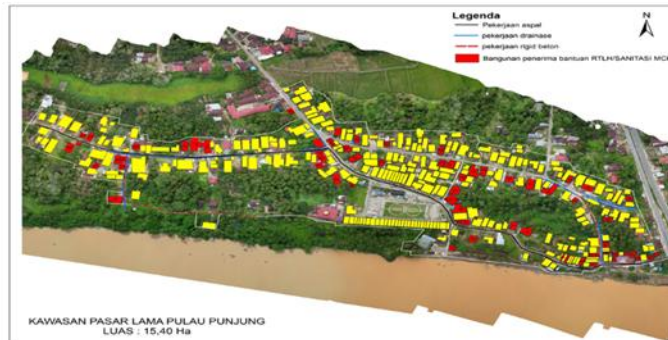
Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan peningkatan kualitas sanitasi rumah ini terletak di Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :

DIPA APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-146.03.1.691438/2025 tanggal 02 Desember 2024. Total perkiraan pagu adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

DATA UMUM	
Luasan Kumuh	15,64 Ha
Skor Kumuh	60 (Kumuh Berat)
Pekerjaan Bangunan Rumah	54 Unit
Pekerjaan Jalan Lingkungan	1.042 m
Pekerjaan Drainase	674 m
Pekerjaan Pengelolaan Persampahan	-
Pekerjaan Ruang Terbuka	-
Pekerjaan Penyediaan Air Minum	334 SR
Pekerjaan Sarana Proteksi Kebakaran	-
Konsultan Spv/MK	PT. DUTA BHUANA JAYA
Tgl Kontrak	03 November 2025
Nilai Kontrak/ Nilai Add	Rp. 366.581.700,00 / Rp. 246.713.000,00
Kontraktor Pelaksana	PT. ADINDA MARIA PARSAKTIAN ABADI
Tgl Kontrak	13 Oktober 2025
Nilai Kontrak/ Nilai Add	Rp. 3.946.916.700,00 / Rp. 4.333.714.500,00

RENCANA
98,64 %REALISASI
61,17 %DEVIASI
-34,47%

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan	80 Hari Kalender
Waktu Terpakai	77 Hari Kalender
Sisa Waktu	3 Hari Kalender

RENCANA SERAH TERIMA

PHO	31 Desember 2025
FHO	28 Juni 2026

PROGRES KEUANGAN SUPERVISI

Rencana	70 %
Realisasi	60 %

PROGRES KEUANGAN FISIK

Rencana	70 %
Realisasi	60%

Gambar II-10 : Profil Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya



Tabel II-23 Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN		Kemajuan Pekerjaan (%)		Realisasi S/d Minggu Ini		KET.
		Menurut MC-0	Menurut Add-1	Minggu Lalu	Minggu Ini	Bobot %	Persentase Selesai	
I	PEKERJAAN DRAINASE	24,06	21,77	17,80	0,66	18,45	84,76	
A	Pekerjaan Pendahuluan	0,99	1,42	1,27	-	1,27	89,16	
B	Pekerjaan Saluran	20,68	19,33	15,91	0,66	16,57	85,73	
C	Pemasangan Plat Duiker	2,40	1,03	0,62	-	0,62	60,21	
II	PEKERJAAN JALAN RIGID BETON	9,44	5,61	5,34	-	5,34	95,28	
A	Pekerjaan Persiapan	0,21	0,11	0,10	-	0,10	86,48	
B	Pekerjaan Perkerasan Beton	9,23	5,50	5,25	-	5,25	95,46	
III.	PEKERJAAN JALAN ASPAL	18,15	26,39	10,45	-	10,45	39,61	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,47	1,34	0,67	-	0,67	50,00	
B	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	0,07	0,01	-	-	-	-	
C	Pekerjaan Perkerasan Aspal	12,82	24,47	9,79	-	9,79	40,00	
D	Pekerjaan Struktur	3,79	0,58	-	-	-	-	
IV.	PEKERJAAN AIR BERSIH	23,59	23,70	14,64	0,30	14,94	63,04	
A	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	5,78	5,05	4,05	0,10	4,15	82,16	
B	Pekerjaan Galian Tanah Keras	1,62	1,82	1,08	0,20	1,29	70,69	
C	Pekerjaan Tanah Urugan	0,64	0,59	0,37	-	0,37	62,53	
D	Pekerjaan Sambungan Rumah	10,97	9,99	5,11	-	5,11	51,20	
E	Pengadaan Pompa	4,27	5,94	3,89	-	3,89	65,52	
F	Pekerjaan Lainnya	0,30	0,30	0,13	-	0,13	41,35	
V	PEKERJAAN PERBAIKAN RUMAH MBR	24,75	22,53	11,98	-	11,98	53,17	
A.	Pekerjaan Persiapan	0,07	0,07	0,07	-	0,07	100,00	
B	Pekerjaan Pas. Dinding Dan Plesteran	3,45	1,48	-	-	-	-	
C	Pekerjaan Lantai	0,44	0,03	-	-	-	-	
C	Pekerjaan Kuzen, Pintu dan Jendela	1,80	0,35	-	-	-	-	
E	Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup	11,81	14,95	9,82	-	9,82	65,63	
F	Pekerjaan Pengecatan	7,17	5,64	2,10	-	2,10	37,19	
	Jumlah	100,00	100,00	60,21	0,96	61,17		
	Bobot Rencana					98,64		
	Deviasi					(37,47)		



Tabel II-24 Kurva S Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)		Masa Waktu Pekerjaan 80 Hari (Delapan Puluh Hari Kalender)															
				Oktober			November				Desember								
		Menurut MC-0	Menurut Add-1	13/10/25	20/10/25	27/10/25	03/11/25	10/11/25	17/11/25	24/11/25	01/12/25		08/12/25	15/12/25	22/12/25	29/12/25			
				19/10/25	26/10/25	02/11/25	09/11/25	16/11/25	23/11/25	30/11/25	07/12/25		14/12/25	21/12/25	28/12/25	31/12/25			
I	PEKERJAAN DRAINASE																		100%
A	Pekerjaan Pendahuluan	0,99	1,42	0,03	0,09	0,09	0,35	0,31	0,02	0,02	0,02		0,59	0,59					
B	Pekerjaan Saluran	20,68	19,33			1,04	1,25	2,76	3,80	4,17	3,90		2,78	2,78	2,78	0,93	#		
C	Pemasangan Plat Duiker	2,40	1,03											0,45	0,45				
II	PEKERJAAN JALAN RIGID BETON																		
A	Pekerjaan Persiapan	0,21	0,11				0,18	0,01	0,01	0,01	0,01		0,03						80%
B	Pekerjaan Perkerasan Beton	9,23	5,50				0,52	1,62	1,18	1,18	1,18			1,88					
III.	PEKERJAAN JALAN ASPAL																		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,47	1,34												1,34				
B	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	0,07	0,01												0,01				
C	Pekerjaan Perkerasan Aspal	12,82	24,47												25,96				60%
D	Pekerjaan Struktur	3,79	0,58												0,58				
IV.	PEKERJAAN AIR BERSIH																		
A	Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE	5,78	5,05					1,46	1,81	1,81	0,35		1,72	1,72	0,00				
B	Pekerjaan Galian Tanah Keras	1,62	1,82					0,54	0,54	0,54			0,81	0,81	-				
C	Pekerjaan Tanah Urugan	0,64	0,59								0,32			0,30	0,30				40%
D	Pekerjaan Sambungan Rumah	10,97	9,99						2,74	2,74	2,74		2,01	4,02	4,02				
E	Pengadaan Pompa	4,27	5,94											3,92					
F	Pekerjaan Lainnya	0,30	0,30											0,27					
V	PEKERJAAN PERBAIKAN RUMAH MBR																		
A.	Pekerjaan Persiapan	0,07	0,07				0,07												20%
B	Pekerjaan Pas. Dinding Dan Plesteran	3,45	1,48				0,71	1,03	1,21	0,49			0,50	0,50	0,50				
C	Pekerjaan Lantai	0,44	0,03							0,15	0,29			0,03					
D	Pekerjaan Kuzen, Pintu dan Jendela	1,80	0,35								0,60			0,18	0,18				
E	Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup	11,81	14,95					1,78	3,08	3,42	3,53		1,61	3,21	3,21				
F	Pekerjaan Pengecatan	7,17	5,64							0,13	2,00		1,30	1,30	1,30	0,43			0%
TOTAL BOBOT (%)		100,00	100,00																
BOBOT RENCANA				0,03	0,09	2,79	4,21	6,75	6,75	9,45	14,63		11,34	21,97	40,64	1,36			
BOBOT RENCANA KOMULATIF				0,03	0,12	2,91	7,12	13,87	20,62	30,07	44,70		36,03	58,00	98,64	100,00			
BOBOT REALISASI				0,03	0,14	0,79	1,60	4,38	6,07	12,02	2,18		13,21	22,31	0,96				
BOBOT REALISASI KOMULATIF				0,03	0,18	0,96	2,57	6,94	13,01	25,03	27,22		37,90	60,21	61,17				
DEVIASI (±)				0,01	0,05	-2,95	-1,79	-6,93	-7,61	-5,04	-17,49		1,87	2,21	(37,47)				



Tabel II-25 Kurva Addendum 1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT MC-1 (%)	BOBOT ADD I (%)	BOBOT REALISASI ADD I (%)	BOBOT SISA (%)	Minggu Ke											FFESTASI	KET		
						1	2	3	4	5	R	6	7	R	8	9			10	11
						BULAN KE-1						BULAN KE-2			BULAN KE-3					
						21/10/2025 s/d 26/10/2025	27/10/2025 s/d 02/11/2025	03/11/2025 s/d 09/11/2025	10/11/2025 s/d 16/11/2025	17/11/2025 s/d 23/11/2025		24/11/2025 s/d 30/11/2025	01/12/2025 s/d 07/12/2025		08/12/2025 s/d 14/12/2025	15/12/2025 s/d 21/12/2025			22/12/2025 s/d 28/12/2025	29/12/2025 s/d 31/12/2025
A	PEKERJAAN JALAN										S			S					100%	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,11	0,10	0,01	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01	0,01		0,02	0,02	0,02	0,02		
II.	PEKERJAAN PERKERASAN BETON	8,76	8,19	3,01	5,18				1,10	1,10		0,86	0,86		1,30	1,30	1,30	1,30		
B	PEKERJAAN DRAINASE																			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,23	0,21	0,01	0,20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	H	0,03	0,03	H	0,03	0,05	0,05	0,05	50%	
II.	PEKERJAAN SALURAN	88,16	88,00	33,35	55,65			6,02	6,02	15,22		9,27	9,27		12,00	18,65	18,65	6,35		
C	PEKERJAAN REHAP RUMAH (11 UNIT)																			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	REALISASI KONTRAK	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
II	PEKERJAAN PONDASI	0,86	0,78	0,78	-			0,17	0,17	0,17	D			D	0,09	0,09	0,09	0,09	0%	
III	PEKERJAAN DINDING	1,86	1,69	1,35	0,34															
IV	PEKERJAAN LANTAI	0,01	0,01	0,01	0,01				0,01						0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00	100,00	38,53	61,47															
FENDAKEMAJUAN MC-1		RENCANA PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83	L	12,18	12,11	L	12,11	12,11	12,11	12,11		
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25		39,43	51,55		63,66	75,77	87,89	100,00		
REALISASI KEMAJUAN MC-1		REALISASI PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83		7,95	7,17							
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25		35,20	42,37							
RENCANA KEMAJUAN ADD - I		RENCANA PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83	E	7,95	7,17	E	13,46	20,11	20,11	7,80		
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25		35,20	42,37		51,99	72,09	92,20	100,00		
REALISASI KEMAJUAN ADD - I		RENCANA PERMINGGU				0,74	0,73	2,76	12,19	10,83		7,95	7,17		6,35	40,17	2,31			
		AKUMULASI				0,74	1,47	4,23	16,42	27,25		35,20	42,37		44,88	85,05	87,37			
		DEVIASI CEPATLAMBAT													-7,10	12,96	-4,83			



Pek. Rehab Rumah



Pek. Rehab Rumah



Pek. Drainase



Pek. Drainase



Material U-Ditch



Jalan Beton



Pek. Jalan Rabat Beton*



Pek. Jalan Rabat Beton*



Pek. Jalan Rabat Beton*

Gambar II-11 : Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Tabel II-26 Kendala/Permasalahan dan Tindak Lanjut Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Kendala Permasalahan	Tindak Lanjut	Status (Close/ Open)
1	Terhambatnya material karena cuaca dan jalan Putus Akibat bencana Sumbar	Stok Material dan pesanan harus full dengan jakwal maksimal	Open
2	Kurangnya tenaga kerja	- Di tambah tenaga kerja dan masing-masing item pekerjaan di bagi jumlah tenaga - Perbanyak tenaga kerja untuk pekerjaan Rumah MBR dan saluran air	Open

No	Kendala Permasalahan	Tindak Lanjut	Status (Close/ Open)
		bersih	
3	Kurang tenaga teknis yang mengatur pelaksanaan Pekerjaan	Rekrut tenaga teknis yang kompeten	Open
4	Tidak dapat jadwal pengaspalan jalan dari AMP	Koordinasi ke pihak AMP, mencari alternatif lain AMP	open

II.1.5 PERENCANAAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH

Perencanaan peningkatan kualitas sanitasi rumah di Provinsi Sumatera Barat terdapat di 2 (dua) daerah yaitu Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah penerima bantuan untuk sanitasi rumah berjumlah 106 unit dimana di Kota Padang berjumlah 52 unit dan Kabupaten Dharmasraya berjumlah 54 unit. Untuk lebih jelasnya perencanaan peningkatan kualitas sanitasi rumah di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada sub bab berikut.

II.1.5.1 Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo, Kota Padang

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan kawasan kumuh di Pasie Nan Tigo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sehingga kawasan tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori kumuh sedang dan menjadi permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Lokasi pekerjaan Penanganan Kawasan Kumuh ini terletak di Kawasan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan :

DIPA APBN Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-146.03.1.691438/2025 Revisi ke 04, Tanggal 15 Agustus 2025. Nilai pagu adalah sebesar Rp. 9.433.593.000,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

DATA UMUM

DATA KAWASAN

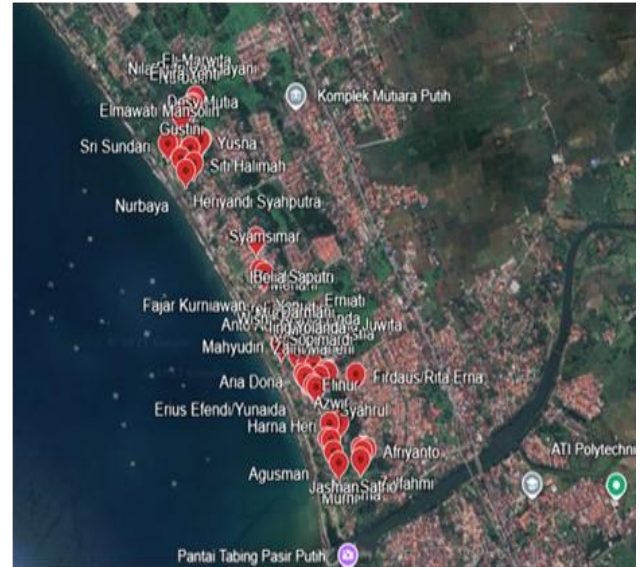
Jumlah Unit : 52 Unit

DATA KONSTRUKSI

1. Perusahaan : SWAKELOLA TIPE I
2. Nilai HPS : Rp. 754.466.000,00
3. Tanggal SPMK : 20 Oktober 2025
4. Waktu : 73 Hari Kalender

3 Orang Inspector Lapangan (Konsultan Individu)

1. Total Nilai Kontrak : Rp. 72.000.000,00
2. Tanggal SPK : 02 Oktober 2025
3. Waktu : 3 Bulan
4. Tipe Pengadaan : Pengadaan Langsung



PROGRESS FISIK

RENCANA	REALISASI	DEVIASI
97.263 %	98.347 %	1.084 %

PROGRESS KEUANGAN

RENCANA	REALISASI
100 %	100 %

Gambar II-12 : Profil Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang

Tabel II-27 Time Schedule Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang Tahun 2025

No	Uraian Pekerjaan	Bobot	Mgg-1	Mgg-2	Mgg-3	Mgg-4	Mgg-5	Mgg-6	Mgg-7	Mgg-8	Mgg-9	Mgg-10	Mgg-11
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,065	0,532	0,532									
II.	PEKERJAAN PONDASI	3,377		1,126	1,126	1,126							
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	2,884			0,961	0,961	0,961						
IV.	PEKERJAAN DINDING	24,058				8,019	8,019	8,019					
V.	PEKERJAAN LANTAI	3,790					1,263	1,263	1,263				
VI.	PEKERJAAN ATAP	11,211						3,737	3,737	3,737			
VII.	PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR	13,990							4,663	4,663	4,663		
VIII.	PEKERJAAN SEPTIK TANK	31,415								10,472	10,472	10,472	
IX.	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN	8,210									2,737	2,737	2,737
PELAKSANAAN 73 HARI KALENDE	BOBOT RENCANA	100,000	0,532	1,658	2,087	10,106	10,244	13,020	9,664	18,872	17,872	13,208	2,737
	BOBOT RENCANA KUMULATIF		0,532	2,191	4,278	14,384	24,628	37,647	47,311	66,183	84,055	97,263	100,000
	BOBOT REALISASI		2,675	5,724	9,573	10,677	18,678	7,680	6,051	9,001	16,612	11,677	
	BOBOT REALISASI KUMULATIF	-	2,675	8,398	17,971	28,648	47,326	55,006	61,057	70,058	86,670	98,347	
	DEVIASI												
	CEPAT		2,143	6,208	13,694	14,264	22,698	17,359	13,746	3,875	2,615	1,084	
	LAMBAT												

DATA PENERIMA BANTUAN

1. NAMA : ASREL
2. Alamat : PASIE SEBELAH

1. Desa/Kelurahan : PASIE NAN TIGO
2. Kecamatan : KOTO TANGAH
3. Kabupaten/Kota : PADANG
4. Jenis Bantuan : TIPE 1

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. TUKANG BILIK : 1 Orang
2. TUKANG SEPTIK TANK : 1 Orang
3. PEKERJA BILIK : 1 Orang
4. PEKERJA SEPTIK TANK : 1 Orang

ALAT KERJA

1. GERBAK
2. METERAN
3. CANGKUL
4. SEKOP
5. SENDOK SEMEN

DOKUMENTASI KEGIATAN



DATA PENERIMA BANTUAN

1. NAMA : ASREL
2. Alamat : PASIE SEBELAH

1. Desa/Kelurahan : PASIE NAN TIGO
2. Kecamatan : KOTO TANGAH
3. Kabupaten/Kota : PADANG
4. Jenis Bantuan : TIPE 1

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. TUKANG BILIK : 1 Orang
2. TUKANG SEPTIK TANK : 1 Orang
3. PEKERJA BILIK : 1 Orang
4. PEKERJA SEPTIK TANK : 1 Orang

ALAT KERJA

1. GERBAK
2. METERAN
3. CANGKUL
4. SEKOP
5. SENDOK SEMEN

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar II-13 : Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Sanitasi Rumah Kawasan Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang

II.1.5.2 Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung mempunyai luas area 15,40 Hektar. Terdapat enam pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Drainase, Jalan Lingkungan, Perbaikan Rumah MBR, dan Air Bersih.

DATA UMUM

DATA KAWASAN

Jumlah Unit : 54 Unit

DATA KONSTRUKSI

1. Perusahaan : SWAKELOLA TIPE I
2. Nilai HPS : Rp. 859.921.000,00
3. Tanggal SPK : 20 Oktober 2025
4. Waktu : 73 Hari Kalender
5. Tipe Pengadaan : Swakelola Tipe I

DATA SUPERVISI

1. 3 Orang Inspector Lapangan (Konsultan Individu)
2. Total Nilai Kontrak : Rp. 72.000.000,00
3. Tanggal SPK : 02 Oktober 2025
4. Waktu : 3 Bulan
5. Tipe Pengadaan : Pengadaan Langsung

DATA LOKASI

KOORDINAT : -0.9612737158839543, 101.50139516894195



PROGRESS FISIK

RENCANA

90.08 %

REALISASI

94.33 %

DEVIASI

4.25 %

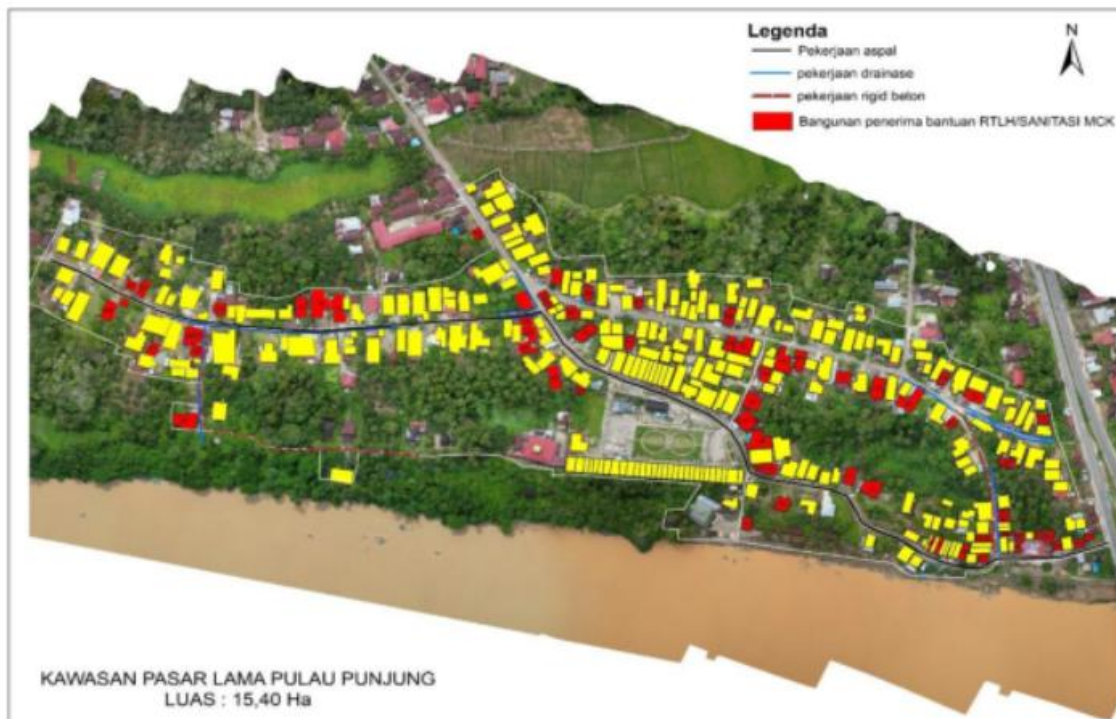
PROGRESS KEUANGAN

RENCANA

90%

REALISASI

100%





**Tabel II-28 Time Schedule Kegiatan Peningkatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh
Pasar Lama Pulau Punjung**

No	Uraian Pekerjaan	Bobot	Mgg-1	Mgg-2	Mgg-3	Mgg-4	Mgg-5	Mgg-6	Mgg-7	Mgg-8	Mgg-9	Mgg-10	Mgg-11	Prestasi
I.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN	0,39	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,53	0,27	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%
-	-	-	0,30	0,02	0,08	0,08	-	-	-	-	0,03	0,03	-	-
II.	PEKERJAAN PONDASI	5,40	-	1,82	1,82	1,76	-	-	-	-	-	-	-	80%
-	-	-	-	1,65	0,57	1,51	0,72	0,61	-	-	-	-	-	-
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	4,19	-	-	1,25	1,35	1,20	0,39	-	-	-	-	-	70%
-	-	-	-	1,25	0,17	0,94	0,22	0,94	-	-	-	-	-	-
IV.	PEKERJAAN DINDING	25,24	-	-	-	6,70	6,70	6,70	5,14	-	-	-	-	60%
-	-	-	-	0,32	0,22	2,68	2,70	5,88	5,35	3,38	-	-	-	-
V.	PEKERJAAN LANTAI	2,68	-	-	-	-	-	1,41	1,44	0,15	-	-	-	50%
-	-	-	-	0,00	-	-	-	1,10	0,37	1,82	0,47	-	-	-
VI.	PEKERJAAN ATAP	10,40	-	-	-	-	-	1,50	5,20	3,70	-	-	-	40%
-	-	-	-	-	-	1,12	1,77	2,13	0,78	1,20	0,76	1,04	-	-
VII.	PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR	12,53	-	-	-	-	-	-	4,75	4,75	3,03	-	-	30%
-	-	-	-	1,15	0,88	1,17	0,93	1,57	2,89	2,70	0,59	0,78	-	-
VIII.	PEKERJAAN SEPTIK TANK	28,70	-	-	-	-	-	-	-	2,58	10,44	10,44	5,23	20%
-	-	-	-	0,15	0,23	0,50	0,03	4,97	-	-	17,34	5,60	-	-
IX.	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN	9,23	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27	2,27	4,69	10%
-	-	-	-	0,12	0,18	0,27	0,13	0,13	0,40	-	2,40	3,17	-	-
X.	ALAT	0,71	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PELAKSANAAN	77 HARI KALENDE													
	BOBOT RENCANA	100,00	1,36	2,09	3,07	9,81	7,90	10,01	16,50	10,89	15,74	12,71	9,92	
	BOBOT RENCANA KUMULATIF	-	1,36	3,45	6,52	16,32	24,22	34,23	50,73	61,62	77,36	90,08	100,00	
	BOBOT REALISASI	-	1,48	4,67	2,33	8,48	7,58	16,47	9,79	9,09	22,92	11,81	-	
	BOBOT REALISASI KUMULATIF	-	1,48	6,15	8,48	16,95	24,54	41,01	50,80	59,89	82,52	94,33	-	
DEVIASI	CEPAT		0,12	2,70	1,96	0,63	0,31	6,78	0,06	1,73	5,16	4,25		
	LAMBAT													

DATA PENERIMA BANTUAN

1. NAMA : YUSNIMAR
2. Alamat : JORONG TABEK
1. Desa/Kelurahan : PULAU PUNJUNG
2. Kecamatan : PULAU PUNJUNG
3. Kabupaten/Kota : DHARMASRAYA
4. Jenis Bantuan : TIPE 1

TENAGA & ALAT KERJA

TENAGA KERJA

1. TUKANG BILIK : 1 Orang
2. TUKANG SEPTIK TANK : 1 Orang
3. PEKERJA BILIK : 1 Orang
4. PEKERJA SEPTIK TANK : 1 Orang

ALAT KERJA

1. GEROBAK
2. METERAN
3. CANGKUL
4. SEKOP
5. SENDOK SEMEN

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar II-14 : Dokumentasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam menjalankan program pengembangan perumahan sebagaimana di jabarkan pada Renstra Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, maka Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat perlu merumuskan Sasaran Program beserta indikator-indikator dan komponennya dari program pengembangan perumahan tersebut.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari



perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdiri dari 4 Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Perjanjian Kinerja dari DIPA Sekretariat Jenderal;
2. Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Kawasan Permukiman;
3. Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Perumahan Perkotaan;
4. Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan.

Dari 4 (empat) Perjanjian Kinerja (PK) tersebut mencakup 2 Sasaran Strategis yang didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja antara Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III yaitu sebagai berikut:

II.2.1 Perjanjian Kinerja dari DIPA Sekretariat Jenderal;

Perjanjian Kinerja dari DIPA Sekretariat Jenderal Awal di pada Tanggal 30 Agustus 2025 dengan Rp 575.135.000 dan perjanjian kinerja Revisi I dari DIPA Sekretariat Jenderal pada Tanggal 14 November 2025 dengan Rp 703.514.000.

1. Perjanjian Kinerja (Awal)


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ricky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 30 Agustus 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama

Ricky Hidayat

Gambar II-15 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Perkantoran	1 Layanan

KEGIATAN **PAGU APBN**

1 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Rp 575.135.000,00

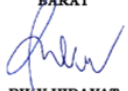
Padang, 30 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**



YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar II-16 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

2. Perjanjian Kinerja (Revisi I)

REVISI I


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 14 November 2025

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama



Riky Hidayat

Gambar II-17 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)



Laporan Kinerja TA 2025

SATKER PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROV. SUMBAR

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah Kawasan Permukiman	1 Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	68,04 Hektar

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 19.675.454.000,00

Padang, 3 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

Yenni Sofyan Mora
YENNI SOFYAN MORA

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT

Riky Hidayat
RIKY HIDAYAT

Gambar II-18 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

II.2.2 Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Kawasan Permukiman;

Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Awal di pada Tanggal 30 Agustus 2025 dengan Rp 575.135.000 dan perjanjian kinerja Revisi I dari DIPA Sekretariat Jenderal pada Tanggal 14 November 2025 dengan Rp 703.514.000.

1. Perjanjian Kinerja (Awal)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|

Padang, 30 Agustus 2025

Pihak Kedua
Yenni Sofyan Mora
Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama
Riky Hidayat
Riky Hidayat

Gambar II-19 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	43,63 Hektar

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 19.935.723.000,00

Padang, 22 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III



YENNI SOFYAN MORA

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT



RIKY HIDAYAT

Gambar II-20 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Direktorat Kawasan Permukiman antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

2. Perjanjian Kinerja (Revisi I)

REVISI I



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 03 Oktober 2025

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama



Riky Hidayat

Gambar II-21 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)

Laporan Kinerja
TA 2025SATKER PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROV. SUMBAR

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah Kawasan Permukiman	1 Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	68,04 Hektar

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp

19.675.454.000,00

Padang, 3 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**

RIKY HIDAYAT

Gambar II-22 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Sekretariat Jenderal antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

II.2.3 Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Perumahan Perkotaan;

1. Perjanjian Kinerja (Awal)

**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama

Riky Hidayat

Gambar II-23 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	270 Unit

KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN
Rp 6.391.670.000,00

Padang, 26 Agustus 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**



YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar II-24 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

2. Perjanjian Kinerja (Revisi I)



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama



Riky Hidayat

Gambar II-25 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI I

NO	SASARAN KEGIATAN	1	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	191 Unit

KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN
Rp 4.724.051.000,00

Padang, 18 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

RIKY HIDAYAT

Gambar II-26 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Perumahan Perkotaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

II.2.4 Perjanjian Kinerja dari DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan.

1. Perjanjian Kinerja (Awal)

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 27 Agustus 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama

Riky Hidayat

Gambar II-27 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III			
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	140 Unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	405 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 77.872.504.000,00

Padang, 27 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III	KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	
YENNI SOFYAN MORA	RIKY HIDAYAT

Gambar II-28 : Perjanjian Kinerja Awal DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

2. Perjanjian Kinerja (Revisi I)

REVISI I



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama



Riky Hidayat

Gambar II-29 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian I)



REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan 2 Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	1 Laporan 521 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan 2 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	140 Unit 1 Unit

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

PAGU APBN

Rp

85.492.615.000,00

Padang, 27 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III
YENNI GOFYAN MORAKEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT
RIKY HIDAYAT

Gambar II-30 : Perjanjian Kinerja Revisi I DIPA Direktorat Perumahan Perdesaan antara Kasatker dengan Kabalai (Bagian II)

II.2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan.

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Pengukuran kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB No. 12 Tahun 2015 yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II-29 Tabel Pengukuran Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30 – 50	Kurang, Perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat kurang, Perlu perbaikan yang sangat mendasar

II.2.6 Target Tahun Ini Menurut Rencana Strategis

Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, secara keseluruhan tidak terdapat target yang berbeda dengan target tahunan didalam Rencana Strategis untuk seluruh indikator kinerja sasaran strategis.

Tabel II-30 Target Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	2025-2029
Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	4
Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	5
Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	5
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum		
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman	Unit	600
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan Perkotaan	Unit	600
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan Perdesaan	Unit	400



SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	2025-2029
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Perumahan Perkotaan	Unit	84
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Perumahan Perdesaan	Unit	66
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	Laporan	1
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas		
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	8826
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	8943
Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	9273
Jumlah rumah khusus yang terbangun		
Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1
Jumlah rumah khusus yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	320
Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	320
Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	568
Jumlah rumah susun yang terbangun		
Jumlah rumah susun yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	44
Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	132
Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	88
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	68,04
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Perumahan Perkotaan	Hektar	15
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Perumahan Perdesaan	Hektar	15
Jumlah Layanan Umum Kawasan Permukiman	Layanan	4
Jumlah Layanan Umum Perumahan Perkotaan	Layanan	4
Jumlah Layanan Umum Perumahan Perdesaan	Layanan	4
Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	5
Jumlah Layanan Umum	Layanan	4
Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	80



II.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN

Pagu anggaran awal Satuan kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dialokasikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan terkait dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp 49.352.600.000,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Namun, sejalan dengan adanya penambahan anggaran maka terjadi perubahan pagu sebanyak 17 (tujuh belas) kali, sehingga pada DIPA Revisi Ke-17 pagu APBN menjadi Rp 116.393.404.000,- (Seratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).

Tabel II-31 Daftar DIPA dan pagu Anggaran di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025

NO	DIPA	Pagu Anggaran
1.	691384 (Sekretariat Jenderal)	741.375.000
2.	691438 (Ditjen Kawasan Permukiman)	19.675.454.000
3.	691492 (Ditjen Perumahan Perdesaan)	85.492.615.000
4.	691546 (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4.724.051.000
Jumlah		

Perubahan pagu APBN Satuan kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

II.3.1 DIPA Sekretariat Jenderal

Berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri 5 (lima) kali perubahan/revisi DIPA Anggaran sejak DIPA Anggaran awal pada tanggal 02 Desember 2024. Untuk lebih rincinya Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel II-32 Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
1.	Awal	02 Desember 2024	76.839.000		
2.	Revisi 01	11 Juni 2025	575.135.000	Revisi DJA	✦ Penambahan Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 76.839.000 menjadi 575.135.000 ✦ Penambahan Anggaran pada Rincian Output 01 EBA.994 : Layanan Perkantoran 76.839.000 menjadi 575.135.000
3.	Revisi 02	02 Juli 2025	575.135.000	Revisi Hal III DJPb	
4.	Revisi 03	10 Oktober 2025	575.135.000	Revisi Hal III DJPb	
5.	Revisi 04	13 November 2025	741.375.000	Revisi PISK Dit. PA	✦ Pengurangan Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 575.135.000 menjadi 741.375.000 ✦ Pengurangan Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 575.135.000 menjadi 741.375.000
6.	Revisi 05	01 Desember 2025	741.375.000	Revisi Pemutakhiran KPA	

Sumber : Hasil Rekapitulasi DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025

II.3.2 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri 7 (tujuh) kali perubahan/revisi DIPA Anggaran sejak DIPA Anggaran awal pada tanggal 02 Desember 2024. Untuk lebih rincinya Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-33 Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
1.	Awal	02 Desember 2024	8.248.120.000		
2.	Revisi 01	21 Mei 2025	1.054.120.000	Revisi DJA	✖ Pengurangan Anggaran pada Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebesar 330.00 unit 7.194.000.000
3.	Revisi 02	25 Juni 2025	1.141.244.000	Revisi DJA	✖ Penambahan Anggaran pada FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh 87.124.000
4.	Revisi 03	02 Juli 2025	1.141.244.000	Revisi Hal III DJPb	
5.	Revisi 04	15 Agustus 2025	19.935.723.000	Revisi DJA	✖ Pergantian RBB.001 pada kegiatan Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.054.120.000 diganti menjadi RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh sebesar 19.848.599.000
6.	Revisi 05	02 Oktober 2025	19.675.454.000	Revisi DJA	✖ Penambahan RBB.003 pada kegiatan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 374.277.000
7.	Revisi 06	10 Oktober 2025	19.675.454.000	Revisi Hal III DJPb	
8.	Revisi 07	22 November 2025	19.675.454.000	Revisi Pemutakhiran KPA	

Sumber : Hasil Rekapitulasi DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025

II.3.3 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri 4 (empat) kali perubahan/revisi DIPA Anggaran sejak DIPA Anggaran awal pada tanggal 02 Desember 2024. Untuk lebih rincinya Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-34 Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
1.	Awal	02 Desember 2024	75.069.377.000		
2.	Revisi 01	20 Mei 2025	61.262.135.000	Revisi DJA	✖ Pengurangan RBB.007 pada kegiatan Rumah Swadaya Perdesaan 13.807.242.000
3.	Revisi 02	03 Juli 2025	61.353.555.000	Revisi DJA	✖ Penambahan FAE.001 pada kegiatan Pemantauan 113.829.000
4.	Revisi 03	21 Agustus 2025	77.872.504.000	Revisi DJA	✖ Penambahan RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 8.891.149.000
5.	Revisi 04	24 Oktober 2025	85.492.615.000	Revisi DJA	✖ Penambahan FAE.005 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan 79.896.000 ✖ Penambahan RBB.005 Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan 4.900.000.000

Sumber : Hasil Rekapitulasi DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025

II.3.4 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Berdasarkan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri 6 (enam) kali perubahan/revisi DIPA Anggaran sejak DIPA Anggaran awal pada tanggal 02 Desember 2024. Untuk lebih rincinya Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-35 Kronologi Perubahan PK/Petikan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA.2025

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
1.	Awal	02 Desember 2024	5.358.190.000		
2.	Revisi 01	21 Mei 2025	20.000.000	Revisi DJA	✖ Pengurangan RBB.008 pada kegiatan Rumah



No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
					Swadaya Perkotaan sebesar 5.358.190.000
3.	Revisi 02	03 Juli 2025	105.125.000	Revisi DJA	✱ Penambahan FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar 85.125.000
4.	Revisi 03	09 Agustus 2025	527.104.000	Revisi DJA	✱ Penambahan FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 507.104.000
5.	Revisi 04	25 Agustus 2025	6.391.670.000	Revisi DJA	✱ Penambahan RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan menjadi 5.884.566.000
6.	Revisi 05	10 Oktober 2025	6.391.670.000	Revisi Hal III DJPb	
7.	Revisi 06	17 Oktober 2025	4.724.051.000	Revisi DJA	

Sumber : Hasil Rekapitulasi DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025



Bab III.

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan laporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Strategi utama yang harus dilakukan adalah penguatan komitmen. Penguatan komitmen merupakan keniscayaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan langkah awal dan kunci utama di dalam penerapan SAKIP. Penguatan komitmen dapat dilakukan mulai dari pucuk pimpinan, dalam hal ini Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pejabat perbendaharaan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, untuk mulai ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang merupakan variabel utama di dalam implementasi SAKIP.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana penerapan SAKIP tidak hanya menghasilkan berbagai macam dokumen, melainkan pemanfaatan dokumen tersebut di dalam proses manajemen kinerja.

Langkah yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan komitmen adalah Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat harus mulai memanfaatkan dokumen perjanjian kinerja untuk dijadikan dasar penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem reward and punishment. Pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan harus mulai dimonitor secara berkala, diukur, dievaluasi serta dijadikan dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Tolak ukur penerapan mekanisme tersebut adalah terdapat perbedaan antara pejabat/pegawai yang berhasil mencapai target kinerja dengan yang tidak mencapai target kinerja. Penerapan mekanisme ini



diharapkan akan mendorong para pejabat dan pegawai di lingkungan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk komit terhadap implementasi SAKIP dan fokus terhadap kinerjanya masing-masing. Oleh karena itu Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat harus mulai menerapkan pemberian tunjangan berbasis kinerja. Tunjangan kinerja yang diberikan harus didasarkan pada capaian indikator kinerja masing-masing individu pegawai. Penyusunan indikator kinerja individu dapat dilakukan melalui proses penurunan dan penyelarasan (*cascading*) kinerja pimpinan perangkat daerah ke level pejabat perbedaharaan sampai dengan staf pelaksana. Indikator kinerja individu kemudian dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja.

Strategi yang kedua adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya inefisiensi anggaran dikarenakan seluruh program/kegiatan akan memiliki keterkaitan atau merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis. Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara berkala. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap serapan anggaran saja, tetapi dilakukan pula terhadap capaian target-target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan. Hasil dari evaluasi tersebut dijadikan salah satu dasar perencanaan anggaran tahun selanjutnya. Dengan demikian penerapan anggaran berbasis kinerja mensyaratkan seluruh perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu sebelum mengajukan anggaran untuk tahun selanjutnya.

Strategi yang ketiga adalah pembinaan SAKIP. Pembinaan SAKIP dapat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis, khususnya terkait komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang memiliki bobot terbesar dalam implementasi SAKIP. Peran pimpinan perangkat daerah sangat penting dalam penerapan SAKIP. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pimpinan perangkat daerah mengenai SAKIP sehingga akan menambah komitmen untuk terus mengawal penerapannya di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

III.2 CAPAIAN KINERJA SATKER

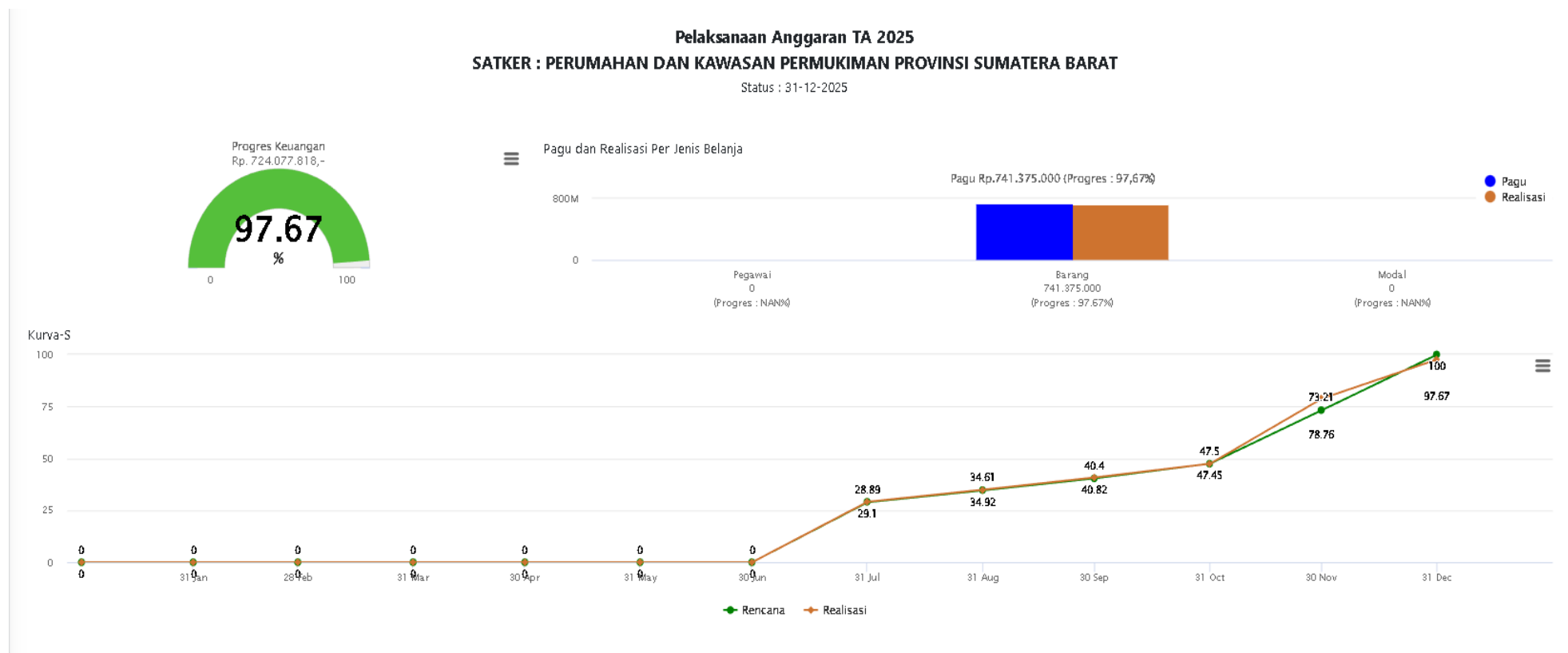
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu unit kerja atau pimpinan suatu organisasi dalam mempertanggung jawabkan dan menjelaskan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah



direncanakan dalam kurun waktu satu tahun. Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat selaku unit kerja eselon IV disampaikan ke unit organisasi eselon III yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan juga disampaikan ke unit organisasi eselon II yaitu Direktur – Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan lalu diteruskan ke unit organisasi eselon I untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Goals Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 adalah untuk membantu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III didalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai tujuan dan output diperlukan kebijakan yang mendukung program di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat berupa regulasi yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Perumahan Rumah Khusus, Rencana Aksi serta Dokumen Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang melampirkan matriks rencana dalam 5 tahun, terdiri dari 2 Program yang didukung dalam 8 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat di dalam Perjanjian Kinerja dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.



Gambar III-1 : Grafik Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Tabel III-1 Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Sekretariat Jenderal Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oktober	Nov	Des
1	Keperluan Perkantoran	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	AU	AU	140.452.000	140.452.000	19-05-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	36,56	45,40	57,20	69,00	100,00
2	Langganan Daya dan Jasa	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	58.000.000	58.000.000	19-05-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	19,07	27,43	36,35	46,79	100,00
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	108.235.000	108.235.000	19-05-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	52,66	56,52	64,38	72,24	100,00
4	Honor Operasional Satuan Kerja	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	434.688.000	434.688.000	19-05-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	53,55	62,18	70,81	79,44	100,00
TOTAL						741.375.000	741.375.000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.64	47.50	55.46	64.60	73.86	100.00

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

Tabel III-2 Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Sekretariat Jenderal Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan												Keterangan
											Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oktober	Nov	Des	
1	Keperluan Perkantoran	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	AU	AU	140.452.000	140.452.000	139.430.795	19-05-2025	31-12-2025	99,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	36,56	45,40	56,80	88,69	100,00	
2	Langganan Daya dan Jasa	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	58.000.000	58.000.000	43.147.771	19-05-2025	31-12-2025	74,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	19,07	27,43	29,52	42,72	100,00	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	108.235.000	108.235.000	106.811.252	19-05-2025	31-12-2025	98,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	52,66	56,52	65,11	86,66	100,00	
4	Honor Operasional Satuan Kerja	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	434.688.000	434.688.000	434.688.000	19-05-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	53,55	62,18	70,81	82,15	100,00	
TOTAL						741.375.000	741.375.000	724.077.818			97,67	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.64	47.50	55.46	64.09	80.96	100.00	

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-3 Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengada an	Metode	Tanggal	Tanggal	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu	Progres Fisik
								Mulai	Selesai	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
1	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal												
2	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
3	01.691384.WA.766 5.EBA.994.002.A	Keperluan Perkantoran	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	AU	AU	AU	19/05/2025	31/12/2025	140.452.000	140.452.000	139.430.795	99,27	100
4	01.691384.WA.766 5.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	AU	19/05/2025	31/12/2025	58.000.000	58.000.000	43.147.771	74,39	100
5	01.691384.WA.766 5.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	AU	19/05/2025	31/12/2025	108.235.000	108.235.000	106.811.252	98,68	100
6	01.691384.WA.766 5.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	AU	19/05/2025	31/12/2025	434.688.000	434.688.000	434.688.000	100	100
		TOTAL								741.375.000	741.375.000	724.077.818	97,67	100

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-4 Capaian Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUB KOMPONEN / ITEM	SUMBER DAMA	PAGU(Rp)	BLOKIR(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691384	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		741.375.000		724.077.818	97,67	17.297.182
MA	Program Dukungan Manajemen		741.375.000		724.077.818	97,67	17.297.182
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		741.375.000		724.077.818	97,67	17.297.182
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)		741.375.000		724.077.818	97,67	17.297.182
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran		741.375.000		724.077.818	97,67	17.297.182
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		741.375.000		724.077.818	97,67	17.297.182
7665.EBA.994.002.A	Keperluan Perkantoran		140.452.000		139.430.795	99,27	1.021.205
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		60.020.000		59.815.726	99,66	204.274
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		11.372.000		11.023.241	96,93	348.759
521211	Belanja Bahan		16.760.000		16.305.000	97,29	455.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		40.000.000		39.986.828	99,97	13.172
522141	Belanja Sewa		12.300.000		12.300.000	100,00	0
7665.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa		58.000.000		43.147.771	74,39	14.852.229
522111	Belanja Langganan Listrik		40.000.000		26.396.393	65,99	13.603.607
522113	Belanja Langganan Air		4.000.000		3.246.308	81,16	753.692
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		14.000.000		13.505.070	96,46	494.930
7665.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		108.235.000		106.811.252	98,68	1.423.748
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		38.520.000		38.492.600	99,93	27.400
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		69.715.000		68.318.652	98,00	1.396.348
7665.EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja		434.688.000		434.688.000	100,00	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		195.648.000		195.648.000	100,00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		239.040.000		239.040.000	100,00	0

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025





Tabel III-5 Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun , Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	87.124.000	87.124.000	19-05-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	58,68	70,16	81,64	100,00
2	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Barang	Pengadaan Langsung	200.000.000	200.000.000	19-08-2025	17-09-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Barang	Pengadaan Langsung	120.000.000	120.000.000	19-08-2025	17-09-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	754.117.000	754.117.000	15-08-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	7,55	30,20	52,85	100,00
5	Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Barang	Tender	1.199.122.000	1.199.122.000	31-10-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	52,23	100,00
6	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	353.842.000	353.842.000	15-08-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	7,49	36,61	65,73	100,00
7	Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Barang	Pengadaan Langsung	556.006.000	556.006.000	02-10-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	17,26	100,00
8	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	10 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 4	200.000.000	200.000.000	02-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
9	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	174.277.000	174.277.000	02-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	68,57	100,00
10	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	2 Paket	Barang	Tender	14.416.579.000	14.416.579.000	02-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	42,91	100,00
11	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	2 Paket	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	1.614.387.000	1.614.387.000	15-10-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	57,89	100,00
TOTAL						19.675.454.000	19.675.454.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	2,31	7,35	46,17	99,49

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-6 Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres fisik Per Bulan												Keterangan
											Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	87.124.000	87.124.000	83.675.510	19-05-2025	31-12-2025	96,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	58,68	58,68	58,68	100,00	
2	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Barang	Pengadaan Langsung	200.000.000	200.000.000	195.500.000	19-08-2025	17-09-2025	97,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Barang	Pengadaan Langsung	120.000.000	120.000.000	118.500.000	19-08-2025	17-09-2025	98,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	754.117.000	754.117.000	465.702.594	15-08-2025	31-12-2025	61,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	7,55	15,55	27,13	100,00	
5	Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Barang	Tender	1.199.122.000	1.199.122.000	462.307.667	31-10-2025	31-12-2025	38,55	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	
6	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	353.842.000	353.842.000	234.777.270	15-08-2025	31-12-2025	66,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	4,65	18,03	100,00	
7	Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Barang	Pengadaan Langsung	556.006.000	556.006.000	144.000.000	02-10-2025	31-12-2025	25,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	100,00	
8	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	10 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	200.000.000	200.000.000	200.000.000	02-01-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	100,00	
9	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	174.277.000	174.277.000	89.071.120	02-01-2025	31-12-2025	51,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	11,42	100,00	
10	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	2 Paket	Barang	Tender	14.416.579.000	14.416.579.000	12.633.529.300	02-01-2025	31-12-2025	87,63	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	20,17	81,20	
11	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	2 Paket	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	1.614.387.000	1.614.387.000	1.614.365.875	15-10-2025	31-12-2025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	35,94	100,00	
TOTAL						19.675.454.000	19.675.454.000	16.241.429.336			82,55	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	2,26	2,73	21,82	85,08	

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-7 Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal	Tanggal	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu	Progres Fisik
								Mulai	Selesai	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
1	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman												
2	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
3	03.691438.IA.7659.FAE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	19/05/2025	31/12/2025	87.124.000	87.124.000	83.675.510	96,04	100
4	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman												
5	03.691438.IA.7659.RBB.003.101.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	10 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	Swakelola Tipe 4	02/01/2025	31/12/2025	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100
6	03.691438.IA.7659.RBB.003.102.A	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Jasa Lainnya	Swakelola	Swakelola Tipe 1	02/01/2025	31/12/2025	174.277.000	174.277.000	89.071.120	51,11	100
7	03.691438.IA.7659.RBB.005.100.A	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Jasa Konsultasi	Kontraktual	Pengadaan Langsung	19/08/2025	17/09/2025	200.000.000	200.000.000	195.500.000	97,75	100
8	03.691438.IA.7659.RBB.005.100.B	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Jasa Konsultasi	Kontraktual	Pengadaan Langsung	19/08/2025	17/09/2025	120.000.000	120.000.000	118.500.000	98,75	100
9														
10	.													
11	03.691438.IA.7659.RBB.005.102.A	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	2 Paket	Pekerjaan Konstruksi	Kontraktual	Tender	02/01/2025	31/12/2025	14.416.579.000	14.416.579.000	12.633.529.300	87,63	81,2
12	03.691438.IA.7659.RBB.005.102.B	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	2 Paket	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	Swakelola Tipe 1	15/10/2025	31/12/2025	1.614.387.000	1.614.387.000	1.614.365.875	100	100



No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal	Tanggal	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu	Progres Fisik
								Mulai	Selesai	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
13	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman												
14	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman												
15	03.691438.IA.7659.RBB.005.103.A	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	15/08/2025	31/12/2025	754.117.000	754.117.000	465.702.594	61,75	100
16	03.691438.IA.7659.RBB.005.103.B	Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Jasa Konsultasi	Kontraktual	Tender	31/10/2025	31/12/2025	1.199.122.000	1.199.122.000	462.307.667	38,55	81,2
17	03.691438.IA.7659.RBB.005.103.C	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	15/08/2025	31/12/2025	353.842.000	353.842.000	234.777.270	66,35	100
18	03.691438.IA.7659.RBB.005.103.D	Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Jasa Konsultasi	Kontraktual	Pengadaan Langsung	02/10/2025	31/12/2025	556.006.000	556.006.000	144.000.000	25,9	100
		TOTAL								19.675.454.000	19.675.454.000	16.241.429.336	82,55	85,08

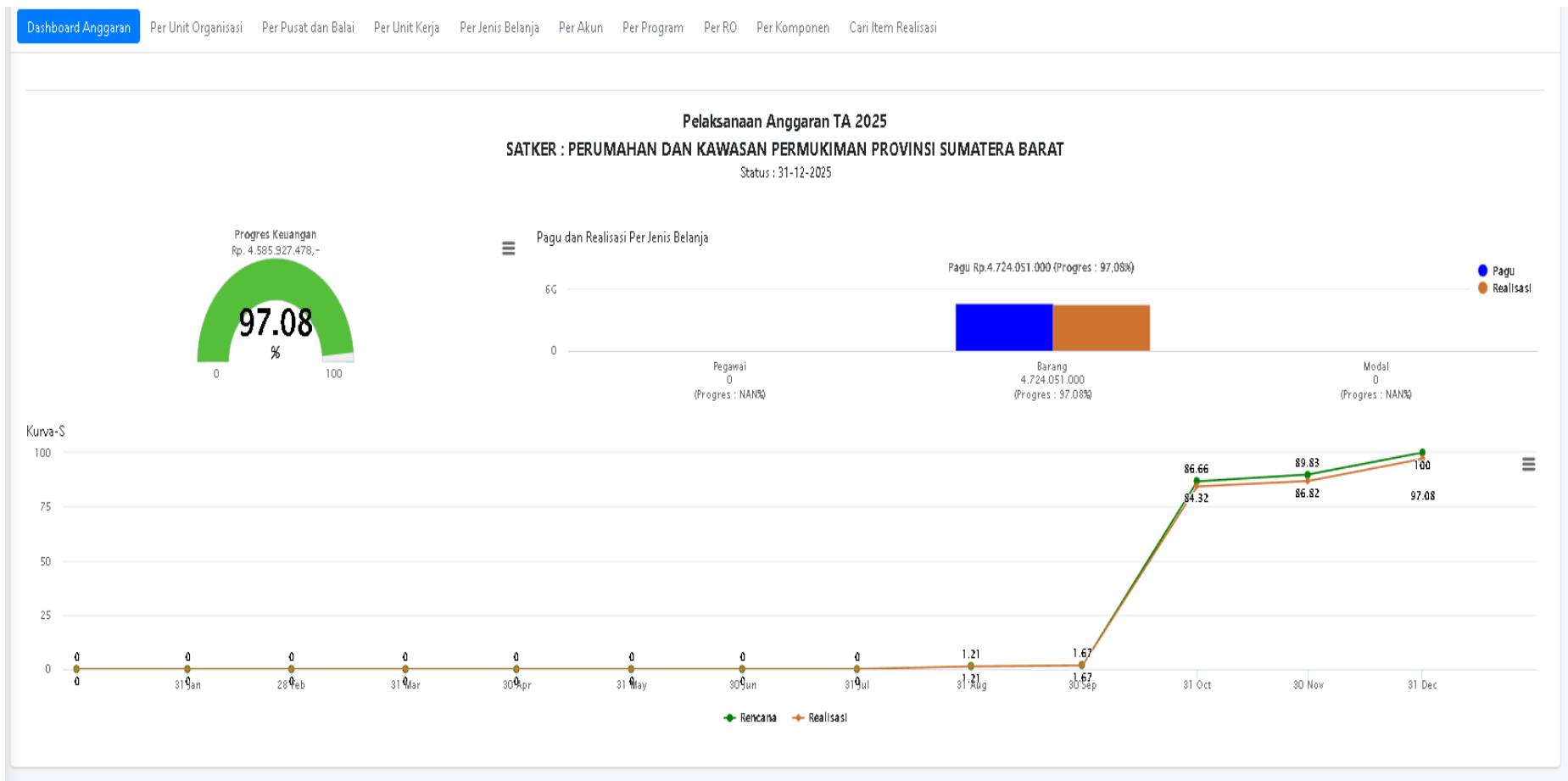
Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-8 Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	SUMBER DANA	PAGU(Rp)	BLOKIR(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691438	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		19.675.454.000		16.241.429.336	82,55	3.434.024.664
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		19.675.454.000		16.241.429.336	82,55	3.434.024.664
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		19.675.454.000		16.241.429.336	82,55	3.434.024.664
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		87.124.000		83.675.510	96,04	3.448.490
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		87.124.000		83.675.510	96,04	3.448.490
7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		87.124.000		83.675.510	96,04	3.448.490
7659.FAE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		87.124.000		83.675.510	96,04	3.448.490
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (unit, Hektar) [PN]		19.588.330.000		16.157.753.826	82,49	3.430.576.174
7659.RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		374.277.000		289.071.120	77,23	85.205.880
7659.RBB.003.101	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		200.000.000		200.000.000	100,00	0
7659.RBB.003.101.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		200.000.000		200.000.000	100,00	0
7659.RBB.003.102	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		174.277.000		89.071.120	51,11	85.205.880
7659.RBB.003.102.A	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		174.277.000		89.071.120	51,11	85.205.880
7659.RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh		19.214.053.000		15.868.682.706	82,59	3.345.370.294
7659.RBB.005.100	Perencanaan Permukiman Kumuh		320.000.000		314.000.000	98,13	6.000.000
7659.RBB.005.100.A	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh		200.000.000		195.500.000	97,75	4.500.000
7659.RBB.005.100.B	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah		120.000.000		118.500.000	98,75	1.500.000
7659.RBB.005.102	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh		16.030.966.000		14.247.895.175	88,88	1.783.070.825
7659.RBB.005.102.A	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh		14.416.579.000		12.633.529.300	87,63	1.783.049.700
7659.RBB.005.102.B	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah		1.614.387.000		1.614.365.875	100,00	21.125
7659.RBB.005.103	Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh		2.863.087.000		1.306.787.531	45,64	1.556.299.469
7659.RBB.005.103.A	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh		754.117.000		465.702.594	61,75	288.414.406
7659.RBB.005.103.B	Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh		1.199.122.000		462.307.667	38,55	736.814.333
7659.RBB.005.103.C	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah		353.842.000		234.777.270	66,35	119.064.730
7659.RBB.005.103.D	Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah		556.006.000		144.000.000	25,90	412.006.000

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Gambar III-3 : Grafik Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Tabel III-9 Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	507.104.000	507.104.000	19-05-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	15,31	28,73	37,59	100,00
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	191 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 4	3.820.000.000	3.820.000.000	25-08-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
3	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	396.947.000	396.947.000	01-09-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	32,32	58,71	100,00
TOTAL						4.724.051.000	4.724.051.000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.67	5.80	49.40	100.00

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

Tabel III-10 Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan												Keterangan
											Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	507.104.000	507.104.000	376.212.665	19-05-2025	31-12-2025	74,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	15,31	21,62	27,89	100,00	
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	191 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	3.820.000.000	3.820.000.000	3.820.000.000	25-08-2025	31-12-2025	100,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	98,95	
3	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	396.947.000	396.947.000	389.714.813	01-09-2025	31-12-2025	98,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	18,59	33,58	100,00	
TOTAL						4.724.051.000	4.724.051.000	4.585.927.478			97,08	99,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.67	3.88	26.84	99.15	

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-11 Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
1	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan												
2	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
3	05.691546.IA.7661.FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	AU	19/05/2025	31/12/2025	507.104.000	507.104.000	376.212.665	74,19	100
4	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman												
5	05.691546.IA.7661.RBB.008.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	191 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	Swakelola Tipe 4	25/08/2025	31/12/2025	3.820.000.000	3.820.000.000	3.820.000.000	100	98,95
6	05.691546.IA.7661.RBB.008.101.A	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Jasa Lainnya	Swakelola	Swakelola Tipe 1	01/09/2025	31/12/2025	396.947.000	396.947.000	389.714.813	98,18	100
		TOTAL								4.724.051.000	4.724.051.000	4.585.927.478	97,08	99,15

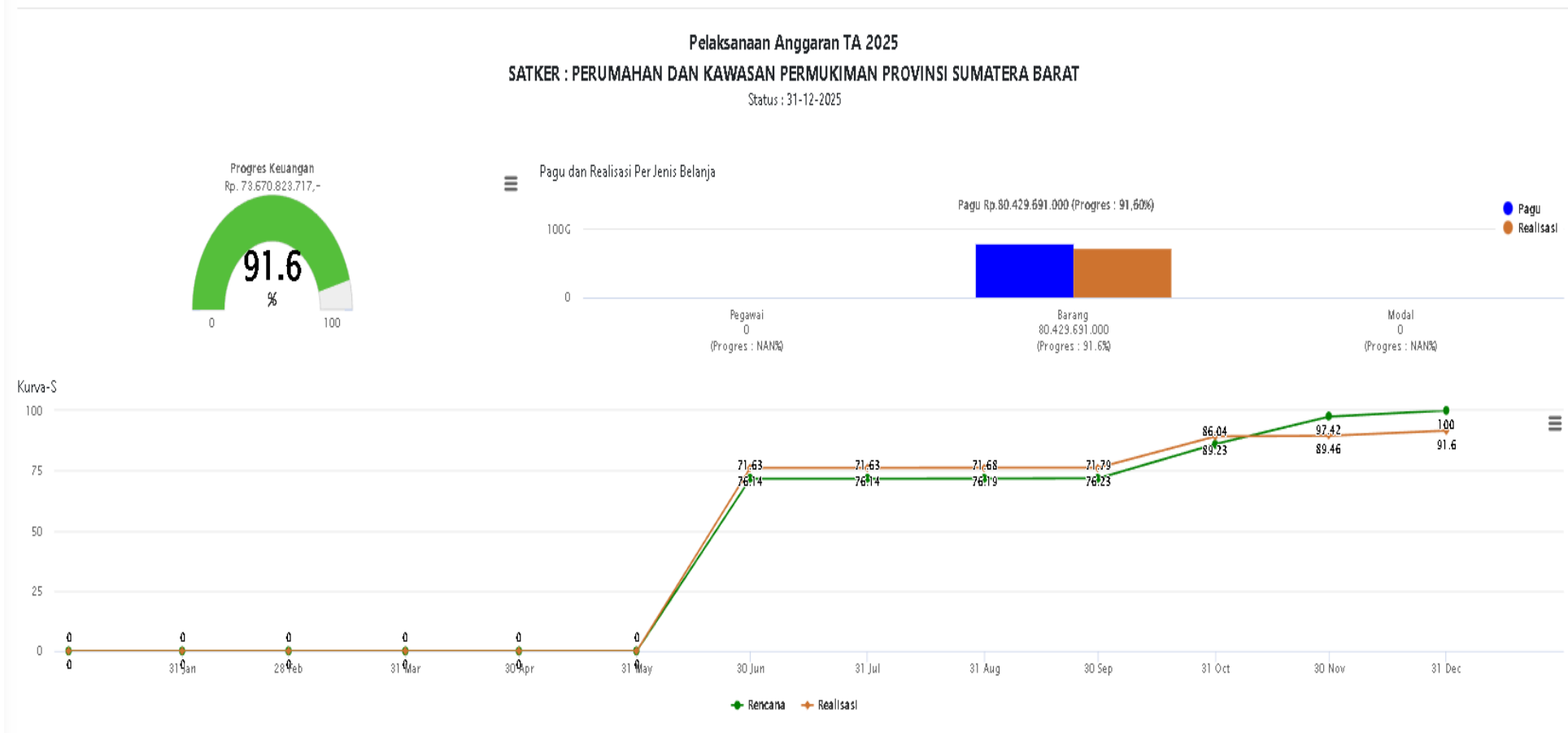
Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025



Tabel III-12 Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ IKRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	SUMBER DANA	PAGU(Rp)	BLOKIR(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691546	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		4.724.051.000		4.585.927.478	97,08	138.123.522
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.724.051.000		4.585.927.478	97,08	138.123.522
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		4.724.051.000		4.585.927.478	97,08	138.123.522
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan , Layanan)		507.104.000		376.212.665	74,19	130.891.335
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		507.104.000		376.212.665	74,19	130.891.335
7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		507.104.000		376.212.665	74,19	130.891.335
7661.FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		507.104.000		376.212.665	74,19	130.891.335
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]		4.216.947.000		4.209.714.813	99,83	7.232.187
7661.RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan		4.216.947.000		4.209.714.813	99,83	7.232.187
7661.RBB.008.100	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		3.820.000.000		3.820.000.000	100,00	0
7661.RBB.008.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		3.820.000.000		3.820.000.000	100,00	0
7661.RBB.008.101	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya		396.947.000		389.714.813	98,18	7.232.187
7661.RBB.008.101.A	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya		396.947.000		389.714.813	98,18	7.232.187

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Gambar III-4 : Grafik Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Tabel III-13 Capaian Kinerja Rencana Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	113.829.000	113.829.000	19-05- 2025	31-12- 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	51,04	72,61	85,96	100,00
2	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya	SUMATERA BARAT	140 Unit	Barang	Penunjukan Langsung	68.767.526.000	68.767.526.000	20-08- 2024	27-12- 2024	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	SUMATERA BARAT	140 Unit	AU	AU	262.924.000	262.924.000	21-08- 2025	31-12- 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	46,05	92,14	100,00
4	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	521 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 4	10.420.000.000	10.420.000.000	21-08- 2025	31-12- 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
5	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	948.440.000	948.440.000	01-09- 2025	31-12- 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,39	33,18	58,62	100,00
6	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola Tipe 1	79.896.000	79.896.000	24-10- 2025	31-12- 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66	100,00
7	Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulan Bencana	SUMATERA BARAT	123 Unit	Barang	Pengadaan Langsung	4.900.000.000	4.900.000.000	02-01- 2025	31-12- 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL						85.492.615.000	85.492.615.000			80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,48	80,60	81,07	87,64	100,00

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-14 Capaian Kinerja Progres Fisik Per Bulan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan												Keterangan
											Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	113.829.000	113.829.000	111.702.086	19-05-2025	31-12-2025	98,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	64,81	100,00	
2	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya	SUMATERA BARAT	140 Unit	Barang	Penunjukan Langsung	68.767.526.000	68.767.526.000	62.040.181.119	20-08-2024	27-12-2024	90,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Potensi tidak terserap Rusus sebesar 6.500.000.000, berdasarkan hasil Nottisi Audit Pembayaran oleh BPKP
3	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	SUMATERA BARAT	140 Unit	AU	AU	262.924.000	262.924.000	81.510.033	21-08-2025	31-12-2025	31,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	39,87	100,00	Diblokir sebesar Rp. 162.924.000
4	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	521 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	10.420.000.000	10.420.000.000	10.420.000.000	21-08-2025	31-12-2025	100,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	99,42	
5	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	948.440.000	948.440.000	945.157.579	01-09-2025	31-12-2025	99,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	40,72	100,00	
6	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	79.896.000	79.896.000	72.272.900	24-10-2025	31-12-2025	90,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	100,00	
7	Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulan Bencana	SUMATERA BARAT	123 Unit	Barang	Pengadaan Langsung	4.900.000.000	4.900.000.000	0	02-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Diblokir sebesar Rp. 4.900.000.000
TOTAL						85.492.615.000	85.492.615.000	73.670.823.717			86,17	94,20	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,91	84,28	94,20	

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-15 Capaian Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
1	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan												
2	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
3	04.691492.IA.7660.FAE.001.100.A	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	AU	19/05/2025	31/12/2025	113.829.000	113.829.000	111.702.086	98,13	100
4														
5	.													
6	04.691492.IA.7660.FAE.005.100.A	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	Swakelola	Swakelola Tipe 1	24/10/2025	31/12/2025	79.896.000	79.896.000	72.272.900	90,46	100
7	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan												
8	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman												
9	04.691492.IA.7660.RBB.002.101.A	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya	SUMATERA BARAT	140 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Kontraktual	Penunjukan Langsung	20/08/2024	27/12/2024	68.767.526.000	68.767.526.000	62.040.181.119	90,22	100



No.	Kode	Kegiatan / KRO / Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres Keu (%)	Progres Fisik (%)
10	04.691492.IA.7660.RBB.002.102.A	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	SUMATERA BARAT	140 Unit	AU	AU	AU	21/08/2025	31/12/2025	262.924.000	262.924.000	81.510.033	31	100
11														
12	.													
13	04.691492.IA.7660.RBB.005.100.A	Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulan Bencana	SUMATERA BARAT	123 Unit	Barang	Kontraktual	Pengadaan Langsung	02/01/2025	31/12/2025	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0	0
14	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan												
15	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman												
16	04.691492.IA.7660.RBB.007.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	521 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	Swakelola Tipe 4	21/08/2025	31/12/2025	10.420.000.000	10.420.000.000	10.420.000.000	100	99,42
17	04.691492.IA.7660.RBB.007.104.A	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Jasa Lainnya	Swakelola	Swakelola Tipe 1	01/09/2025	31/12/2025	948.440.000	948.440.000	945.157.579	99,65	100
		TOTAL								85.492.615.000	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	94,2

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-16 Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ IKRD/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	SUMBER DANA	PAGU(Rp)	BLOKIR(Rp)	REALISASI(Rp)	%KEU	SISA(Rp)
691492	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		85.492.615.000		73.670.823.717	86,17	11.821.791.283
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		85.492.615.000		73.670.823.717	86,17	11.821.791.283
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		85.492.615.000		73.670.823.717	86,17	11.821.791.283
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		193.725.000		183.974.986	94,97	9.750.014
7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		113.829.000		111.702.086	98,13	2.126.914
7660.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		113.829.000		111.702.086	98,13	2.126.914
7660.FAE.001.100.A	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat		113.829.000		111.702.086	98,13	2.126.914
7660.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		79.896.000		72.272.900	90,46	7.623.100
7660.FAE.005.100	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		79.896.000		72.272.900	90,46	7.623.100
7660.FAE.005.100.A	Pemantauan dan Evaluasi BSPS		79.896.000		72.272.900	90,46	7.623.100
7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (unit, Hektar) [PN]		85.298.890.000		73.486.848.731	86,15	11.812.041.269
7660.RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan		69.030.450.000		62.121.691.152	89,99	6.908.758.848
7660.RBB.002.101	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya		68.767.526.000		62.040.181.119	90,22	6.727.344.881
7660.RBB.002.101.A	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya		68.767.526.000		62.040.181.119	90,22	6.727.344.881
7660.RBB.002.102	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan		262.924.000		81.510.033	31,00	181.413.967
7660.RBB.002.102.A	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan		262.924.000		81.510.033	31,00	181.413.967
7660.RBB.005	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan		4.900.000.000		0	0,00	4.900.000.000
7660.RBB.005.100	Penyediaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana		4.900.000.000		0	0,00	4.900.000.000
7660.RBB.005.100.A	Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulan Bencana		4.900.000.000		0	0,00	4.900.000.000
7660.RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan		11.368.440.000		11.365.157.579	99,97	3.282.421
7660.RBB.007.100	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		10.420.000.000		10.420.000.000	100,00	0
7660.RBB.007.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		10.420.000.000		10.420.000.000	100,00	0
7660.RBB.007.104	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		948.440.000		945.157.579	99,65	3.282.421
7660.RBB.007.104.A	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		948.440.000		945.157.579	99,65	3.282.421

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

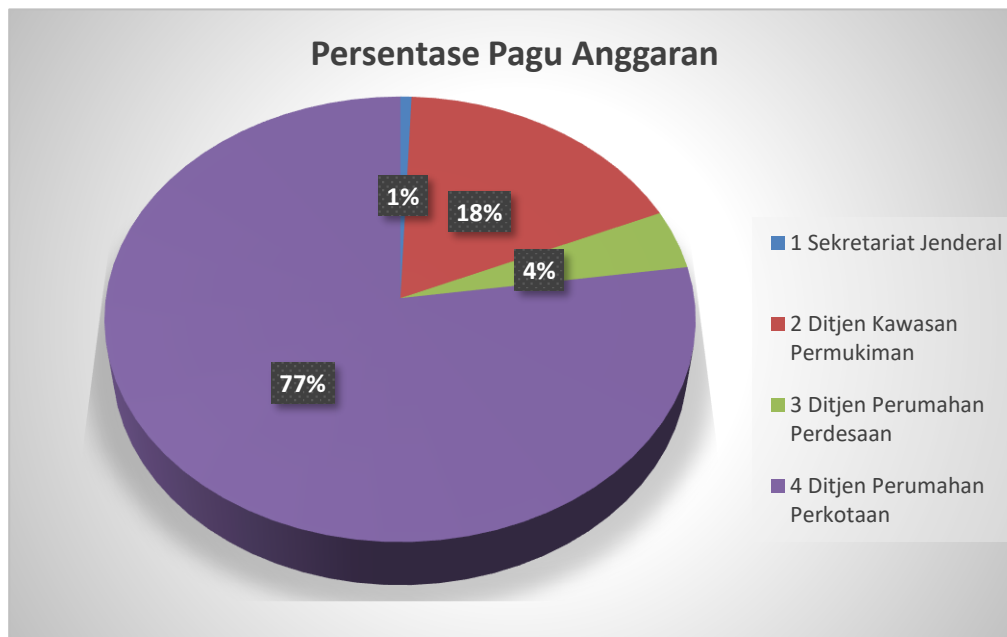


Tabel III-17 Rekapitulasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	DIPA Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	BLOKIR (Rp)	Sisa
1	Sekretariat Jenderal	Rp 741.375.000	Rp 724.077.818	97,67		Rp 17.297.182
2	Ditjen Kawasan Permukiman	Rp 19.675.454.000	Rp 16.241.429.336	82,55		Rp 3.434.024.664
3	Ditjen Perumahan Perkotaan	Rp 4.724.051.000	Rp 4.585.927.478	97,08		Rp 138.123.522
4	Ditjen Perumahan Perdesaan	Rp 85.492.615.000	Rp 73.670.823.717	86,17	11.821.791.283	Rp 3.589.445.368
Jumlah		Rp 110.633.495.000	Rp 95.222.258.349	86,07	11.821.791.283	Rp 7.178.890.736

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya. Realisasi Pelaksanaan Anggaran 4 (empat) sumber DIPA Anggaran di Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran Rp 110.633.495.000,- dengan realisasi 95.222.258.349,-.



Gambar III-5 : Grafik Persentase Pagu Anggaran di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan pagu anggaran Rp 85.492.615.000, dana anggaran di blokir Rp 11.821.791.283 dari sumber anggaran DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan

Diblokir sebesar Rp. 162.924.000 pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulangan Bencana Diblokir sebesar Rp. 4.900.000.000

Progres Fisik



Tabel III-18 Prognosis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output (RO) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
1	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	113.829.000	113.829.000	111.702.086	98,13	100	113.829.000	100	
2	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya	SUMATERA BARAT	140 Unit	Barang	Penunjukan Langsung	68.767.526.000	68.767.526.000	62.040.181.119	90,22	100	62.267.526.000	90,55	Potensi tidak terserap sebesar 6,5 M, berdasarkan hasil Notisi Audit Pembayaran oleh BPKP.
3	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	SUMATERA BARAT	140 Unit	AU	AU	262.924.000	262.924.000	81.510.033	31	100	100.000.000	38,03	Diblokir sebesar Rp. 162.924.000
4	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	521 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	10.420.000.000	10.420.000.000	10.420.000.000	100	99,42	10.420.000.000	100	
5	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	948.440.000	948.440.000	945.157.579	99,65	100	948.440.000	100	
6	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	79.896.000	79.896.000	72.272.900	90,46	100	79.896.000	100	
7	Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulan Bencana	SUMATERA BARAT	123 Unit	Barang	Pengadaan Langsung	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0	0	0	0	Diblokir sebesar Rp. 4.900.000.000
TOTAL						85.492.615.000	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	94,2	73.929.691.000		

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

III.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Adapun perbandingan Target dan Realisasi Kinerja di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel III-19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Unit Kerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1	Tingkat Layanan Perkantoran	Sekretariat Jenderal	1 Layanan	1 Layanan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah Kawasan Permukiman	1	Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	10 Unit	10 Unit
4	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	68,04 Hektar	68,04 Hektar
5	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan
6	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	521 Unit	521 Unit
7	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	140 Unit	140 Unit
		2	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Unit	-
8	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan
9	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan		Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	270 Unit	270 Unit

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

III.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Realisasi Keuangan mencapai 86,07% dan realisasi fisik mencapai 94,60% itu artinya cukup berhasil dalam melaksanakan/menjalan tugas yang diemban.

Tabel III-20 Perbandingan Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Tahun 2025

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	Sekretariat Jenderal	741.375.000	724.077.818	97,67	100,00
2	Dirjen Kawasan Permukiman	19.675.454.000	16.241.429.336	82,55	85.05
3	Dirjen Perumahan Perkotaan	4.724.051.000	4.585.927.478	97,08	99.15
4	Dirjen Perumahan Perdesaan	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	94.20
Jumlah		110.633.495.000	95.222.258.349	86,07	94,60

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

Adapun penyebab keberhasilan kinerja yaitu diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

A. Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman dan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Meskipun indikator ini tidak digunakan untuk mengukur capaian kinerja, akan tetapi mendukung Renstra Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.

Tabel III-21 Realisasi Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Sasara Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
sekretariat jenderal				
Meningkatnya dukungan manajemen sekretariat jenderal	Tingkat Layanan Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	100
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas	1 Laporan	1 Laporan	100



Sasara Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
	dan Penanganan Kumuh			
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

Keluaran dari kegiatan ini menghasilkan Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman, capaian indikator kinerja Tahun 2025 memiliki sebanyak 4 (empat) rencana tercapai 100%. Berikut analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja, serta solusi :

1. Potensi :

- Penyusunan rangkaian program/kegiatan penyediaan perumahan di tingkat kabupaten/kota/provinsi yang diambil dari kegiatan identifikasi, formulasi dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.
- Adanya perencanaan alokasi anggaran kegiatan di kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat.
- Dilaksanakannya pemantauan kegiatan yang mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- Evaluasi rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.



2. Permasalahan dan Kendala :
 - a. Kegiatan lebih berorientasi pada hasil fisik, keuangan dan siklus program jangka pendek sehingga pendampingan monitoring kurang optimal.
 - b. Terlambatnya data/informasi yang diberikan mengenai progres fisik dan keuangan pada tiap PPK.
 - c. Kurangnya pemantauan dan pelaporan terutama yang berkaitan dengan konsistensi dan akurasi data.
3. Langkah Kebijakan :
 - a. Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait antara lain : Para PPK, Tim Kaur, dan para staf yang terkait.
 - b. Melaksanakan update rutin untuk input di E-monitoring.
 - c. Pemantauan melalui kunjungan lapangan (field visits).
 - d. Pemantauan melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari laporan dari masing-masing penanggung jawab baik itu yang menangani program/kegiatan utama atau pendukung yang meliputi persentase target dan realisasi serapan dana serta prosentase target dan realisasi kemajuan kegiatan.

III.2.3 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, sebagai berikut:

A. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

Penyusunan Rencana Tahunan Penyediaan Perumahan, diharapkan dengan kegiatan ini tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Satker Penyediaan Perumahan yang selaras dengan kebijakan nasional, prioritas nasional, dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan infrastruktur dikawasan permukiman, antar kawasan, dan antar WPS.

B. Peningkatan Sinergitas Kelembagaan dalam Penyediaan Perumahan

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan Sinergitas Kelembagaan dalam Penyediaan Perumahan. Kegiatan yang dilakukan untuk maksimalisasi Sinergitas Kelembagaan dalam Penyediaan Perumahan.

C. Pelaksanaan Verifikasi Teknis

Pelaksanaan Verifikasi Teknis yang dilakukan sebelum pembangunan fisik kegiatan kawasan permukiman kumuh, sanitasi rumah, rumah swadaya, dan rumah khusus, yaitu menilai kelayakan lokasi siap bangun. Dengan terlaksananya Verifikasi Teknis



secara baik maka akan menambah keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik rumah khusus di lapangan dan adanya antisipasi hambatan atau permasalahan baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

Kegiatan Wasdal dilakukan untuk menunjang agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara tepat waktu, mutu, dan biaya.

E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan ini melihat langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk mengawal kegiatan agar tetap on the track dan dapat dijadikan langkah deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan.

Kegiatan ini berupa pengumpulan data realisasi kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja. Monev bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar kegiatan selanjutnya dapat lebih berdayaguna dan berhasil-guna. Monev lapangan dilaksanakan secara berkala.

III.3 PERBANDINGAN KINERJA SATKER

III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020– 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dan penurunan kegiatan dan untuk capaian target pembangunan tahun 2025 sudah cukup baik.

Berikut adalah perbandingan realisasi capaian kinerja Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 – 2025, dapat dilihat dibawah ini :



Tabel III-22 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2025

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Capaian Tahunan	Target Renstra	Capaian Tahunan	Target Renstra	Capaian Tahunan	Capaian Tahunan	Target Renstra	Target Renstra	Capaian Tahunan	Target Renstra	Capaian Tahunan	Target Renstra
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	7.410	7.720	2.048	2.050	3.588	7.410	6.042	3.660	4.284	7.410	718	
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	0	0	179	30	102	40	135	40	42	129	0	
4	Jumlah Rumah Susun yang terpelihara	12	0	0	30	8	30	8	0	0	12	0	
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	0	0	0	251	1	402	0	500	140	480	140	
6	Jumlah Rumah Khusus yang terpelihara	0	12	0	4	0	12	75	12	0	60	140	
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan fasilitas layanan bantuan PSU	0	0	58	500	50	687	893	875	451	451	0	0



No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Capaian Tahunan	Target Renstra	Capaian Tahunan	Target Renstra	Capaian Tahunan	Capaian Tahunan	Target Renstra	Target Renstra	Capaian Tahunan	Target Renstra	Capaian Tahunan	Target Renstra
8	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

III.3.2 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020– 2025

Kegiatan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat diukur melalui 2 (dua) capaian sasaran kegiatan yaitu meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan yang disediakan melalui belanja APBN.

Berikut adalah perbandingan realisasi penyerapan anggaran Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 – 2025, dapat dilihat dibawah ini :

Tabel III-23 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020 – 2025

Tahun Anggaran	Penyerapan Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Persentase
TA 2020	195.155.944.000	178.694.863.000	91,57
TA 2021	171.882.169.000	118.371.100.000	68,87
TA 2022	146.215.093.000	145.280.749.000	99,36
TA 2023	196.112.573.000	194.696.230.000	99,28
TA 2024	116.393.404.000	115.129.013.000	98,91
TA 2025	110.633.495.000	95.233.163.870	86,08

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

III.4 ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka merealisasikan komitmen yang telah ditetapkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III kepada Satker Penyediaan Perumahan Sumatera Barat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, alokasi anggaran sebesar Rp 110.633.495.000,- (Seratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Pengelolaan alokasi anggaran tersebut tersebar pada 3 (tiga) Unit Kerja yang berasal dari 4 (empat) sumber DIPA anggaran. Untuk realisasi anggaran di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III-24 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Perencanaan dan Pengendalian	1.449.432.000	1.295.668.079	89,39
a	Sekretariat Jenderal	741.375.000	724.077.818	97,67
b	Dirjen Kawasan Permukiman	87.124.000	83.675.510	96,04
c	Dirjen Perumahan Perkotaan	507.104.000	376.212.665	74,19
d	Dirjen Perumahan Perdesaan	113.829.000	111.702.086	98,13
2	Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	35.253.613.000	31.815.804.639	90,25
a	Dirjen Kawasan Permukiman	19.588.330.000	16.157.753.826	82,49
b	Dirjen Perumahan Perkotaan	4.216.947.000	4.209.714.813	99,83
c	Dirjen Perumahan Perdesaan	11.448.336.000	11.448.336.000	100,00
3	Rumah Susun dan Rumah Khusus	73.930.450.000	62.121.691.152	84,03
a	Dirjen Kawasan Permukiman	-	-	-
b	Dirjen Perumahan Perkotaan	-	-	-
c	Dirjen Perumahan Perdesaan	73.930.450.000	62.121.691.152	84,03
Jumlah		110.633.495.000	95.233.163.870	86,08

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 dengan alokasi Pagu anggaran awal sejumlah Rp 104.775.032.000,- (Seratus Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Namun, sejalan dengan adanya penambahan maupun pengurangan anggaran pada 4 (empat) sumber anggaran maka terjadi perubahan pagu sejalan waktu pagu APBN menjadi Rp 110.633.495.000,- (Seratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III-25 Selisih Pagu Awal dan Pagu Akhir Tahun 2025

No	Sumber Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)	Akhir
1	Sekretariat Jenderal	575.135.000	Penambahan 67.156.416.000	741.375.000
2	Dirjen Kawasan Permukiman	19.935.723.000	Pengurangan 260.269.000	19.675.454.000
3	Dirjen Perumahan Perkotaan	6.391.670.000	Pengurangan 1.667.619.000	4.724.051.000
4	Dirjen Perumahan Perdesaan	77.872.504.000	Penambahan 7.620.111.000	85.492.615.000
Jumlah		104.775.032.000		110.633.495.000

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

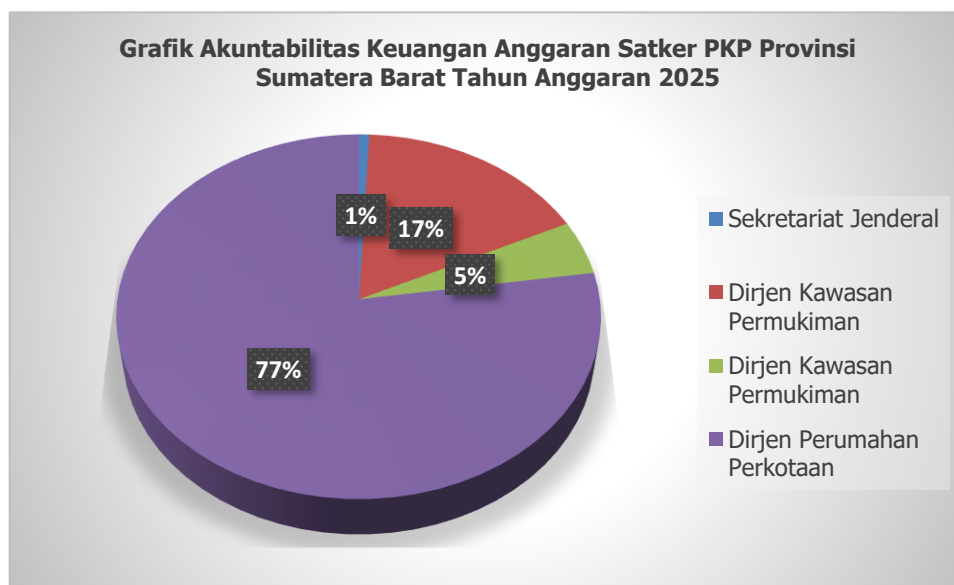
Tabel III-26 Perbandingan Rencana, Realisasi dan Prognosis Anggaran TA. 2025

No	Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	
a	Rencana	741.375.000,00
b	Realisasi	724.077.818,00
c	Prognosis	716.499.252,00
2	Dirjen Kawasan Permukiman	
a	Rencana	19.675.454.000,00
b	Realisasi	16.241.429.336,00
c	Prognosis	18.475.488.000,00
3	Dirjen Perumahan Perkotaan	
a	Rencana	741.375.000,00
b	Realisasi	724.077.818,00
c	Prognosis	716.499.152,00
4	Dirjen Perumahan Perdesaan	
a	Rencana	85.492.615.000,00
b	Realisasi	73.670.823.717,00
c	Prognosis	73.929.691.000,00

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat belum mencapai realisasi anggaran dengan target prognosis Per tanggal 31 Desember 2025, Rp 110.633.495.000,- (Seratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) Pagu akhir terealisasi sebesar Rp 95.222.258.349,- (Sembilan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan prosentase sebesar 86,07% terhadap alokasi DIPA. Di samping itu, progres fisik seluruh kegiatan di Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mencapai 86,07% (sumber rekapitulasi e-monitoring MyPKP), hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan belum terlaksana dengan baik.

Jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2025 dijabarkan melalui realisasi penyerapan anggaran dapat dilihat, sebagai berikut :



Gambar III-6 : Grafik Akuntabilitas Keuangan Anggaran Satker PKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025



Tabel III-27 Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Sekretariat Jenderal di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
1	Keperluan Perkantoran	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	AU	AU	140.452.000	140.452.000	139.430.795	99,27	100	130.000.000	92,56	
2	Langganan Daya dan Jasa	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	58.000.000	58.000.000	43.147.771	74,39	100	45.000.000	77,59	
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	108.235.000	108.235.000	106.811.252	98,68	100	106.811.252	98,68	
4	Honor Operasional Satuan Kerja	SUMATERA BARAT	1 Layanan	AU	AU	434.688.000	434.688.000	434.688.000	100	100	434.688.000	100	
TOTAL						741.375.000	741.375.000	724.077.818	97,67	100	716.499.252		

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

Tabel III-28 Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	87.124.000	87.124.000	83.675.510	96,04	100	87.124.000	100	
2	Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Barang	Pengadaan Langsung	200.000.000	200.000.000	195.500.000	97,75	100	195.500.000	97,75	Sisa lelang



No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
3	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Barang	Pengadaan Langsung	120.000.000	120.000.000	118.500.000	98,75	100	118.500.000	98,75	Sisa lelang
4	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	754.117.000	754.117.000	465.702.594	61,75	100	754.117.000	100	
5	Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Barang	Tender	1.199.122.000	1.199.122.000	462.307.667	38,55	81,2	1.082.074.000	90,24	Anggaran tidak terserap
6	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Dokumen	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	353.842.000	353.842.000	234.777.270	66,35	100	237.154.000	67,02	
7	Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Barang	Pengadaan Langsung	556.006.000	556.006.000	144.000.000	25,9	100	237.154.000	42,65	
8	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	10 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100	200.000.000	100	
9	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	174.277.000	174.277.000	89.071.120	51,11	100	174.277.000	100	
10	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SUMATERA BARAT	2 Paket	Barang	Tender	14.416.579.000	14.416.579.000	12.633.529.300	87,63	81,2	13.775.201.000	95,55	Sisa lelang
11	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	SUMATERA BARAT	2 Paket	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	1.614.387.000	1.614.387.000	1.614.365.875	100	100	1.614.387.000	100	
TOTAL						19.675.454.000	19.675.454.000	16.241.429.336	82,55	85,08	18.475.488.000		

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-29 Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	507.104.000	507.104.000	376.212.665	74,19	100	507.104.000	100	
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	191 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	3.820.000.000	3.820.000.000	3.820.000.000	100	98,95	3.820.000.000	100	
3	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	396.947.000	396.947.000	389.714.813	98,18	100	396.947.000	100	
TOTAL						4.724.051.000	4.724.051.000	4.585.927.478	97,08	99,15	4.724.051.000		

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

Tabel III-30 Capaian Kinerja Per Kegiatan (Output) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
1	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	1 Laporan	AU	AU	113.829.000	113.829.000	111.702.086	98,13	100	113.829.000	100	



No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Metode	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Prognosis		Keterangan
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Rp	%	
2	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya	SUMATERA BARAT	140 Unit	Barang	Penunjukan Langsung	68.767.526.000	68.767.526.000	62.040.181.119	90,22	100	62.267.526.000	90,55	Potensi tidak terserap sebesar 6.5 M, berdasarkan hasil Notisi Audit Pembayaran oleh BPKP.
3	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	SUMATERA BARAT	140 Unit	AU	AU	262.924.000	262.924.000	81.510.033	31	100	100.000.000	38,03	Diblokir sebesar Rp. 162.924.000
4	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	SUMATERA BARAT	521 Unit	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	10.420.000.000	10.420.000.000	10.420.000.000	100	99,42	10.420.000.000	100	
5	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	948.440.000	948.440.000	945.157.579	99,65	100	948.440.000	100	
6	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	SUMATERA BARAT	1 Laporan	Pekerjaan Konstruksi	Swakelola	79.896.000	79.896.000	72.272.900	90,46	100	79.896.000	100	
7	Pengadaan Panel Risha Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Penganggulan Bencana	SUMATERA BARAT	123 Unit	Barang	Pengadaan Langsung	4.900.000.000	4.900.000.000	0	0	0	0	0	Diblokir sebesar Rp. 4.900.000.000
TOTAL						85.492.615.000	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	94,2	73.929.691.000		

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Tabel III-31 Capaian Output Akuntabilitas di Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Output
1	Perencanaan dan Pengendalian	1.449.432.000	1.295.668.079	89,39	
a	Sekretariat Jenderal	741.375.000	724.077.818	97,67	1 Dokumen dan 3 Layanan
b	Dirjen Kawasan Permukiman	87.124.000	83.675.510	96,04	1 Laporan, dan 1 Layanan
c	Dirjen Perumahan Perkotaan	507.104.000	376.212.665	74,19	1 Laporan
d	Dirjen Perumahan Perdesaan	113.829.000	111.702.086	98,13	1 Laporan
2	Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	35.253.613.000	31.815.804.639	90,25	
a	Dirjen Kawasan Permukiman	19.588.330.000	16.157.753.826	82,49	4 Dokumen, 3 Laporan, 2 Paket dan 10 Unit
b	Dirjen Perumahan Perkotaan	4.216.947.000	4.209.714.813	99,83	1 Laporan dan 191 unit
c	Dirjen Perumahan Perdesaan	11.448.336.000	11.448.336.000	100,00	1 Laporan dan 521 Unit
3	Rumah Susun dan Rumah Khusus	73.930.450.000	62.121.691.152	84,03	
a	Dirjen Kawasan Permukiman	-	-	-	-
b	Dirjen Perumahan Perkotaan	-	-	-	-
c	Dirjen Perumahan Perdesaan	73.930.450.000	62.121.691.152	84,03	140 unit
Jumlah		110.633.495.000	95.233.163.870	86,08	

Sumber : Hasil Rekapitulasi Tahun 2025

Secara rinci akuntabilitas keuangan setiap unit kerja dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengendalian Penyediaan Perumahan

Akuntabilitas keuangan kegiatan ini dapat dicapai dengan baik, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.449.432.000,- (terbilang : satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 1.295.668.079 atau 89,39%, dengan capaian 1 dokumen dan 3 layanan dukungan manajemen.



Berdasarkan capaian kinerja realisasi keuangan, efektifitas pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Penyediaan Perumahan secara keseluruhan sudah di kelola secara Efisien dalam pengelolaan anggaran belanja, karena instansi telah menerapkan manajemen mutu dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

2. Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Akuntabilitas keuangan kegiatan ini dapat dicapai dengan baik, dari pagu anggaran sebesar Rp 35.253.613.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) Pagu akhir terealisasi sebesar Rp 31.815.804.639 95.222.258.349,- (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 90,25%, dengan capaian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 718 Unit dari target Perjanjian Kinerja sebanyak 722 (tidak memenuhi target), dan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Berdasarkan capaian kinerja realisasi keuangan, efektifitas pelaksanaan anggaran untuk Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara keseluruhan sudah di kelola cukup Efisien dalam pengelolaan anggaran belanja, karena instansi telah menerapkan manajemen mutu dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Rumah Susun dan Rumah Khusus

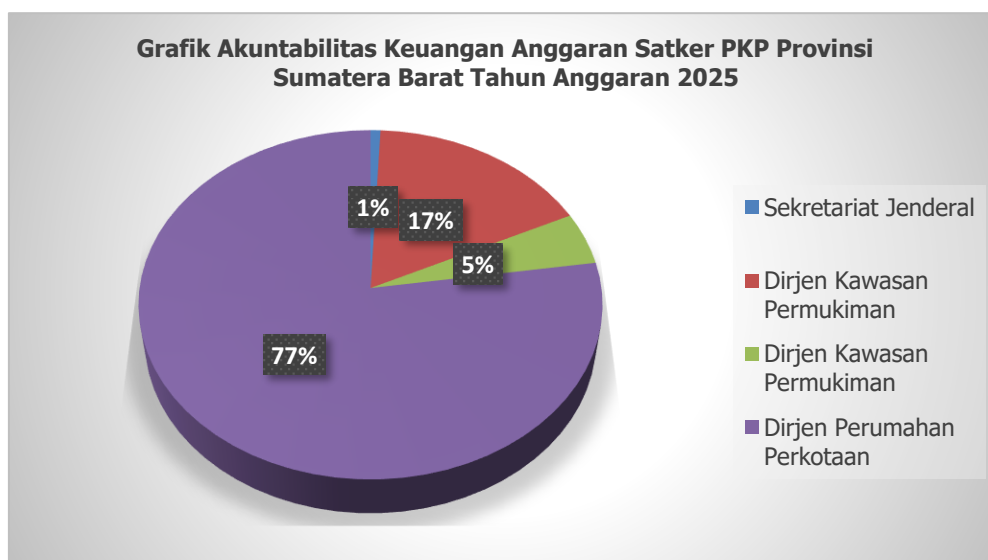
Akuntabilitas keuangan kegiatan ini dapat dicapai dengan cukup baik, dari pagu anggaran sebesar Rp 18.763.310.000,- (terbilang: delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp 18.649.368.000,- (terbilang : delapan belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau 99,39%.

Berdasarkan capaian kinerja realisasi keuangan, efektifitas pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan Rumah Susun & Rumah Khusus secara keseluruhan sudah di kelola secara Efisien dalam pengelolaan anggaran belanja.

Tabel III-32 Akuntabilitas Keuangan Anggaran Satker PKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Akuntabilitas Keuangan
1	Sekretariat Jenderal	741.375.000	724.077.818	97,67	0,76
2	Dirjen Kawasan Permukiman	19.675.454.000	16.241.429.336	82,55	17,06
3	Dirjen Perumahan Perkotaan	4.724.051.000	4.585.927.478	97,08	4,82
4	Dirjen Perumahan Perdesaan	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	77,37
Jumlah		110.633.495.000	95.222.258.349	86,07	100,00

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025



Gambar III-7 : Grafik Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Realisasi pelaksanaan anggaran umumnya tidak dapat mencapai 100%, namun hal tersebut sesuai dengan Rencana Kurva-S yang telah ditetapkan pada awal tahun.

III.5 REALISASI ANGGARAN TA 2025

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam PK revisi akhir tahun 2025 sebesar Rp 110.633.495.000 dipergunakan dalam rangka merealisasikan komitmen Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan.

Perbandingan pagu DIPA dan realisasi anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-33 Realisasi Anggaran Satker PKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025

No	Sumber Anggaran	Pagu (Rp)	Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Nilai Efisiensi (%)
			Realisasi (Rp)	%		
1	Sekretariat Jenderal	741.375.000	724.077.818	97,67	100	105,70
2	Dirjen Kawasan Permukiman	19.675.454.000	16.241.429.336	82,55	85,08	89,93
3	Dirjen Perumahan Perkotaan	4.724.051.000	4.585.927.478	97,08	99,15	104,80
4	Dirjen Perumahan Perdesaan	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	94,2	99,57
Jumlah		110.633.495.000	95.222.258.349	86,07	94,61	100,00

Sumber : Hasil Rekapitulasi MyPKP Tahun 2025

Pagu anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA 2025 berdasarkan data dari ieMonitoring terealisasi sebesar Rp 110.633.495.000 (86,07%). Secara umum nilai efisiensi anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA 2025 mencapai nilai 100%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa telah dilakukan efisiensi anggaran pada pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, yaitu berhasil mencapai realisasi fisik yang lebih besar dengan anggaran yang lebih sedikit.

III.6 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel III-34 Efisiensi SDM Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Pegawai						Rasio Penugasan
			ASN			Tenaga Pendukung		Jumlah	
			PNS	CPNS	PPPK	Tenaga Ahli	Outsourcing		
1.	Perencanaan dan Pengendalian	8	4	2	7	-	4	16	1,60
2.	Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	7	2	8	9	2	-	21	1,40
3.	Rumah Susun dan Rumah Khusus	2	2	-	2	-	-	4	0,40
Jumlah		17	8	10	18	2	4	42	3,40

Jika diasumsikan setiap kegiatan dikerjakan oleh 5 (lima) orang dalam satu tim maka rata-rata rasio penugasan yaitu 3 tugas tanggung jawab. Agar beban kerja lebih seimbang antar unit perlu dilakukan redistribusi jumlah pegawai atau penambahan jumlah pegawai berstatus ASN. Adapun permasalahan SDM lainnya adalah:

- Pegawai Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sebagian besar diperbantukan oleh Tenaga Ahli.
- Kurangnya Pegawai dengan status ASN untuk penempatan posisi pada jabatan teknis sebagai penanggung jawab kegiatan sesuai struktur organisasi
- Terdapat jumlah SDM dengan jumlah swakelola yang mengalami ketimpangan, maka menjadi tidak efektif dan efisien dalam beban penugasan.

A. Analisis Efisiensi Penilaian Kinerja Pegawai

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung kepada sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya organisasi



secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*non-human resources*). Dari pengelompokan sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor paling dominan. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam organisasi dengan masing - masing peran dan fungsinya tersendiri.

Keberhasilan organisasi mencapai tujuan dalam berbagai sarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan tepat.

1. Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Penilaian Kinerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil (ASN) berbunyi "Penilaian Kinerja ASN dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan". Dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja ASN yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat secara berkala diperlukan untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik.

Pentingnya kinerja sumber daya manusia dalam menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi, dalam menunjang pelaksanaan Visi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.



B. Analisis Efisiensi Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan terdapat rangkaian proses mulai dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan yang mana monitoring dan evaluasi berperan dalam setiap tahapannya.

Kementerian PUPR telah membangun sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan secara efektif. Dalam mewujudkan efektivitas, absolut, terkini, akuntabel. Seluruh kegiatan yang diemban oleh Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat perlu adanya alat bantu dalam proses pengerjaan kegiatan tersebut. Berikut adalah pemanfaatan aset serta aplikasi/website online yang digunakan untuk membuat (input), memperbaharui (updating), dan menghasilkan (outcome) laporan/informasi kegiatan yang dibutuhkan dan bisa digunakan untuk pertanggungjawaban anggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Aset Intrakomptabel Atau Aset Tetap

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pencapaian maksud dan tujuan Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yaitu dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak, dengan menggunakan hasil pengadaan yang telah dilakukan sejak tahun 2025 dimana barang-barang tersebut telah dicatat dalam pencatatatn BMN.

2. Pemanfaatan Teknologi Berbasis Aplikasi/Website Online

a. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian

Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem



single entry point, single database, dan akuntansi berbasis aktual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

b. Aplikasi Satu Anggaran

Aplikasi SatuDJA adalah akronim dari Sistem Aplikasi Terpadu Anggaran Kementerian Keuangan RI yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh DJA, sehingga diharapkan pegawai dan stakeholder DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran. Satu DJA dibangun pada tiga platform sistem aplikasi, yaitu: aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis mobile dengan tujuh sub sistem yang saling terintegrasi.

c. E-Monitoring

E-Monitoring merupakan pemantauan dan pelaporan dengan penyampaian data secara elektronik (online) serta dapat dipantau secara terus menerus untuk penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian untuk meyakinkan bahwa prosedur berjalan sebagaimana mestinya.

Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, kemudian Direktorat Jenderal Perumahan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya system e-Monitoring, pelaporan data progress pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat.

d. E-SAKIP

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Entitas Kinerja di lingkungan Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan entitas kinerja.

Aplikasi E-SAKIP ini menampilkan informasi secara waktu sebenarnya (real time) meliputi: 1). RPJMN; 2). Rencana Strategis; 3) Rencana Kinerja; 4). Indikator Kinerja Utama; 5). Perjanjian Kinerja; 6). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7).



Evaluasi Capaian Kinerja; 8). Hasil Evaluasi SAKIP; 9). Kinerja Individu; 10). Kebijakan dan Peraturan terkait SAKIP.

e. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)

Secara garis besar aplikasi SAIBA melakukan hal-hal berikut:

- Jurnal anggaran dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berupa Pagu Anggaran yang disebut Allotment atas belanja satuan kerja dan estimasi pendapatan yang dialokasikan pada saat kita menginput DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) lalu melakukan proses "posting".
- Jurnal realisasi baik pendapatan maupun belanja yaitu pada saat kita menginput SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPM (Surat Perintah membayar), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) lalu melakukan proses "posting".
- Jurnal Neraca yaitu pada saat kita menginput bukti transaksi reklasifikasi berupa memo penyesuaian reklasifikasi lalu melakukan proses "posting".
- Jurnal Penyesuaian pada saat kita menginput bukti transaksi penyesuaian berupa memo penyesuaian lalu melakukan proses "posting".
- Jurnal Penutup yaitu pada saat kita melakukan tutup akhir tahun.

f. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara SIMAK-BMN dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai subsistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan check and balance antara arus uang dan arus barang. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca.



Bab IV. PENUTUP

Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan nasional secara komprehensif pada umumnya dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya. Laporan kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025. Pencapaian terhadap sasaran strategis yang dapat melebihi target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan dalam Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PKP 2025-2029.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Pemen PKP RI No 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian PKP. Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*.



Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang diemban oleh Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat mampu menjalankan tugas dengan cukup baik, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan tidak memiliki permasalahan yang berarti.

Adapun capaian hasil, penunjang keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Capaian Hasil :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas rumah swadaya yang layak dan aman di Provinsi Sumatera Barat di kawasan pesisir, perdesaan dan perkotaan;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas akses jalan lingkungan bagi masyarakat pada kawasan permukiman;
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas sanitasi rumah bagi masyarakat pada kawasan permukiman;
- d. Terwujudnya penyediaan Rumah Khusus relokasi masyarakat terdampak bencana;

2. Penunjang Keberhasilan :

- a. Terciptanya koordinasi yang baik dengan stakeholder perumahan;
- b. Alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program pengembangan perumahan;
- c. Melaksanakan update e-monitoring secara rutin;
- d. Adanya jumlah SDM yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- e. Terciptanya kerjasama dengan baik bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.

3. Permasalahan dan Kendala :

- a. Kegiatan BSPS lebih berorientasi pada hasil fisik dan siklus program jangka pendek sehingga pemberdayaan dan pendampingan kurang optimal.
- b. Keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan fisik BSPS yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti bencana banjir bandang, kelangkaan tukang di beberapa daerah, upacara adat, akses jalan yang sulit pada medan lokasi, cuaca ekstrem,



serta minimnya keswadayaan dan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong.

4. Langkah Kebijakan :

- a. Dilakukan percepatan progres pelaksanaan dengan pengawalan intens oleh TA ke lapangan serta penggantian pekerjaan tukang oleh warga lain.
- b. Menghimbau penyedia jasa untuk membuat permintaan komitmen kualitas produksi dan garansi kepada suplier material paving.
- c. Pengawasan dan pengendalian penyedia jasa secara lebih ketat sehingga tidak terlampaui jauh dari jadwal pekerjaan yang ditargetkan.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud nyata transparansi, akuntabilitas kinerja dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan nasional secara komprehensif pada umumnya dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance. Hasil kerja dari Satker Penyediaan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat secara luas, baik itu dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan aman.

IV.1 SIMPULAN UMUM

Hal yang disimpulkan dari capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut

- a. Dipa Sekretariat Jenderal dengan realisasi kinerja yaitu sebesar sebesar yaitu sebesar 97,67% untuk Kegiatan keperluan perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Honor operasional satuan kerja dari Rencana Keuangan



- 100% dan Realisasi Keuangan 97,67%, Rencana Fisik 100% dan Realisasi Fisik 100%.
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan realisasi kinerja yaitu sebesar sebesar yaitu sebesar 82,55% untuk Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman, Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dari Rencana Keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 82,55%, Rencana Fisik 99,49% dan Realisasi Fisik 85,08%.
 - DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan realisasi kinerja yaitu sebesar sebesar yaitu sebesar 97,08% untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya dari Rencana Keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 97,08%, Rencana Fisik 99,15% dan Realisasi Fisik 100%.
 - DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan realisasi kinerja yaitu sebesar sebesar yaitu sebesar 91,6% untuk Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat, Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, Pemantauan dan Evaluasi BSPS dari Rencana Keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 86,17%, Rencana Fisik 100% dan Realisasi Fisik 94,20%.
- Untuk rincian realisasi dan Pengembalian Anggaran Tahun 2025 di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV-1 Rincian Realisasi dan Pengembalian Anggaran di Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	DIPA Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	%	BLOKIR (Rp)	Pengembalian
1	Sekretariat Jenderal	Rp 741.375.000	Rp 724.077.818	97,67		Rp 17.297.182
2	Ditjen Kawasan Permukiman	Rp 19.675.454.000	Rp 16.241.429.336	82,55		Rp 3.434.024.664
3	Ditjen Perumahan Perkotaan	Rp 4.724.051.000	Rp 4.585.927.478	97,08		Rp 138.123.522
4	Ditjen Perumahan Perdesaan	Rp 85.492.615.000	Rp 73.670.823.717	86,17	11.821.791.283	Rp 3.589.445.368
Jumlah		Rp 110.633.495.000	Rp 95.222.258.349	86,07	11.821.791.283	Rp 7.178.890.736

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi terakhir, Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi target capaian
- Berdasarkan target Renstra 2025 – 2029, Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi target untuk kegiatan Pembangunan Rumah Swadaya dan Rumah Khusus.

IV.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

- Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan semua stakeholder terutama untuk kegiatan yang berifat kolaboratif dengan instansi lain.
- Bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III melalui forum PKP, melakukan koordinasi dengan Dinas PKP tiap kabupaten/kota untuk mempercepat dan melengkap proses pengusulan bantuan Perumahan terutama untuk bantuan Rumah Susun, PSU, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Peningkatan Sanitasi Rumah.
- Berkoordinasi dengan bagian Rentek masing masing Direktorat terkait penganggaran agar anggaran pada DIPA sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan verifikasi yang lebih intensif terhadap calon penerima bantuan agar bantuan yang tersalurkan lebih tepat sasaran.



- Bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III, membuat sistem informasi dan inovasi dalam pelaporan dan pengawasan pelaksanaan progres fisik.



LAMPIRAN

1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Kawasan Pesisir TA 2025 Satker PKP Sumatera Barat;
2. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perdesaan TA 2025 Satker PKP Sumatera Barat;
3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perkotaan TA 2025 Satker PKP Sumatera Barat;
4. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera di Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya;
5. Laporan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Sumatera di Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.
6. Laporan Realisasi Pembangunan Rumah Khusus dan BSPS Deliniasi Perdesaan TA 2025
7. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan TA 2025



Laporan Kinerja TA 2025

SATKER PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROV. SUMBAR





Laporan Kinerja TA 2025

SATKER PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROV. SUMBAR



Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS Delineasi Pesisir Satker PKP Prov. Sumbar

TA 2025

Satker PKP

Prov. Sumbar



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah delineasi pesisir di Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta penyusunan laporan ini.

Padang, 15 Januari 2026

Satker PKP

Provinsi Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur perbendaharaan yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Gambar 1. Struktur Perbendaharaan Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat menyebar di 19 kabupaten/ kota. Untuk Delineasi Kawasan Pesisir terdapat 4 Kabupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Padang Pariman
2. Kabupaten Pasaman Barat
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai

4. Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir TA 2025 Satker PKP Sumatera Barat



Gambar 3. Persebaran alokasi jumlah unit dan calon penerima BSPS delineasi pesisir di provinsi Sumatera Barat

A. Dasar Pelaksanaan

SP DIPA- 146.03.1.691438/2025

B. Persiapan Pelaksanaan :

1. Tenaga Ahli

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 orang Tenaga Ahli (TA) untuk pelaksanaan BSPS Provinsi Sumatera Barat TA 2025, 1 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan dan 1 orang Tenaga Ahli Teknik.

2. Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Seleksi ini diadakan secara terbuka dimana terdapat 577 pendaftaran namun terdapat 40 pendaftaran yang ganda sehingga total angka pendaftar adalah 537

orang yang terdiri dari 36 pendaftaran Koordinator kabupaten/kota, 223 pelamar TFL Teknik dan 278 pendaftar TFL pemberdayaan.

Dengan menyesuaikan jumlah alokasi BSPS berdasarkan surat nomor: RU.10.03/Rb3.1/2025/143 tanggal 25 Agustus 2025, perihal Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Calon Fasilitator Program BSPS Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, diumumkan bahwa 6 orang Korkab/Korkot, 20 orang Tenaga Fasilitator Teknik dan 17 orang Tenaga Fasilitator Pemberdayaan telah lulus seleksi.

3. Pra Tugas Koordinator Lapangan (Korkab/Kot) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Pelaksanaan kegiatan Pra – Tugas Koordinator dan Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 03 September s/d 05 September 2025 di Gedung Aula Bank Nagari Kantor Pusat Pagambiran Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat.



4. Seleksi Bank

Berdasarkan surat Tim Seleksi Bank/Pos Penyalur Program BSPS pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor: RU.10.03/Rb3.1/2025/170 tanggal 2 September 2025, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Bank/Pos Penyalur Dana BPS Tahun 2025, diumumkan bahwa Bank Nagari dipilih menjadi Bank/Pos Penyalur BPS Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat.

C. Pelaksanaan Kegiatan BPS

1. Verifikasi Awal Calon Penerima Bantuan (CPB)

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan yang bertujuan untuk pembuktian terhadap kesesuaian syarat penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan melalui tim verifikasi dan pengawasan Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh TFL dan Korkab/Kot.



2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi kegiatan BPS secara berjenjang kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi dilakukan

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya terhadap calon penerima bantuan yang telah ditetapkan.



3. Pemilihan Terbuka Toko (PTT)

Pada tahap Pemilihan Terbuka Toko (PTT) yang mana dilaksanakan di 1 (satu) kabupaten provinsi Sumatera Barat terdapat 1 Toko Bangunan yang terpilih.





4. Penetapan Penerima BPSB

Berdasarkan surat perihal Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2025 Delineasi Pesisir Tahap I s/d IV, alokasi jumlah unit dan calon penerima BPSB delineasi pesisir di provinsi Sumatera Barat adalah 10 unit.

5. Pelaksanaan Fisik BPSB

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan fisik BPSB di Provinsi Sumatera Barat TA 2025 delineasi pesisir terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

a. Koordinator: Fikriadi, S.T

- Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL): Yasmet, A.Md
 - i. Penerima Bantuan (PB): Syahril (Limau Puruik, Kec. V Koto Timur)



ii. Penerima Bantuan (PB): Eli Murniati (Limau Puruik, Kec. V Koto Timur)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

iii. Penerima Bantuan (PB): Asniwati (Limau Puruik, Kec. V Koto Timur)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

iv. Penerima Bantuan (PB): Jefrinaldi (Limau Puruik, Kec. V Koto Timur)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

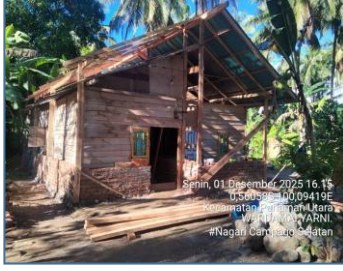
v. Penerima Bantuan (PB): Darlinis (Limau Puruik, Kec. V Koto Timur).

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

vi. Penerima Bantuan (PB): Wati Ardila (Limau Puruik, Kec. V Koto Timur)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

vii. Penerima Bantuan (PB): Wardamai Yarni (Campago Selatan, Kec. Kampung Dalam)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

viii. Penerima Bantuan (PB): Rosman (Campago Selatan, Kec. Kampung Dalam)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

ix. Penerima Bantuan (PB): Hendri Sumanto (Campago Selatan, Kec. Kampung Dalam)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

x. Penerima Bantuan (PB): Asni (Campago Selatan, Kec. Kampung Dalam)

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

D. Evaluasi Kegiatan BSPS

1. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan 05 Desember 2025 di Hotel Rocky Plaza Padang di Jl. Permindo No. 40 Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.



Pada tahap evaluasi ini terdapat beberapa kendala/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan BPSD deliniasi pesisir Provinsi Sumatera Barat TA 2025, yaitu:

1. Tahap perencanaan:

- Ditemukan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak layak sesuai aturan program BPSD, diantaranya :
 - Rumah yang tidak dihuni atau rumah yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya.
 - Rumah yang sudah layak huni namun kurang terawat saja oleh penghuninya.

- Ditemukan rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali, sementara kegiatan ini terkait yang PKRS bukan PBRs.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Ada 1 (Satu) penerima bantuan (PB) atas nama Darmiati meninggal dunia, dan terlambat dalam memulai pelaksanaan fisik rumahnya sehingga berpotensi tidak akan selesai tgl.31 Desember 2025, karena :
 - Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengganggu aktifitas pelaksanaan fisik maupun suplay bahan di lapangan.
 - Toko penyedia agak terkendala dalam mendapatkan papan untuk dinding rumah karena kurangnya pasokan pasca bencana alam di Provinsi Sumatera Barat.
- Ada 2 (dua) penerima bantuan (PB) terkena bencana langsung sehingga berpotensi tidak akan selesai tgl.31 Desember 2025.

Dari kendala/masalah yang telah ditemukan tersebut, terdapat tindak lanjut yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan:

- Untuk yang tidak layak sesuai dengan aturan program, tetap disampaikan ke pemangku kepentingan yang ada termasuk pihak pengusul karena kegiatan ini adalah aspirasi dewan. Selanjutnya pengusul/aspirasi mencari pengganti, kemudian fasilitator melakukan proses verifikasi ke CPB yang bersangkutan sesuai aturan yang ada sebelum dibuatkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi CPB.
- Untuk kasus rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali ditempat yang sama. Hal ini masih bisa ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Pastikan Rencana Teknis dan RABnya ada dan sesuai dengan kemampuan dana yang ada terutama pembiayaan yang berasal dari aspek swadaya penerima bantuan.
 - Pastikan komitmen PB utk bisa menyelesaikan rumahnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan RKT yang ada.

- Libatkan pemerintah atau pemangku kepentingan setempat untuk ikut bersama mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian rumah tersebut.
- Jikalau tidak terpenuhi hal tersebut, maka CPB dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Setelah dilakukan pendekatan dengan saudara PB yang bersangkutan, maka pelaksanaan konstruksi telah dimulai setelah do'a 7 (Tujuh) harian dan agak terlambat mulainya dari PB yang lain.
- Difasilitasi toko bahan bangunan agar menuntaskan seluruh kebutuhan PB, baik bahan pabrikan maupun yang non pabrikan dengan memanfaatkan cuaca bagus tentunya.
- Telah dikoordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama.
- Untuk yang terkena bencana langsung telah didata dengan lengkap dan dilaporkan ke pihak terkait.
- Pasca bencana proses pelaksanaan konstruksi telah berjalan normal kembali, belum selesai terhitung tgl. 31 Desember 2025.

E. Penutup

Demikian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Pesisir Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta sarana evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program. Secara umum, kegiatan BSPS delineasi pesisir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, serta kualitas pelaksanaan program BSPS pada

tahun-tahun mendatang. Dengan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitator, serta masyarakat penerima manfaat, diharapkan tujuan program BSPS untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pesisir dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS Delineasi Perdesaan TA 2025 Satker PKP Prov Sumbar

TA 2025

Satker PKP

Prov. Sumbar



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Deliniasi Perdesaan Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Deliniasi Perdesaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah deliniasi perdesaan di Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta penyusunan laporan ini.

Padang, 12 Januari 2026

Satker PKP

Provinsi Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur perbendaharaan yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

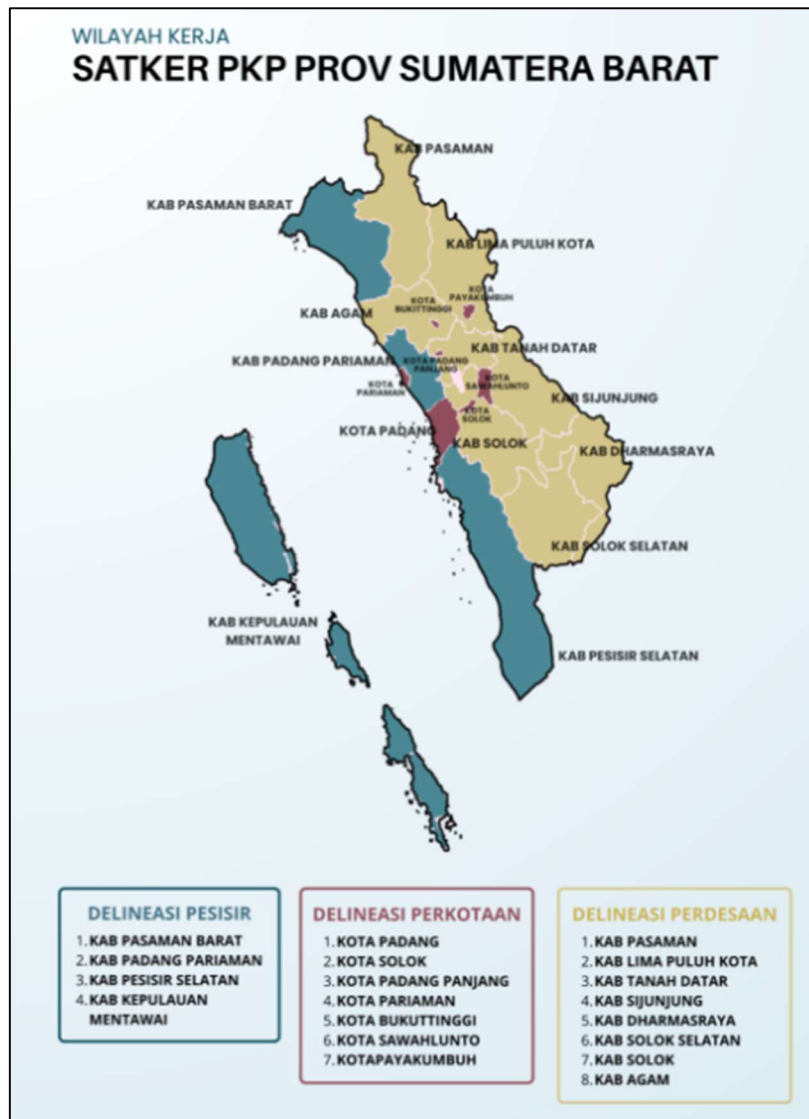


Gambar 1. Struktur Perbendaharaan Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

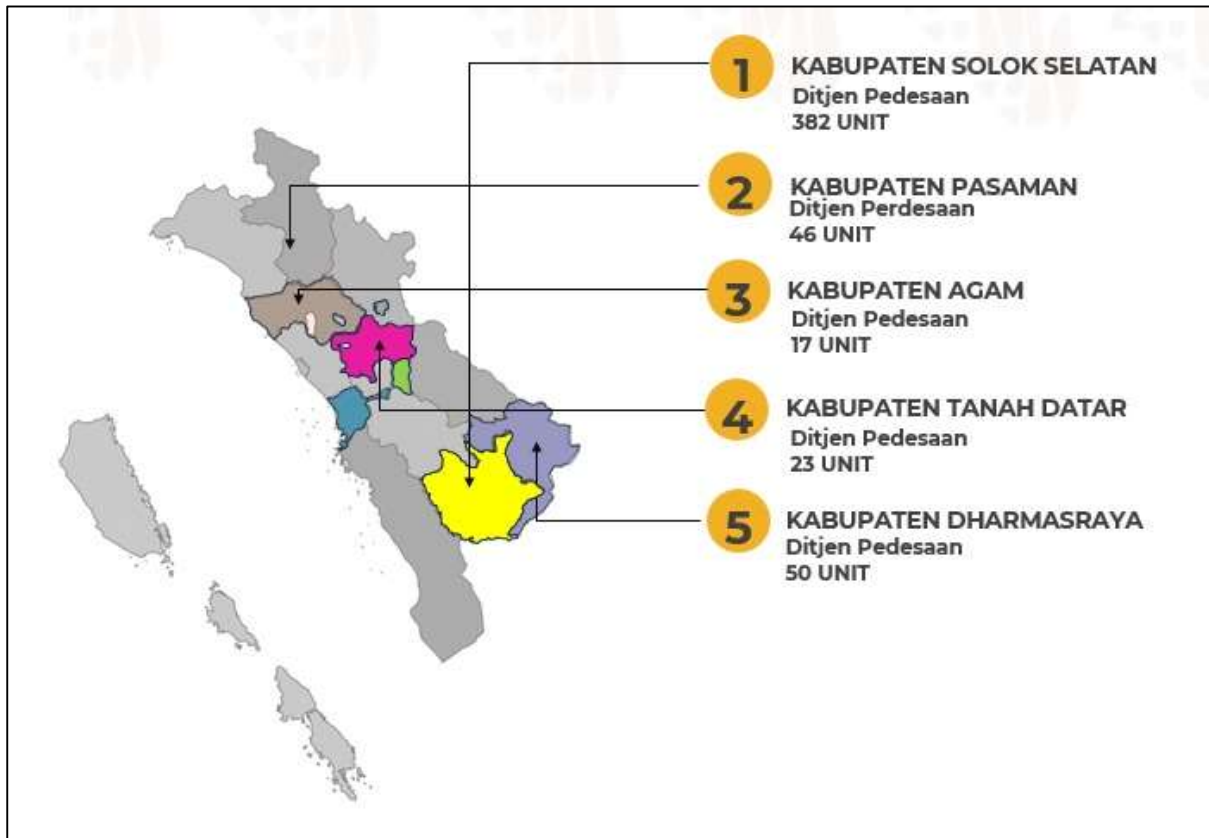
Dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman di Pronvinsi Sumatera Barat menyebar di 19 kabuapten/ kota. Untuk Delineasi Perdesaan terdapat 8 Kbuupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Dharmasraya
3. Kabupaten Sijunjung

4. Kabupaten Tanah Datar
5. Kabupaten Solok Selatan
6. Kabupaten Solok
7. Kabupaten Pasaman
8. Kabupaten Lima Puluh Kota



Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perdesaan TA 2025 Satker PKP Sumatera Barat



Gambar 2. Persebaran alokasi jumlah unit dan calon penerima BSPS di provinsi Sumatera Barat

A. Dasar Pelaksanaan

SP DIPA- 146.04.1.691492/2025

B. Persiapan Pelaksanaan :

1. Tenaga Ahli

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 orang Tenaga Ahli (TA) untuk pelaksanaan BSPS Provinsi Sumatera Barat TA 2025, 1 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan dan 1 orang Tenaga Ahli Teknik.

2. Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Seleksi ini diadakan secara terbuka dimana terdapat 577 pendaftaran namun terdapat 40 pendaftaran yang ganda sehingga total angka pendaftar adalah 537

orang yang terdiri dari 36 pendaftara Koordinator kabupaten/kota, 223 pelamar TFL Teknik dan 278 pendaftar TFL pemberdayaan.

Dengan menyesuaikan jumlah alokasi BSPS berdasarkan surat nomor: RU.10.03/Rb3.1/2025/143 tanggal 25 Agustus 2025, perihal Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Calon Fasilitator Program BSPS Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, diumumkan bahwa 6 orang Korkab/Korkot, 20 orang Tenaga Fasilitator Teknik dan 17 orang Tenaga Fasilitator Pemberdayaan telah lulus seleksi.

3. Pra Tugas Koordinator Lapangan (Korkab/Kot) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Pelaksanaan kegiatan Pra – Tugas Koordinator dan Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 03 September s/d 05 September 2025 di Gedung Aula Bank Nagari Kantor Pusat Pagambiran Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat.



4. Seleksi Bank

Berdasarkan surat Tim Seleksi Bank/Pos Penyalur Program BSPS pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor: RU.10.03/Rb3.1/2025/170 tanggal 2 September 2025, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Bank/Pos Penyalur Dana BSPS Tahun 2025, diumumkan bahwa Bank Nagari dipilih menjadi Bank/Pos Penyalur BSPS Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat.

C. Pelaksanaan Kegiatan BSPS

1. Verifikasi Awal Calon Penerima Bantuan (CPB)

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan yang bertujuan untuk pembuktian terhadap kesesuaian syarat penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan melalui tim verifikasi dan pengawasan Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh TFL dan Korkab/Kot.



2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi kegiatan BSPS secara berjenjang kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi dilakukan

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya terhadap calon penerima bantuan yang telah ditetapkan.



3. Pemilihan Terbuka Toko (PTT)

Pada tahap Pemilihan Terbuka Toko (PTT) yang mana dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten provinsi Sumatera Barat terdapat 24 Toko Bangunan yang terpilih.



4. Penetapan Penerima BSPS

Berdasarkan surat perihal Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2025 Delineasi Perdesaan Tahap I s/d IV, alokasi jumlah unit dan calon penerima BSPS di provinsi Sumatera Barat adalah 521 unit, akan tetapi selama pelaksanaan kegiatan terdapat 3 penerima bantuan yang mengundurkan diri.

5. Pelaksanaan Fisik BSPS

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan fisik BSPS di Provinsi Sumatera Barat TA 2025 delineasi perdesaan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

- Progres 0%

Progres fisik 0% menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan/perbaikan rumah belum dilaksanakan, namun seluruh tahapan persiapan telah dilakukan.



- Progres 30% - 50%

Progres fisik 30–50% menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan/perbaikan rumah telah berjalan sesuai rencana, ditandai dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi utama,





- Progres 100%

Progres fisik 100% menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan pembangunan/perbaikan rumah telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis dan ketentuan BSPS, serta rumah telah memenuhi kriteria laik huni dan siap dimanfaatkan oleh penerima bantuan.



NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI		PROGRES					KETERANGAN
		AWAL	FINAL	0 %	0-30 %	30 %	30-100 %	100 %	
1	KAB. SOLOK SELATAN	385	382	-	67	29	250	36	3 PB dikembalikan ke Kas Negara
2	KAB. PASAMAN	46	46	-	-	-	-	46	
3	KAB. AGAM	17	17	-	-	-	16	1	
4	KAB. TANAH DATAR	23	23	-	-	-	4	19	
5	KAB. DHAMASRAYA	50	50	-	-	-	29	21	
JUMLAH DELINEASI PERDESAAN		521	518	-	67	29	299	123	3 PB dikembalikan ke Kas Negara

D. Evaluasi Kegiatan BSPS

1. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan 05 Desember 2025 di Hotel Rocky Plaza Padang di Jl. Permindo No. 40 Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.



Pada tahap evaluasi ini terdapat beberapa kendala/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan BSPS deliniasi perdesaan Provinsi Sumatera Barat TA 2025, yaitu:

1. Tahap perencanaan:

- Ditemukan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak layak sesuai aturan program BSPS.
- Ditemukan CPB sudah meninggal dunia pada saat proses verifikasi dilakukan di lapangan.
- Ditemukan CPB yang tidak berada di lokasi atau sedang berada diluar kota.
- Ditemukan CPB yang tidak memiliki rumah atau menumpang ditempat saudaranya.
- Ditemukan CPB berselisih dengan saudaranya dan sampai ke pengadilan karena persoalan kepemilikan tanah untuk rencana perletakkan rumah.
- Ditemukan rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali, sementara kegiatan ini terkait yang PKRS bukan PBRS.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Terlambatnya pendistribusian bahan bangunan atau material oleh toko bahan bangunan sehingga masih ada beberapa penerima bantuan yang stagnan di lapangan.
- Sulit mendapatkan tukang sesuai dengan kebutuhan rumah yang sedang dibangun di beberapa lokasi, sehingga kebanyakan 1 tukang untuk menindaklanjuti beberapa rumah PB yang sedang dikerjakan.
- Pelaksanaan kegiatan BSPS yang bersamaan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dinas-dinas di kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga menambah sulitnya mendapatkan material.
- Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengakibatkan muka air sungai tinggi dan mengakibatkan toko penyedia bahan bangunan kesulitan mendapatkan material local seperti Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu. Terkait dengan hal tersebut, kondisi jalan penghubung yang relative rusak dengan posisi PB yang menyebar.

- Ada beberapa lokasi PB yang berada di lokasi terisolir dan sangat sulit dilalui ketika hari hujan.
- Pada saat pelaksanaan kegiatan yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah yang bersangkutan di SK kan oleh PPK karena berbagai alasan dan pertimbangan. Penerima bantuan tidak mau lagi mematuhi dan mengikuti aturan program sehingga yang bersangkutan tidak layak lagi untuk dilanjutkan sebagai penerima bantuan.

Dari kendala/masalah yang telah ditemukan tersebut, terdapat tindak lanjut yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan:

- Untuk yang tidak layak sesuai dengan aturan program, tetap disampaikan ke pemangku kepentingan yang ada termasuk pihak pengusul karena kegiatan ini adalah aspirasi dewan. Selanjutnya pengusul/aspirasi mencari pengganti, kemudian fasilitator melakukan proses verifikasi ke CPB yang bersangkutan sesuai aturan yang ada sebelum dibuatkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi CPB.
- Untuk CPB yang sudah meninggal dunia, secara persyaratan bisa dialihkan ke ahli waris yang sudah punya KTP dengan ketentuan rumah tersebut layak sesuai dengan aturan program. Kemudian sebagai dokumen pendukung, pemerintah setempat wajib mengeluarkan surat keterangan kematian untuk CPB yang sudah meninggal dunia tersebut.
- Untuk CPB yang tidak berada di lokasi pada saat proses verifikasi, maka bisa diwakilkan oleh saudaranya dengan memegang surat kuasa dari CPB, namun dengan ketentuan rumah dan CPB tersebut layak sesuai dengan aturan program. Selanjutnya pada saat pelaksanaan nanti CPB diwajibkan untuk berada di lokasi kegiatan, jikalau tidak bisa berarti dia tidak layak karena itu bukan kebutuhan dari CPB tersebut.
- Untuk CPB yang tidak punya rumah dan masih menumpang di rumah saudaranya atau orang lain tentu tidak layak sesuai aturan program, karena salah satu syarat CPB layak tersebut adalah CPB memiliki rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi yang layak huni.

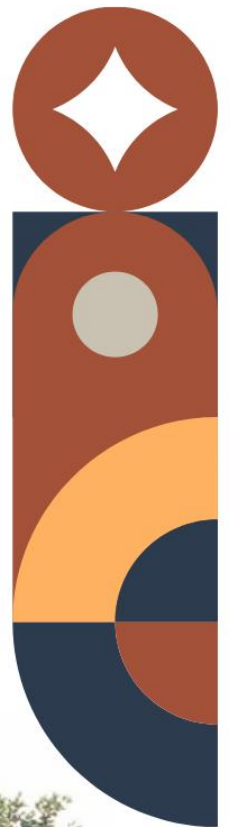
- Untuk syarat jadi CPB lainnya adalah rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi tidak layak huni dan itu harus berdiri diatas tanah yang tidak bersengketa atau legal secara kepemilikan. Jikalau ditemukan tanahnya masih belum legal sebagaimana persyaratan, maka CPB yg bersangkutan dinyatakan tidak layak sesuai aturan program.
- Untuk kasus rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali ditempat yang sama.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Fasilitator telah melakukan monitoring dan kontrol yang lebih kontiniu sehingga kalau ditemukan permasalahan tersebut, maka secepatnya difasilitasi penyelesaiannya sehingga tidak berlarut terlalu lama. Seiringdengan hal tersebut agar difasilitasi toko penyedia agar yang bersangkutan menambah armada serta persediaan.
- Kalau 1 tukang mengerjakan beberapa rumah tentu secara progres kegiatan akan tertambat, maka jauh sebelum masuk ke tahap pelaksanaan atau masih di tahap persiapan masyarakat dipastikan setiap CPB memiliki tukang untuk melaksanakan rumahnya termasuk ketersediaan dana untuk
- upah tukang. Dan jikalau pada saat pelaksanaan ditemukan kasus seperti hal tersebut, maka difasilitasi PB yang bersangkutan untuk mencari tukang yang lain dari luar lokasi kegiatan dengan ketentuan PB memiliki dana untuk upah tukang tersebut.
- Sesuai dengan surat perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, KPB bersama dengan fasilitator memfasilitasi toko penyedia bahan bangunan untuk tetap komit dengan perjanjian kerjasama termasuk memfasilitasi toko tersebut untuk merealisasikan material sesuai kebutuhan yang ada dari manapun dengan ketentuan legal untuk digunakan.
- Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan suplay material ke PB yang masih bisa untuk dilakukan, baik bahan pabrikan maupun yang non pabrikan.
- Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama terutama yang terisolir.

- Tidak ada lagi waktu untuk mengganti penerima bantuan karena kegiatan ini berlangsung di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan. Karena tidak memungkinkan lagi untuk melakukan proses pergantian penerimabantuan sesuai mekanisme yang ada, maka PPK sebagai penanggungjawab kegiatan memutuskan untuk mengembalikan lagi ke kas negara karena tidak terserap menjadi kegiatan.

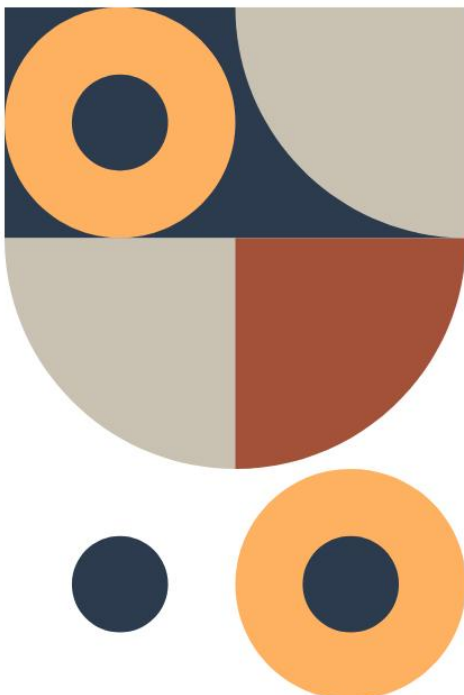
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan TA 2025 Satker PKP Prov Sumbar



TA 2025

Satker PKP

Prov. Sumbar



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perkotaan Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perkotaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah delineasi perkotaan di Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta penyusunan laporan ini.

Padang, 14 Januari 2026

Satker PKP

Provinsi Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur perbendaharaan yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Gambar 1. Struktur Perbendaharaan Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat menyebar di 19 kabupaten/ kota. Untuk Delineasi Perkotaan terdapat 7 Kabupaten yang terdiri dari :

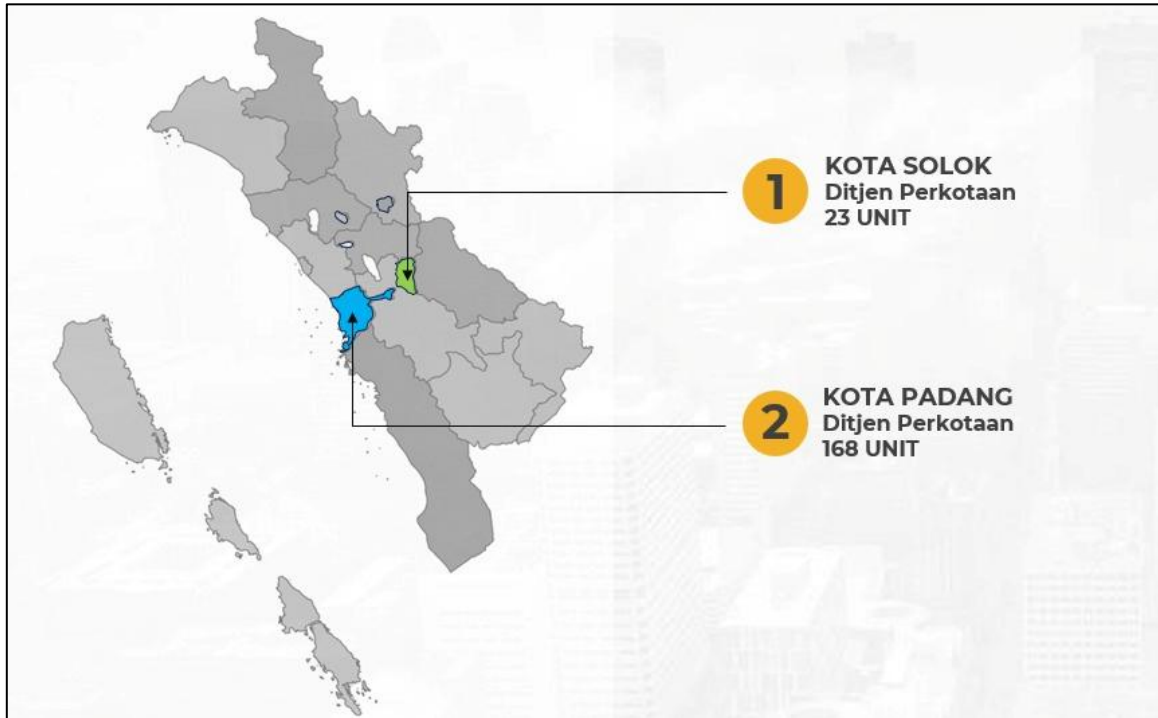
1. Kota Padang
2. Kota Solok
3. Kota Padang Panjang

4. Kota Pariaman
5. Kota Bukittinggi
6. Kota Sawahlunto
7. Kota Payakumbuh



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perkotaan TA 2025 Satker PKP Sumatera Barat



Gambar 3. Persebaran alokasi jumlah unit dan calon penerima BSPS delineasi perkotaan di provinsi Sumatera Barat

A. Dasar Pelaksanaan

SP DIPA- 146.05.1.691546/2025

B. Persiapan Pelaksanaan :

1. Tenaga Ahli

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 orang Tenaga Ahli (TA) untuk pelaksanaan BSPS Provinsi Sumatera Barat TA 2025, 1 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan dan 1 orang Tenaga Ahli Teknik.

2. Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Seleksi ini diadakan secara terbuka dimana terdapat 577 pendaftaran namun terdapat 40 pendaftaran yang ganda sehingga total angka pendaftar adalah 537 orang yang terdiri dari 36 pendaftaran Koordinator kabupaten/kota, 223 pelamar TFL Teknik dan 278 pendaftar TFL pemberdayaan.

Dengan menyesuaikan jumlah alokasi BSPS berdasarkan surat nomor: RU.10.03/Rb3.1/2025/143 tanggal 25 Agustus 2025, perihal Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Calon Fasilitator Program BSPS Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, diumumkan bahwa 6 orang Korkab/Korkot, 20 orang Tenaga Fasilitator Teknik dan 17 orang Tenaga Fasilitator Pemberdayaan telah lulus seleksi.

3. Pra Tugas Koordinator Lapangan (Korkab/Kot) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Pelaksanaan kegiatan Pra – Tugas Koordinator dan Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 03 September s/d 05 September 2025 di Gedung Aula Bank Nagari Kantor Pusat Pagambiran Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat.



4. Seleksi Bank

Berdasarkan surat Tim Seleksi Bank/Pos Penyalur Program BSPS pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor: RU.10.03/Rb3.1/2025/170 tanggal 2 September

2025, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Bank/Pos Penyalur Dana BSPS Tahun 2025, diumumkan bahwa Bank Nagari dipilih menjadi Bank/Pos Penyalur BSPS Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat.

C. Pelaksanaan Kegiatan BSPS

1. Verifikasi Awal Calon Penerima Batuan (CPB)

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan yang bertujuan untuk pembuktian terhadap kesesuaian syarat penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan melalui tim verifikasi dan pengawasan Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh TFL dan Korkab/Kot.



2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Satker PKP Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi kegiatan BSPS secara berjenjang kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya terhadap calon penerima bantuan yang telah ditetapkan.



3. Pemilihan Terbuka Toko (PTT)

Pada tahap Pemilihan Terbuka Toko (PTT) yang mana dilaksanakan di 2 (dua) kota provinsi Sumatera Barat terdapat 13 Toko Bangunan yang terpilih.





4. Penetapan Penerima BSPS

Berdasarkan surat perihal Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2025 Delineasi Perkotaan Tahap I s/d IV, alokasi jumlah unit dan calon penerima BSPS delineasi perkotaan di provinsi Sumatera Barat adalah 191 unit, akan tetapi selama pelaksanaan kegiatan terdapat 1 penerima bantuan yang mengundurkan diri dan $\frac{1}{2}$ penerima bantuan terkena bencana banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda provinsi Sumatera Barat yang mana tidak bisa melanjutkan pelaksanaan kegiatan (dana Tahap 1 telah diterima).

5. Pelaksanaan Fisik BSPS

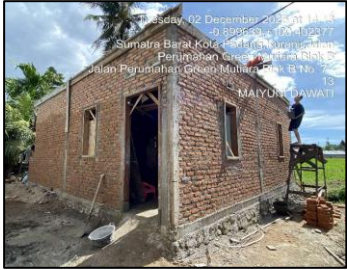
Satker PKP Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan fisik BSPS di Provinsi Sumatera Barat TA 2025 delineasi perkotaan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

a. Kota Padang

- Koordinator: Fikriadi, S.T
 - Tenaga Fasilitator Lapangan: Rio Farma, S.E & Nurrahman Rizky, S.T



- o Tenaga Fasilitator Lapangan: Annisa Intan Vahmi, S.E & Andam Ayuanda Putri, S.T

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

- Koordinator: Abrar. Z, S.Tp

- o Tenaga Fasilitator Lapangan: Resti Rafika, S.Pt & Oza Nori Nomya, S.T

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

- o Tenaga Fasilitator Lapangan: Syafrina, S.T & M. Indry Haikal Kamil, S.Hut.

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

b. Kota Solok

- Koordinator Abrar. Z, S.Tp
 - Tenaga Fasilitator Lapangan: Arfatma, S.T

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI		PROGRES					KETERANGAN
		AWAL	FINAL	0 %	0-30 %	30 %	30-100 %	100 %	
1	KOTA SOLOK	23	23	-	-	-	3	20	
2	KOTA PADANG	168	167	-	-	2	114	51	1,5 PB dikembalikan ke Kas Negara
JUMLAH DELINEASI PERKOTAAN		191	190	-	-	2	117	71	1,5 PB dikembalikan ke Kas Negara

D. Evaluasi Kegiatan BSPS

1. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan 05 Desember 2025 di Hotel Rocky Plaza Padang di Jl. Permindo No. 40 Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.





Pada tahap evaluasi ini terdapat beberapa kendala/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan BSPS delineasi perkotaan Provinsi Sumatera Barat TA 2025, yaitu:

1. Tahap perencanaan:

- Ditemukan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak layak sesuai aturan program BSPS.
- Ditemukan CPB sudah meninggal dunia pada saat proses verifikasi dilakukan di lapangan.
- Ditemukan CPB yang tidak berada di lokasi atau sedang berada diluar kota.
- Ditemukan CPB yang tidak memiliki rumah atau menumpang ditempat saudaranya.
- Ditemukan CPB berselisih dengan saudaranya dan sampai ke pengadilan karena persoalan kepemilikan tanah untuk rencana perletakkan rumah.
- Ditemukan rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali, sementara kegiatan ini terkait yang PKRS bukan PBRS.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Terlambatnya pendistribusian bahan bangunan atau material oleh toko bahan bangunan sehingga masih ada beberapa penerima bantuan yang stagnan di lapangan.
- Sulit mendapatkan tukang sesuai dengan kebutuhan rumah yang sedang dibangun di beberapa lokasi, sehingga kebanyakan 1 tukang untuk menindaklanjuti beberapa rumah PB yang sedang dikerjakan.

- Pelaksanaan kegiatan BSPS yang bersamaan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dinas-dinas di kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga menambah sulitnya mendapatkan material.
- Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengakibatkan muka air sungai tinggi dan mengakibatkan toko penyedia bahan bangunan kesulitan mendapatkan material local seperti Pasir, Kerikil, Batako dan Kayu. Terkait dengan hal tersebut, kondisi jalan penghubung yang relative rusak dengan posisi PB yang menyebar.
- Ada beberapa lokasi PB yang berada di lokasi terisolir dan sangat sulit dilalui ketika hari hujan.
- Pada saat pelaksanaan kegiatan yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah yang bersangkutan di SK kan oleh PPK karena berbagai alasan dan pertimbangan. Penerima bantuan tidak mau lagi mematuhi dan mengikuti aturan program sehingga yang bersangkutan tidak layak lagi untuk dilanjutkan sebagai penerima bantuan.

Dari kendala/masalah yang telah ditemukan tersebut, terdapat tindak lanjut yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan:

- Untuk yang tidak layak sesuai dengan aturan program, tetap disampaikan ke pemangku kepentingan yang ada termasuk pihak pengusul karena kegiatan ini adalah aspirasi dewan. Selanjutnya pengusul/aspirasi mencari pengganti, kemudian fasilitator melakukan proses verifikasi ke CPB yang bersangkutan sesuai aturan yang ada sebelum dibuatkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi CPB.
- Untuk CPB yang sudah meninggal dunia, secara persyaratan bisa dialihkan ke ahli waris yang sudah punya KTP dengan ketentuan rumah tersebut layak sesuai dengan aturan program. Kemudian sebagai dokumen pendukung, pemerintah setempat wajib mengeluarkan surat keterangan kematian untuk CPB yang sudah meninggal dunia tersebut.
- Untuk CPB yang tidak berada di lokasi pada saat proses verifikasi, maka bisa diwakilkan oleh saudaranya dengan memegang surat kuasa dari CPB, namun dengan ketentuan rumah dan CPB tersebut layak sesuai dengan aturan program. Selanjutnya pada saat pelaksanaan nanti CPB diwajibkan

untuk berada di lokasi kegiatan, jikalau tidak bisa berarti dia tidak layak karena itu bukan kebutuhan dari CPB tersebut.

- Untuk CPB yang tidak punya rumah dan masih menumpang di rumah saudaranya atau orang lain tentu tidak layak sesuai aturan program, karena salah satu syarat CPB layak tersebut adalah CPB memiliki rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi yang layak huni.
- Untuk syarat jadi CPB lainnya adalah rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi tidak layak huni dan itu harus berdiri di atas tanah yang tidak bersengketa atau legal secara kepemilikan. Jikalau ditemukan tanahnya masih belum legal sebagaimana persyaratan, maka CPB yg bersangkutan dinyatakan tidak layak sesuai aturan program.
- Untuk kasus rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali ditempat yang sama.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Fasilitator telah melakukan monitoring dan kontrol yang lebih kontiniu sehingga kalau ditemukan permasalahan tersebut, maka secepatnya difasilitasi penyelesaiannya sehingga tidak berlarut terlalu lama. Seiringdengan hal tersebut agar difasilitasi toko penyedia agar yang bersangkutan menambah armada serta persediaan.
- Kalau 1 tukang mengerjakan beberapa rumah tentu secara progres kegiatan akan tertambat, maka jauh sebelum masuk ke tahap pelaksanaan atau masih di tahap persiapan masyarakat dipastikan setiap CPB memiliki tukang untuk melaksanakan rumahnya termasuk ketersediaan dana untuk upah tukang. Dan jikalau pada saat pelaksanaan ditemukan kasus seperti hal tersebut, maka difasilitasi PB yang bersangkutan untuk mencari tukang yang lain dari luar lokasi kegiatan dengan ketentuan PB memiliki dana untuk upah tukang tersebut.
- Sesuai dengan surat perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, KPB bersama dengan fasilitator memfasilitasi toko penyedia bahan bangunan untuk tetap komit dengan perjanjian kerjasama termasuk memfasilitasi toko tersebut untuk merealisasikan material sesuai kebutuhan yang ada dari manapun dengan ketentuan legal untuk digunakan.

- Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan suplay material ke PB yang masih bisa untuk dilakukan, baik bahan pabrikasi maupun yang non pabrikasi.
- Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama terutama yang terisolir.
- Tidak ada lagi waktu untuk mengganti penerima bantuan karena kegiatan ini berlangsung di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan. Karena tidak memungkinkan lagi untuk melakukan proses pergantian penerimabantuan sesuai mekanisme yang ada, maka PPK sebagai penanggungjawab kegiatan memutuskan untuk mengembalikan lagi ke kas negara karena tidak terserap menjadi kegiatan.

E. Penutup

Demikian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perkotaan Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program ke depan. Secara umum, pelaksanaan BSPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan.

Diharapkan hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program BSPS pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

TA 2025

Satker PKP

Prov. Sumbar



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman dengan kriteria kumuh di Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh serta penyusunan laporan ini.

Padang, 14 Januari 2026

Satker PKP
Provinsi Sumatera Barat

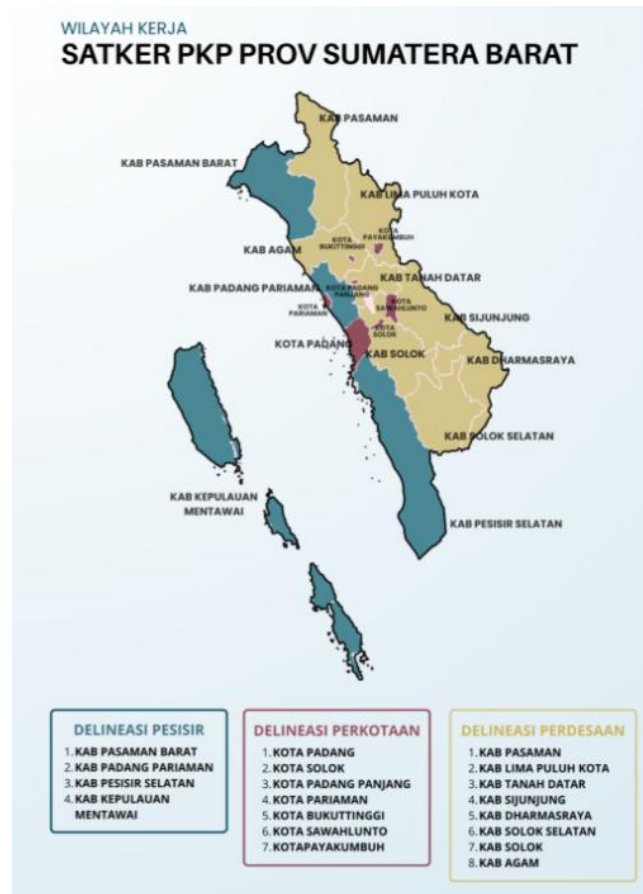
PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur perbendaharaan yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Gambar 1 Struktur Perbendaharaan Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat menyebar di 19 kabupten/ kota. Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Sumatera Barat terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.



Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya. Pekerjaan di Kota Padang dilaksanakan di Pasie Nan Tigo. Pekerjaan di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan di Pasar Lama Pulau Punjung.

1. Kota Padang, Pasie Nan Tigo

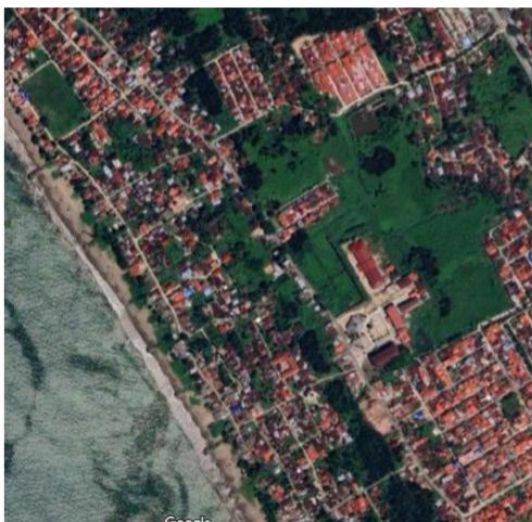
Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasie Nan Tigo mempunyai luas area 52,64 Hektar. Terdapat tiga pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Padang, yaitu Drainase, Jalan Lingkungan, dan Perbaikan Rumah MBR.



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  RTLH PB |  Drainase |
|  RTLH PK |  Jalan |
|  Sanitasi Tipe 1 |  deliniasi_PNT |

A. Data Umum



Koordinat :

-0.855625719793888, 100.32932752606709

Luasan Kumuh	52,64 Ha
Skor Kumuh	55 (Kumuh Sedang)
Pekerjaan Bangunan Rumah	11 unit
Pekerjaan Jalan Lingkungan	718 meter
Pekerjaan Drainase	3.040 meter
Konsultan Supervisi / MK	CV. Bontang Sembilan Konsultan KSO PT. Pola Pembangunan Konsultan
Tanggal Kontrak	3 November 2025
Nilai Kontrak	Rp. 295.289.500
Kontraktor Pelaksana	CV. Riau Andalan Utama
Tanggal Kontrak	21 Oktober 2025
Nilai Kontrak	Rp. 7.546.874.300

B. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan	21 Oktober – 31 Desember 2025
Rencana Serah Terima	
PHO	31 Desember 2025
FHO	28 Juni 2026

C. Nilai Pagu dan Nilai Kontrak

Pekerjaan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasia Nan Tigo
Lokasi	Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kec. Koto Tengah, Kota Padang
Nilai Kontrak	Rp. 7.546.874.300
Tanggal SPMK	13 Oktober 2025
Masa Pelaksanaan	72 hari Kalender
Sumber Dana	APBN TA 2025
Nilai Pagu	Rp. 9.433.593.000,00
Kontraktor Pelaksana	CV. Riau Andalan Utama
Konsultan Pengawas	CV. Bintang Sembilan Konsultan KSO PT. Pola Pembangunan Konsultan

D. Adendum I, II, RPATA

Adendum I

Tanggal	8 Desember 2025
Nilai	Rp. 8.299.814.800

Adendum II

Tanggal	31 Desember 2025
Nilai	Rp. 8.299.814.800
Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari- 18 Februari 2026

RPATA

1. PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan nilai pemeliharaan.
2. PPK membuat SPP penampungan sebesar perhitungan pada nomor satu.

3. SPP penampungan dibuat masing-masing untuk :
 - Perkiraan nilai pekerjaan
 - Nilai pemeliharaan
4. PPK menyampaikan SPP penampungan kepada PPSPM.
5. PPSPM melakukan pengujian SPP penampungan.
6. Terhadap SPP penampungan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan.
7. PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

E. Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2025.

Minggu 13		
Bobot rencana		93,21%
Bobot realisasi		91,56%
Deviasi		-1,65%
Keuangan		
Nilai Kontrak		Rp. 7.546.874.300
Termin 1	24 Oktober 2025	Rp. 1.509.374.860
Termin 2	3 November 2025	Rp. 1.811.249.832
Termin 3	24 November 2025	Rp. 1.962.187.318
Termin 4	15 Desember 2025	Rp. 1.886.718.575
Termin 5	24 November 2025	Rp. 377.343.715

F. Kendala dan Permasalahan

Adapun permasalahan yang terdapat pada pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Padang, yaitu :

1. Lokasi saluran u-ditch terhalang oleh tiang Listrik dan pohon, sehingga pekerjaan terhambat.
2. Gangguan cuaca ekstrem dan bencana banjir di Lokasi pekerjaan.
3. Material di lapangan tersapu oleh banjir.

4. Gangguan dari oknum masyarakat setempat seperti masalah perletakan alat berat dilokasi pekerjaan yang berada di Kawasan permukiman.

G. Dokumentasi Pekerjaan Fisik



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch

H. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan u-ditch



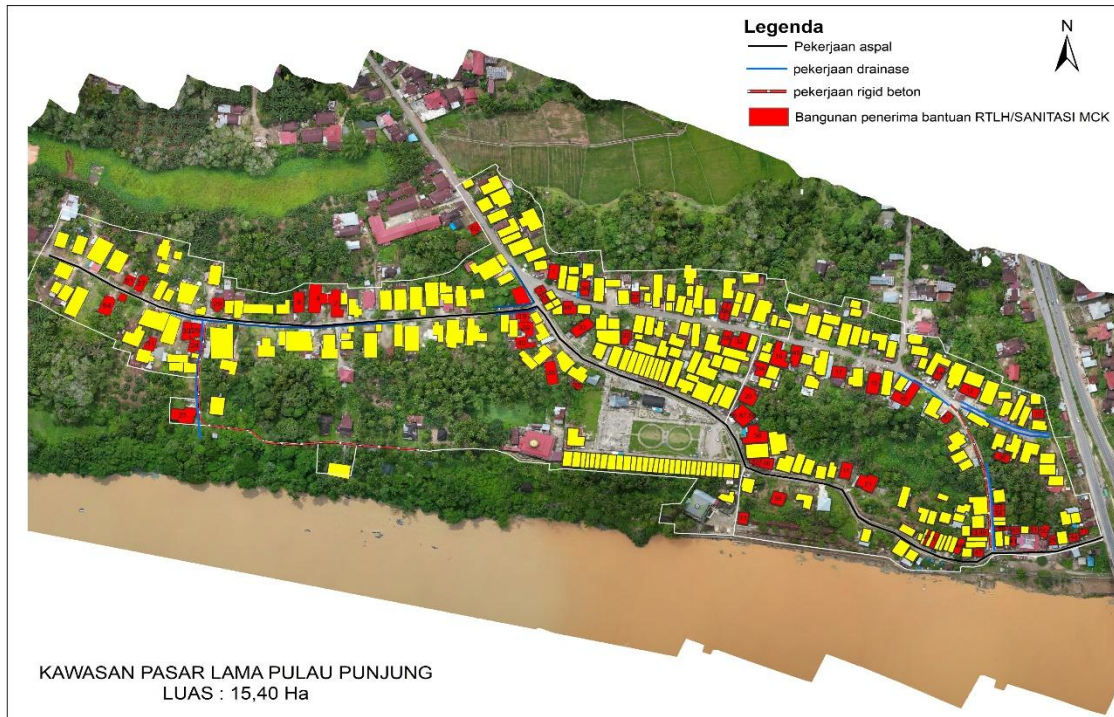
Pekerjaan u-ditch



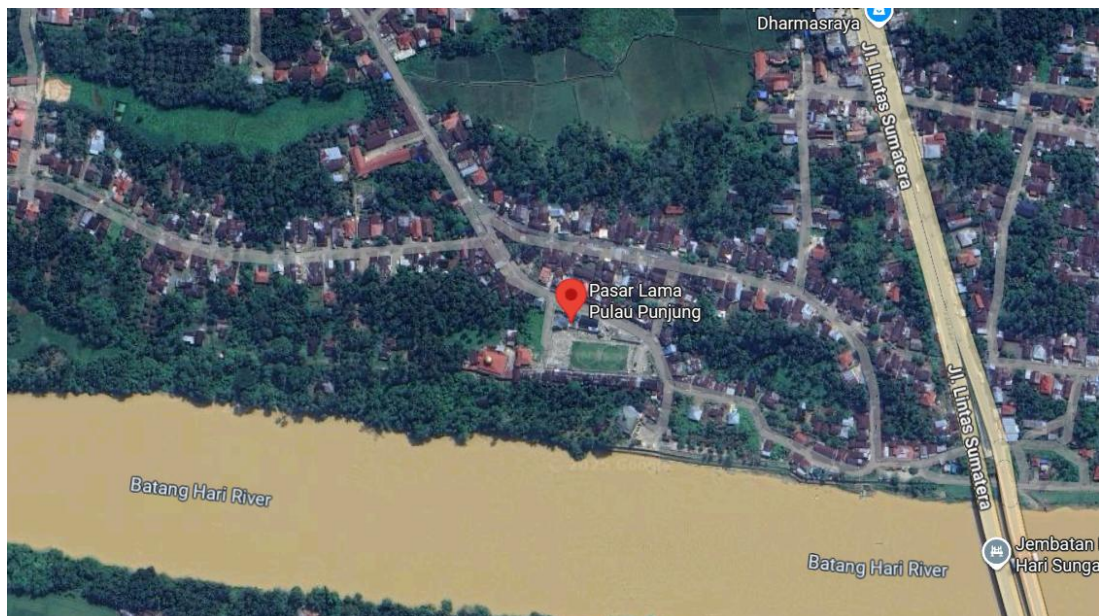
Pekerjaan Rumah

2. Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung mempunyai luas area 15,40 Hektar. Terdapat enam pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Drainase, Jalan Lingkungan, Perbaikan Rumah MBR, dan Air Bersih.



A. Data Umum



Koordinat : -0.9615526263529012, 101.50157755905336

Luasan Kumuh	15,64 Ha
Skor Kumuh	60 (Kumuh Berat)
Pekerjaan Bangunan Rumah	54 unit
Pekerjaan Jalan Lingkungan	1.042 meter
Pekerjaan Drainase	674 meter

Pekerjaan Penyediaan Air Minum	334 SR
Konsultan Supervisi / MK	PT. Duta Bhuana Jaya
Tanggal Kontrak	3 November 2025
Nilai Kontrak	Rp. 366.581.700
Kontraktor Pelaksana	PT. Adinda Maria Parsaktian Abadi
Tanggal Kontrak	13 Oktober 2025
Nilai Kontrak	Rp. 3.946.916.700

B. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan	13 Oktober – 31 Desember 2025
Rencana Serah Terima	
PHO	31 Desember 2025
FHO	28 Juni 2026

C. Nilai Pagu dan Nilai Kontrak

Pekerjaan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung
Lokasi	Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya
Nilai Kontrak	Rp. 3.946.916.700
Tanggal SPMK	13 Oktober 2025
Masa Pelaksanaan	80 hari Kalender
Sumber Dana	APBN TA 2025
Nilai Pagu	Rp. 4.933.645.700,00
Kontraktor Pelaksana	PT. Adinda Maria Parsaktian Abadi
Konsultan Pengawas	CV. Duta Buana Jaya

D. Adendum I, II, RPATA

Adendum I

Tanggal	12 Desember 2025
Nilai	Rp. 4.333.714.500

Adendum II

Tanggal	31 Desember 2025
Nilai	Rp. 4.333.714.500
Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari-18 Februari 2026

RPATA

1. PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan nilai pemeliharaan.
2. PPK membuat SPP penampungan sebesar perhitungan pada nomor satu.
3. SPP penampungan dibuat masing-masing untuk :
 - Perkiraan nilai pekerjaan
 - Nilai pemeliharaan
4. PPK menyampaikan SPP penampungan kepada PPSPM.
5. PPSPM melakukan pengujian SPP penampungan.
6. Terhadap SPP penampungan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan.
7. PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

E. Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2025.

Minggu 13	
Bobot rencana	100%
Bobot realisasi	75,02%

Deviasi	-24,98%
Keuangan	
Nilai Kontrak	Rp. 3.946.916.700
Termin 1 17 Oktober 2025	Rp. 789.383.340
Termin 2 17 November 2025	Rp. 947.260.008
Termin 3 28 November 2025	Rp. 1.026.198.342
Termin 4 15 Desember 2025	Rp. 986.729.175
Termin 5 30 Desember 2025	Rp. 197.345.835

F. Kendala dan Permasalahan

Adapun permasalahan yang terdapat pada pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, yaitu :

1. Kurangnya tenaga kerja untuk masing-masing item pekerjaan.
2. Ketersediaan batu pecah untuk beton ready mix sulit didapatkan.
3. Kondisi permukiman dan juga jalan yang sempit.
4. Adanya penolakan warga saat dilakukan pengecoran beton dikarenakan *truck mixer* (TM) memasuki kawasan jalan yang sempit dan memicu sedikit perselisihan dengan masyarakat sekitar.
5. Perubahan jalur pelaksanaan pengaspalan tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan.
6. Perubahan jalur pelaksanaan pekerjaan pipa tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan.
7. Proses pelaksanaan pekerjaan galian saluran yang mengenai rumah warga dan jalurnya mengenai tiang Listrik.

G. Dokumentasi Pekerjaan Fisik



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah

H. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan u-ditch



Pekerjaan u-ditch



Pekerjaan jalan



Rapat Koordinasi



Pekerjaan drainase



Pekerjaan drainase

PENUTUP

Demikian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program ke depan. Secara umum, pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih memerlukan penambahan waktu (addendum).

Diharapkan hasil laporan pengawasan dan pengendalian ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas permukiman secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Laporan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

TA 2025

Satker PKP

Prov. Sumbar



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk petanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman dengan kriteria kumuh di Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh serta penyusunan laporan ini.

Padang, 14 Januari 2026

Satker PKP
Provinsi Sumatera Barat

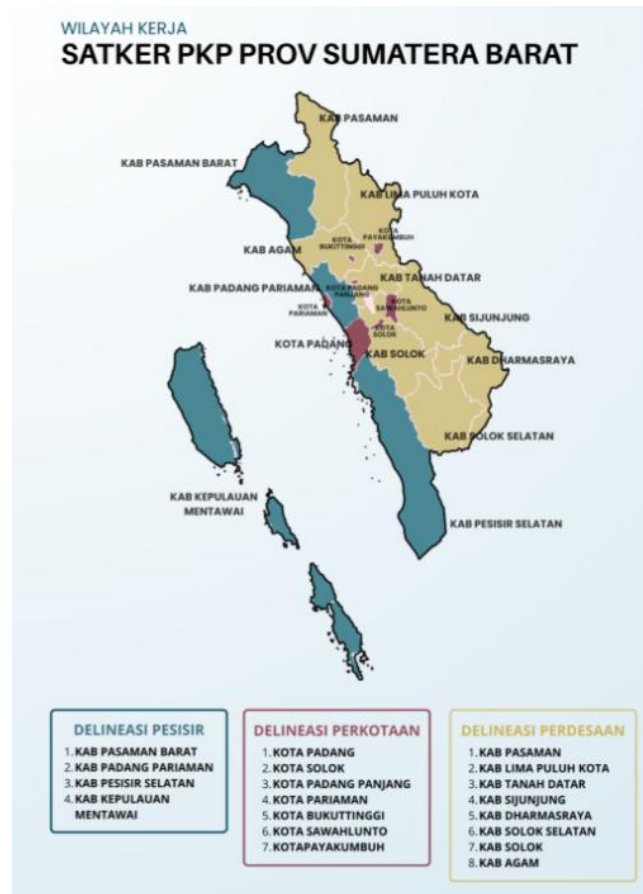
PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur perbendaharaan yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Gambar 1 Struktur Perbendaharaan Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat menyebar di 19 kabupten/ kota. Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Sumatera Barat terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.



Laporan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pengawasan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera terdapat di Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya. Pekerjaan di Kota Padang dilaksanakan di Pasie Nan Tigo. Pekerjaan di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan di Pasar Lama Pulau Punjung.

1. Kota Padang, Pasie Nan Tigo

Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasie Nan Tigo mempunyai luas area 52,64 Hektar. Terdapat tiga pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Padang, yaitu Drainase, Jalan Lingkungan, dan Perbaikan Rumah MBR.



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  RTLH PB |  Drainase |
|  RTLH PK |  Jalan |
|  Sanitasi Tipe 1 |  deliniasi_PNT |

A. Data Umum



Koordinat :

-0.855625719793888, 100.32932752606709

Luasan Kumuh	52,64 Ha
Skor Kumuh	55 (Kumuh Sedang)
Pekerjaan Bangunan Rumah	11 unit
Pekerjaan Jalan Lingkungan	718 meter
Pekerjaan Drainase	3.040 meter
Konsultan Supervisi / MK	CV. Bintang Sembilan Konsultan KSO PT. Pola Pembangunan Konsultan
Tanggal Kontrak	3 November 2025
Nilai Kontrak	Rp. 295.289.500
Kontraktor Pelaksana	CV. Riau Andalan Utama
Tanggal Kontrak	21 Oktober 2025
Nilai Kontrak	Rp. 7.546.874.300

B. Data Personel Konsultan Supervisi / MK

Nama	Jabatan
Marifatul Hakim, S.T.	Supervisi Engineer
Ade Kurniawan, S.T.	Quality Engineer
Doni P. Aritonang, S.T.	HSE

Andribi, S.T.	Inspektor
Ade Fauzan, S.T.	Inspektor
Juliwardi, BA.	Inspektor

C. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan	21 Oktober – 31 Desember 2025
Rencana Serah Terima	
PHO	31 Desember 2025
FHO	28 Juni 2026

D. Nilai Pagu dan Nilai Kontrak

Pekerjaan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasia Nan Tigo
Lokasi	Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kec. Koto Tengah, Kota Padang
Nilai Kontrak	Rp. 7.546.874.300
Tanggal SPMK	13 Oktober 2025
Masa Pelaksanaan	72 hari Kalender
Sumber Dana	APBN TA 2025
Nilai Pagu	Rp. 9.433.593.000,00
Kontraktor Pelaksana	CV. Riau Andalan Utama
Konsultan Pengawas	CV. Bintang Sembilan Konsultan KSO PT. Pola Pembangunan Konsultan

E. Adendum I, II, RPATA

Adendum I	
Tanggal	8 Desember 2025
Nilai	Rp. 8.299.814.800

Adendum II

Tanggal	31 Desember 2025
Nilai	Rp. 8.299.814.800
Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari- 18 Februari 2026

RPATA

1. PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan nilai pemeliharaan.
2. PPK membuat SPP penampungan sebesar perhitungan pada nomor satu.
3. SPP penampungan dibuat masing-masing untuk :
 - Perkiraan nilai pekerjaan
 - Nilai pemeliharaan
4. PPK menyampaikan SPP penampungan kepada PPSPM.
5. PPSPM melakukan pengujian SPP penampungan.
6. Terhadap SPP penampungan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan.
7. PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

F. Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2025.

Minggu 13		
Bobot rencana		93,21%
Bobot realisasi		91,56%
Deviasi		-1,65%
Keuangan		
Nilai Kontrak		Rp. 198.728.000
Termin 1	24 November 2025	Rp. 59.618.400
Termin 2	8 Desember 2025	Rp. 79.491.200

INVOICE 1	
PROGRAM	: PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN	: PELAKSANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
PEKERJAAN	: PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PASIE NAN TIGO KOTA PADANG
LOKASI	: PASIA NAN TIGO, KECAMATAN KOTO TANGAH, KOTA PADANG
NO./TGL. KONTRAK	: 012/SPKP-PNTRb.3.1.3/X/2025/21 Oktober 2025
PENYEDIA	: CV. RIAU ANDALAN UTAMA
TAHUN ANOGARAN	: 2025

BINTANG SEMBILAN KONSULTAN
ARCHITECT - MANAGEMENT - ENGINEERING CONSULTANT
Di. Kington 024/008 Tukum, Kec. Telukang Kidul, Lumbajang Jawa Timur
Email: bintangsembilan@gmail.com / HP: 082743399463

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Beringin Raya No. 40, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang - 25136, Email: satker.aumbang@pkp.go.id



INVOICE NO : 2
PERIODE : 22 NOVEMBER – 22 DESEMBER 2025

PEKERJAAN :
SUPERVISI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PASIE NAN TIGO, KOTA PADANG

NO KONTRAK : 013/SP/KP-SPV.PPP/Rb3.1.3/XI-2025
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2025



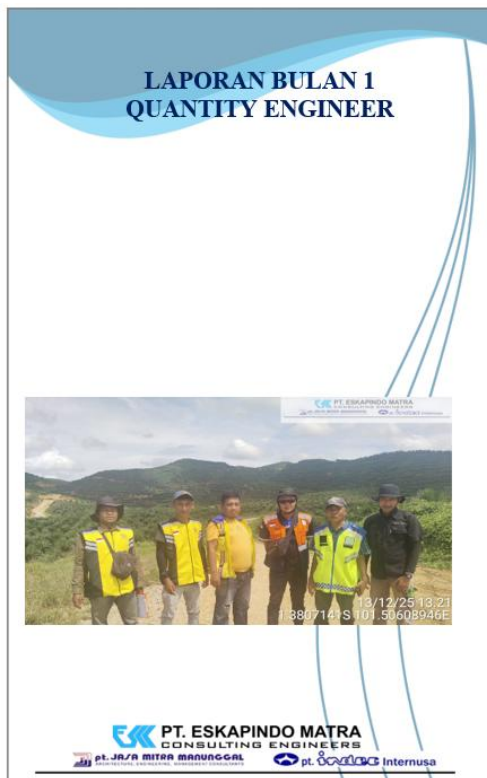
BINTANG SEMBILAN KONSULTAN
ARCHITECT - MANAGEMENT - ENGINEERING CONSULTANT
Di. Kington 024/008 Tukum, Kec. Telukang Kidul, Lumbajang Jawa Timur
Email: bintangsembilan@gmail.com / HP: 082743399463

G. Kendala dan Permasalahan

Adapun permasalahan yang terdapat pada pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Padang, yaitu :

1. Lokasi saluran u-ditch terhalang oleh tiang Listrik dan pohon, sehingga pekerjaan terhambat.
2. Gangguan cuaca ekstrem dan bencana banjir di Lokasi pekerjaan.
3. Material di lapangan tersapu oleh banjir.
4. Gangguan dari oknum masyarakat setempat seperti masalah perletakan alat berat dilokasi pekerjaan yang berada di Kawasan permukiman.

H. Laporan Supervisi



BAB V LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN

A. AKTIVITAS PELAKSANAAN FISIK DI LAPANGAN

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Team Of References (TOR), bahwa Team Supervisi adalah Engineer Representative yang dalam tugas sehari hari membantu PPK Pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Satuan Kerja Kawasan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Untuk Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo Kota Padang untuk melakukan Pengawasan pengendalian mutu, kuantitas, waktu dan administrasi teknis dari awal dimulainya pekerjaan hingga selesai. Adapun aktivitas kegiatan pelaksanaan fisik paket kegiatan diuraikan sebagai berikut :

• KEGIATAN DI LAPANGAN

Pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor dibawah pengawasan Tim Supervisi pada Tanggal 3 November 2025 – 30 November 2025, antara lain adalah sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Bobot %
PEKERJAAN JALAN	
PEKERJAAN PERSIAPAN	
Papan nama kegiatan	0.01 %
PEKERJAAN PERKERASAN BETON	
Timbunan Dan Pematatan Sirtu	0.09 %
Pengecoran beton menggunakan Ready Mixed mutu Fc 25 Mpa, (termasuk Groving dan Deletasi kedalam 4 Cm)	2.93 %
PEKERJAAN DRAINASE	
PEKERJAAN PERSIAPAN	
Papan Nama Proyek	0.01 %
Stake out trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan	0.01 %

21

BAB V LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN

A. AKTIVITAS PELAKSANAAN FISIK DI LAPANGAN

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Team Of References (TOR), bahwa Team Supervisi adalah Engineer Representative yang dalam tugas sehari hari membantu PPK Pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Satuan Kerja Kawasan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Untuk Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo Kota Padang untuk melakukan Pengawasan pengendalian mutu, kuantitas, waktu dan administrasi teknis dari awal dimulainya pekerjaan hingga selesai. Adapun aktivitas kegiatan pelaksanaan fisik paket kegiatan diuraikan sebagai berikut :

• KEGIATAN DI LAPANGAN

Pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor dibawah pengawasan Tim Supervisi pada Tanggal 1 Desember 2025 – 31 Desember 2025, antara lain adalah sebagai berikut :

Item Pekerjaan	Bobot %
PEKERJAAN JALAN	
PEKERJAAN PERSIAPAN	
Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga	0.02 %
Keselamatan dan kesehatan kerja	0.03 %
Papan nama kegiatan	0.01 %
Pengukuran ulang (Stake Out) dan Penggambaran	0.02 %
PEKERJAAN PERKERASAN BETON	
Timbunan Dan Pematatan Sirtu	0.39 %
Pengecoran beton menggunakan Ready Mixed mutu Fc 25 Mpa, (termasuk Groving dan Deletasi kedalam 4 Cm)	7.42 %
Timbunan Tanah didatangkan + dipadatkan	0.21 %

21

PEKERJAAN DRAINASE	
PEKERJAAN PERSIAPAN	
Mobilisasi dan Demobilisasi	0.01 %
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	0.02 %
Papan Nama Proyek	0.01 %
Stake out trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan	0.16 %
PEKERJAAN SALURAN	
Pasang Profil Melintang Dan Memanjang Saluran	0.10 %
Bongkaran Beton Dengan Jack Hammer	0.03 %
Pembongkaran Pasangan Lama	0.08 %
Pekerjaan Dewatering :	
Kistdam Pasir/Tanah Dibungkus Karung Plastik Babor 43 X 65 Cm	-
Kerangka Kayu Untuk Kistdam Pasir/Tanah Ukuran 43 X 65 Cm	-
Pengoperasian Per-Jam Pompa Air Diesel Daya 7.5 Kw (Kapasitas 0.5 M3/S)	1.33 %
Penggalian Tanah Biasa Sedalam	1.87 %
Pasangan Kayu Dolken Ø 8 – 10 cm	1.14%
Saluran U-Ditch 60X60X100 Cm Dengan Lantai Kerja F'C 10 Mpa	26.30 %
Saluran U-Ditch 80X80X100 Cm Dengan Lantai Kerja F'C 10 Mpa	24.17 %
Tutup U-Ditch (Tipe LD) Untuk U-Ditch 60X60X100 Cm	11.38 %
Tutup U-Ditch (Tipe LD) Untuk U-Ditch 80X80X100 Cm	7.96 %
Pembuatan s.d pengecoran beton mutu rendah f'c' 20 MPa, slump 100	0.63 %
Pengukuran Kembali Galian Tanah	0.38 %
Angkut Material Hasil Galian oleh Dump Truck sejauh 1,5 Km	0.31 %
Pekerjaan Penutup Saluran (Plat Ducker)	
Pek Pembuatan s.d pengecoran BETON Fc' 20 Mpa	0.08 %
Pek Bekisting	0.08 %
Pek Pembesian	0.27 %
Pas Batu Kali Fc' 12.5 Mpa	0.49 %

22

I. Dokumentasi Pekerjaan Fisik



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch

J. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan U-ditch



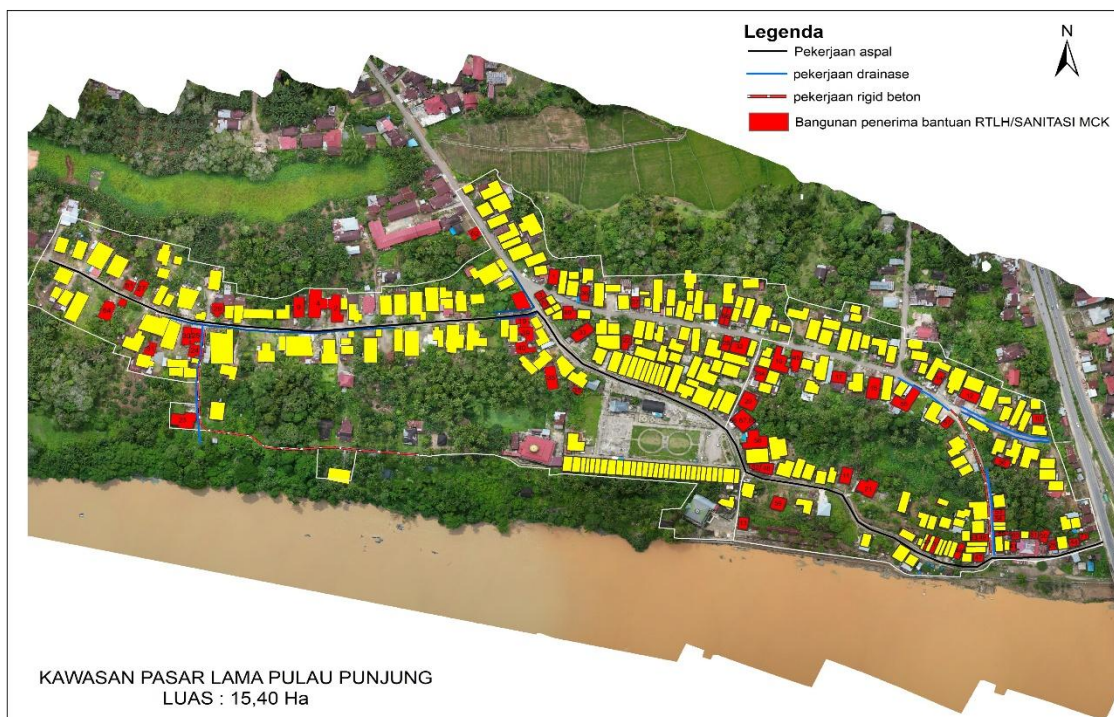
Pekerjaan U-ditch dan Jalan



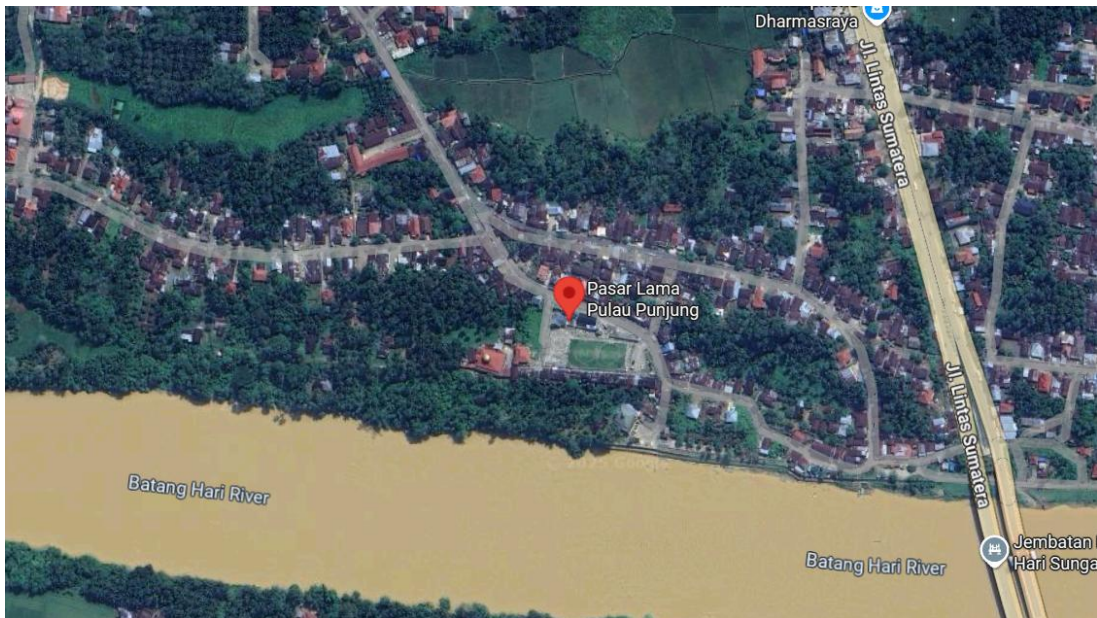
Pekerjaan Rumah

2. Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung mempunyai luas area 15,40 Hektar. Terdapat enam pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Drainase, Jalan Lingkungan, Perbaikan Rumah MBR, dan Air Bersih.



A. Data Umum



Koordinat : -0.9615526263529012, 101.50157755905336

Luasan Kumuh	15,64 Ha
Skor Kumuh	60 (Kumuh Berat)
Pekerjaan Bangunan Rumah	54 unit
Pekerjaan Jalan Lingkungan	1.042 meter
Pekerjaan Drainase	674 meter
Pekerjaan Penyediaan Air Minum	334 SR
Konsultan Supervisi / MK	PT. Duta Bhuana Jaya
Tanggal Kontrak	3 November 2025
Nilai Kontrak	Rp. 366.581.700
Kontraktor Pelaksana	PT. Adinda Maria Parsaktian Abadi
Tanggal Kontrak	13 Oktober 2025
Nilai Kontrak	Rp. 3.946.916.700

B. Data Personel Konsultan Supervisi / MK

Nama	Jabatan
Syefrian Hidayat, S.T.	Supervisi Engineer
Nofria Ronaldo, S.T.	Quality Engineer
Saptoto Nurshendi, S.T.	Quantity Engineer
Agung Tri Widyanto, S.T.	HSE

C. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan	13 Oktober – 31 Desember 2025
Rencana Serah Terima	
PHO	31 Desember 2025
FHO	28 Juni 2026

D. Nilai Pagu dan Nilai Kontrak

Pekerjaan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung
Lokasi	Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya
Nilai Kontrak	Rp. 3.946.916.700
Tanggal SPMK	13 Oktober 2025
Masa Pelaksanaan	80 hari Kalender
Sumber Dana	APBN TA 2025
Nilai Pagu	Rp. 4.933.645.700,00
Kontraktor Pelaksana	PT. Adinda Maria Parsaktian Abadi
Konsultan Pengawas	CV. Duta Buana Jaya

E. Adendum I, II, RPATA

Adendum I

Tanggal	12 Desember 2025
Nilai	Rp. 4.333.714.500

Adendum II

Tanggal	31 Desember 2025
Nilai	Rp. 4.333.714.500
Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari-18 Februari 2026

RPATA

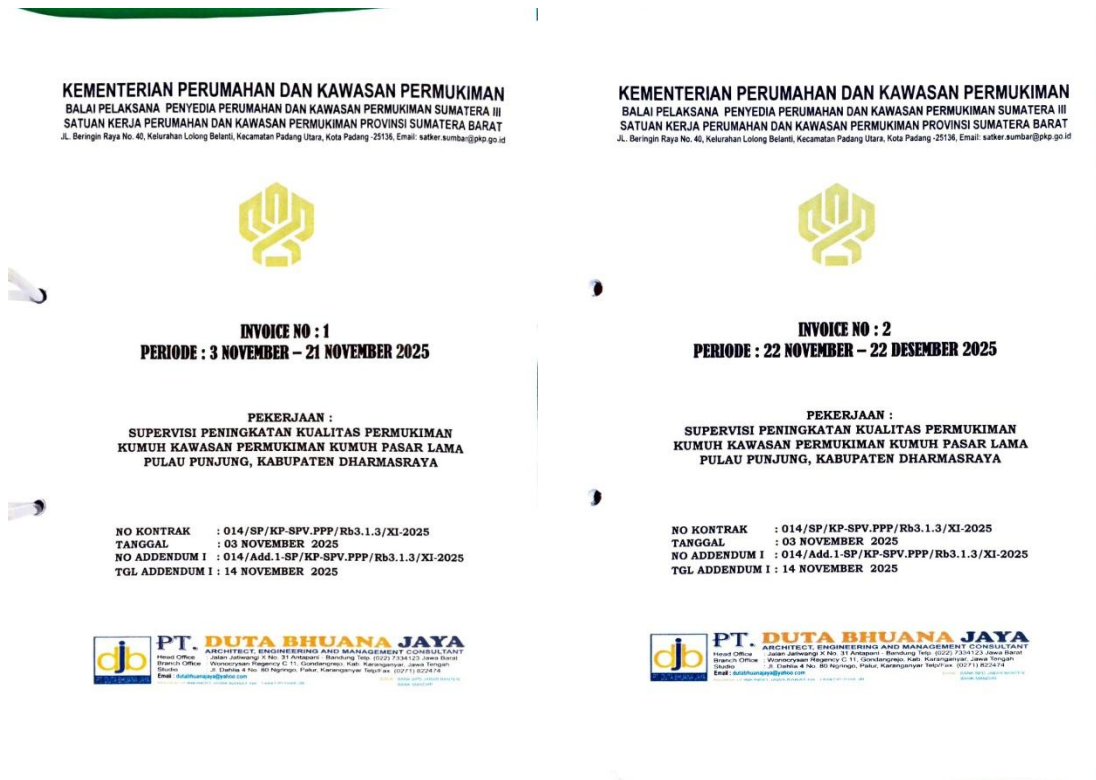
1. PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan nilai pemeliharaan.
2. PPK membuat SPP penampungan sebesar perhitungan pada nomor satu.
3. SPP penampungan dibuat masing-masing untuk : - Perkiraan nilai pekerjaan - Nilai pemeliharaan
4. PPK menyampaikan SPP penampungan kepada PPSPM.
5. PPSPM melakukan pengujian SPP penampungan.
6. Terhadap SPP penampungan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan.
7. PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

F. Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2025.

Minggu 13	
Bobot rencana	100%
Bobot realisasi	75,02%

Deviasi	-24,98%
Keuangan	
Nilai Kontrak	Rp. 246.713.000
Termin 1	17 Oktober 2025
Termin 2	17 November 2025
	Rp. 61.678.250
	Rp. 86.349.550



G. Kendala dan Permasalahan

Adapun permasalahan yang terdapat pada pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, yaitu :

1. Kurangnya tenaga kerja untuk masing-masing item pekerjaan.
2. Ketersediaan batu pecah untuk beton ready mix sulit didapatkan.
3. Kondisi permukiman dan juga jalan yang sempit.
4. Adanya penolakan warga saat dilakukan pengecoran beton dikarenakan *truck mixer* (TM) memasuki kawasan jalan yang sempit dan memicu sedikit perselisihan dengan masyarakat sekitar.

5. Perubahan jalur pelaksanaan pengaspalan tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan.
6. Perubahan jalur pelaksanaan pekerjaan pipa tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan.
7. Proses pelaksanaan pekerjaan galian saluran yang mengenai rumah warga dan jalurnya mengenai tiang Listrik.

H. Laporan Supervisi



LAPORAN KONSULTAN SUPERVISI BULAN KE 1 (SATU)

Pekerjaan :
Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan
Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 014/SP/KP-SPV.PPP/Rb3.1.3/XI-2025
Tanggal : 3 November 2025

Kontraktor Pelaksana
PT. ADINDA MARIA PARSAKTIAN ABADI

TAHUN ANGGARAN 2025



LAPORAN KONSULTAN SUPERVISI BULAN KE II (DUA)

Pekerjaan :
Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan
Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 014/SP/KP-SPV.PPP/Rb3.1.3/XI-2025
Tanggal : 3 November 2025

Kontraktor Pelaksana
PT. ADINDA MARIA PARSAKTIAN ABADI

TAHUN ANGGARAN 2025



LAPORAN KONSULTAN SUPERVISI PENDAHULUAN

Pekerjaan :
Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan
Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 014/SP/KP-SPV.PPP/Rb3.1.3/XI-2025
Tanggal : 3 November 2025

Kontraktor Pelaksana
PT. ADINDA MARIA PARSAKTIAN ABADI

TAHUN ANGGARAN 2025



I. Dokumentasi Pekerjaan Fisik



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Rumah



Pekerjaan Rumah

J. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan Jalan



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan U-ditch



Pekerjaan Jalan



Rapat Koordinasi Balai,
Konsultan Pelaksana, dan
Supervisi

PENUTUP

Demikian Laporan Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program ke depan. Secara umum, pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih memerlukan penambahan waktu (addendum).

Diharapkan hasil laporan supervisi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas permukiman secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Laporan Realisasi Pembangunan Rumah Khusus dan BSPS Deliniasi Perdesaan

TA 2025

Satker PKP

Prov. Sumbar



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Realisasi Pembangunan Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Delineasi Perdesaan Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Khusus dan BSPS Delineasi Perdesaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor serta bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah delineasi perdesaan di Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Khusus dan BSPS serta penyusunan laporan ini.

Padang, 12 Januari 2026

Satker PKP
Provinsi Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur perbendaharaan yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Gambar 1 Struktur Perbendaharaan Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

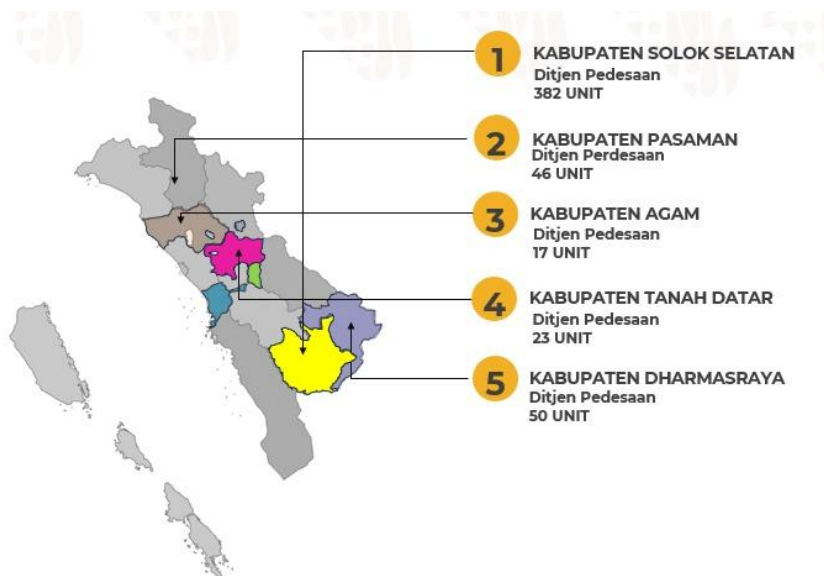
Dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman di Pronvinsi Sumatera Barat menyebar di 19 kabuapten/ kota. Untuk Delineasi Perdesaan terdapat 8 Kbupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Dharmasraya
3. Kabupaten Sijunjung
4. Kabupaten Tanah Datar

5. Kabupaten Solok Selatan
6. Kabupaten Solok
7. Kabupaten Pasaman
8. Kabupaten Lima Puluh Kota



Sebaran Lokasi BSPS Delineasi Perdesaan di Provinsi Sumatera Barat :



Realisasi Pembangunan Rumah Khusus dan BSPS

Pembangunan Rumah Khusus dan BSPS Delineasi Perdesaan merupakan salah satu Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Laporan realisasi ini memberikan gambaran realisasi Pembangunan Rumah Khusus dan BSPS Delineasi Perdesaan meliputi realisasi fisik, keuangan, dan permasalahan yang terjadi.

A. Rumah Khusus

Pembangunan Rumah Khusus di Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2025. Berikut laporan realisasi Rumah Khusus.

Rencana	Realisasi	%
Anggaran		
Rp. 69.030.450.000	Rp. 62.121.121.152	89.99%
Output		
140 unit	140 unit	100%

Dokumentasi :



Laporan Realisasi Pembangunan Rumah Khusus dan
BSPS Delineasi Perdesaan TA 2025

Satker PKP Provinsi Sumbar



B. BSPS

Pekerjaan BSPS TA 2025 sudah selesai dilaksanakan. Berikut laporan realisasi pekerjaan BSPS.

Rencana	Realisasi	%
Anggaran		
Rp. 11.368.440.000	Rp. 11.355.732.779	99.89%
Output		
521 unit	518 unit	99,42%

Detail per kabupaten :

Kabupaten	Instruksi Verifikasi	BA Verifikasi	Surat Penetapan CPB Dirjen	SK PPK
Delineasi Perdesaan	764	521	521	518
Kab. Solok Selatan	503	385	385	382
Kab. Pasaman	104	46	46	46
Kab. Agam	17	17	17	17
Kab. Tanah Datar	23	23	23	23
Kab. Dharmasraya	117	50	50	50

Permasalahan :

1. Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengakibatkan muka air Sungai tinggi dan mengakibatkan toko penyedia bahan bangunan kesulitan mendapatkan material local seperti pasir, kerikilm batako, dan kayu. Terkait dengan hal tersebut, kondisi jalan penghubung yang relative rusak dengan posisi penerima bantuan yang menyebar.
2. Ada beberapa Lokasi penerima bantuan yang berada di Lokasi terisolir dan sangat sulit dilalui ketika hari hujan.
3. Pada saat pelaksanaan kegiatan BSPS, ada penerima bantuan yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah PPK menandatangani SK karena berbagai alasan dan pertimbangan. Penerima bantuan tidak mau lagi mematuhi dan mengikuti aturan

program sehingga yang bersangkutan tidak layak lagi untuk dilanjutkan sebagai penerima bantuan.

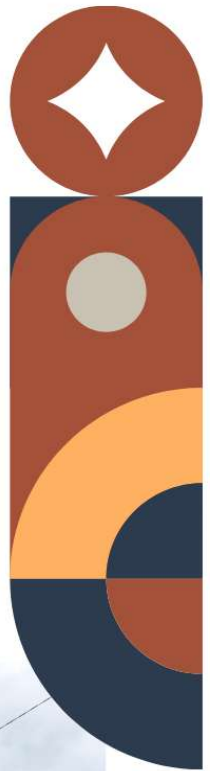
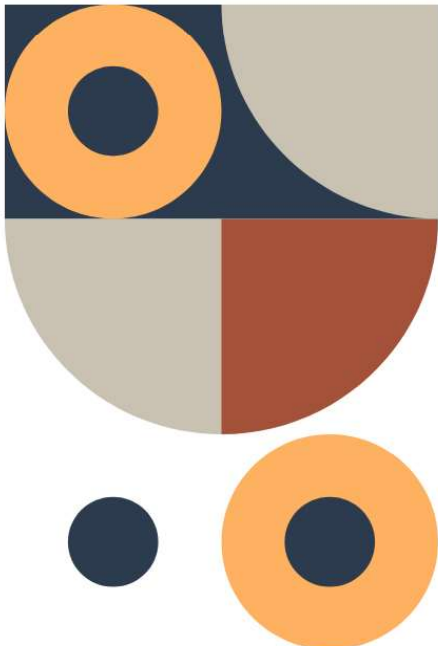
Dokumentasi :



Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan TA 2025 Satker PKP Prov Sumbar

TA 2025

*Satker PKP
Prov. Sumbar*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 di Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk petanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) Deliniasi Perkotaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah deliniasi perkotaan di Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) serta penyusunan laporan ini.

Padang, 12 Januari 2026

Satker PKP Provinsi Sumbar

Pendahuluan

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 023/KPTS/M/2025 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tetap Pusat. Satuan kerja ini dibentuk sebagai unsur pendukung Balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tingkat wilayah, khususnya dalam menjembatani kebijakan dan program Balai dengan pelaksanaan kegiatan di daerah. Melalui peran tersebut, satuan kerja membantu Balai dalam pengoordinasian pelaksanaan program, pengelolaan kegiatan teknis dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan tugas Balai dapat berjalan secara efektif, selaras, dan akuntabel. Berikut merupakan bagan struktur perbendaharaan yang terdapat pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

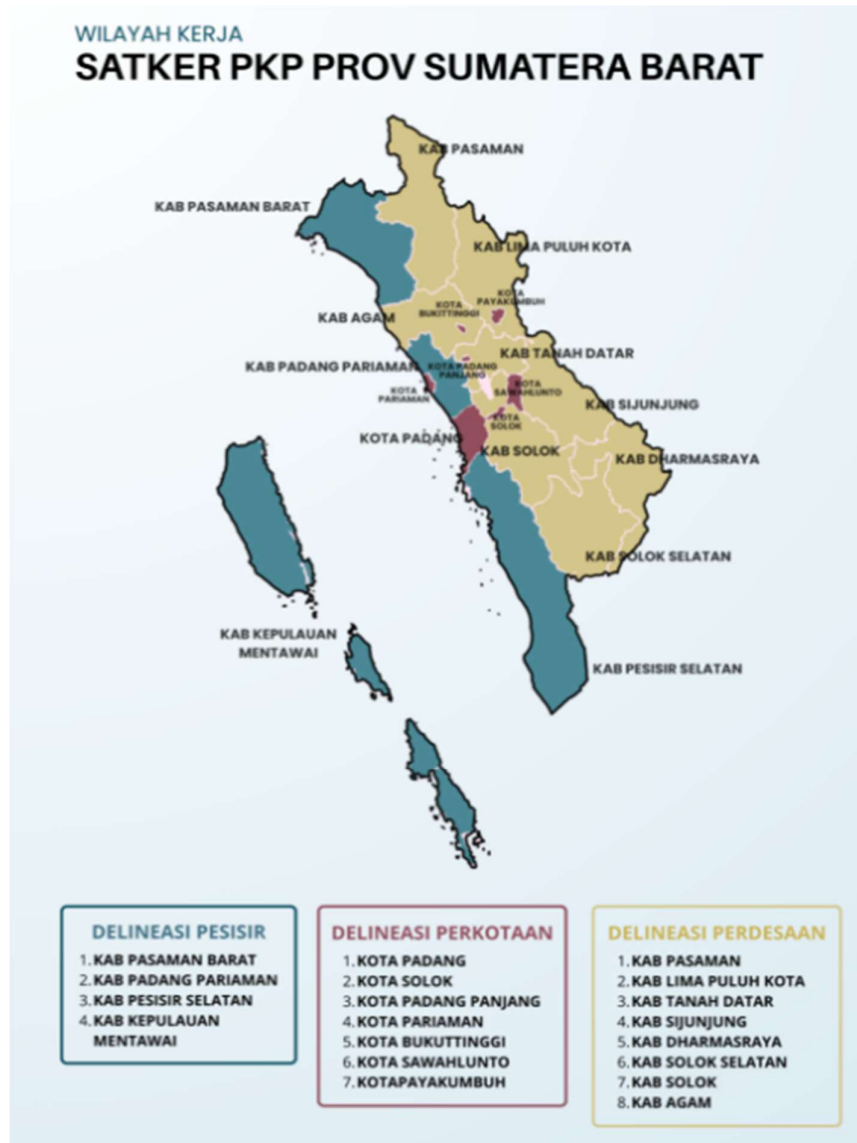


Gambar 1. Struktur Perbendaharaan Satker PKP Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman di Pronvinsi Sumatera Barat menyebar di 19 kabuapten/kota. Untuk Delineasi Perkotaan terdapat 7 Kota yang terdiri dari:

1. Kota Padang
2. Kota Solok

3. Kota Padang Panjang
4. Kota Pariaman
5. Kota Bukittinggi
6. Kota Sawahlunto
7. Kota Payakumbuh



Gambar 2. Wilayah Kerja Satker PKP Prov. Sumbar

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Provinsi Sumatera Barat

1. Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara intensif oleh Satker PKP Provinsi Sumatera Barat bersama **Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dan Kota terkait**. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman kebijakan, perencanaan, serta mekanisme pelaksanaan program perumahan perkotaan, khususnya program BSPS. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, serta dengan **Badan Pusat Statistik (BPS)** untuk pemanfaatan dan sinkronisasi data statistik sebagai dasar perencanaan dan penetapan sasaran program.

- Koordinasi dengan dinas BPN provinsi Sumatera Barat mengenai program 3 Juta Rumah:



- Koordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Barat:



- Koordinasi dengan Dinas Permukiman Kota Padang di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumbar:



- Rapat di Dinas Perkim Prov. Sumbar bersama Dinas Perkim Kabupaten/Kota:



- Koordinasi dengan Dinas Perkim Kota Padang:



- Koordinasi dengan Dinas Permukiman Kota Solok:



- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendataan Perumahan serta Dukungan Program Tiga Juta Rumah Provinsi Sumatera Barat:



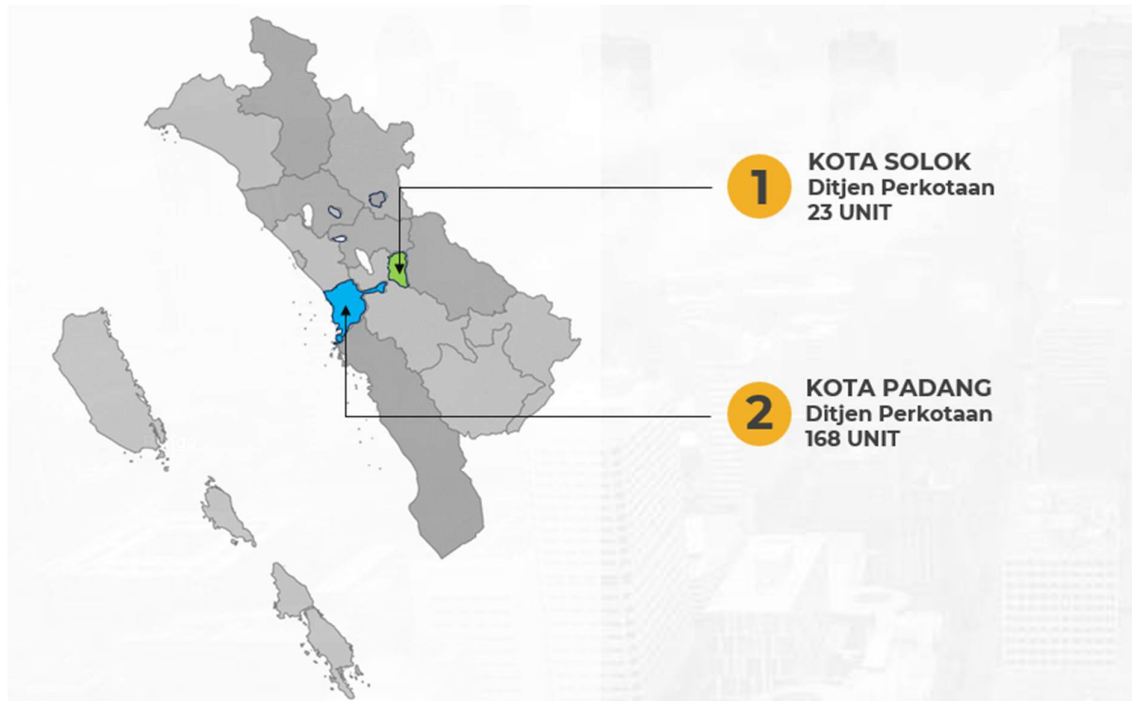
- Koordinasi dengan Walikota Padang Panjang:



2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan perkotaan pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui Program **Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)** pada delineasi wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan BSPS Provinsi Sumatera Barat menyebar di 2 kota untuk delineasi perkotaan yang terdiri dari:



Progress Penetapan SK PPK dan Pencairan BSPS Delineasi Perkotaan TA 2025:

N O	KABUPATEN/KOTA	INSTRUKSI VERIFIKASI	BA VERIFIKASI	SURT PENETAPAN CPB DIRJEN	SK PPK	JUMLAH PENCAIRAN	Keterangan
1	Kota Solok	51	23	23	23	460.000.000	-
2	Kota Padang	272	168	168	167	3.340.000.000	1,5 PB dikembalikan ke kas negara
Delineasi Perkotaan		323	191	191	190	3.800.000.000	1,5 PB dikembalikan dengan total Rp 30 juta

Berdasarkan progres penetapan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK) dan pencairan bantuan pada delineasi perkotaan di Provinsi Sumatera Barat, dari total 191 unit yang telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) Dirjen,

sebanyak 190 unit telah ditetapkan dalam SK PPK dan telah direalisasikan pencairannya dengan total nilai sebesar Rp3,8 miliar.

Adapun terdapat **1,5 unit** yang dikembalikan ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak **1 unit** dikembalikan karena calon penerima bantuan mengundurkan diri.
2. Sebanyak **0,5 unit** atas nama penerima bantuan Yuni tidak dapat melanjutkan progres kegiatan dikarenakan bencana banjir, bahan bangunan yang telah distok hanyut sehingga pembangunan tidak memungkinkan untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana Tahap II atas nama yang bersangkutan sebesar Rp10.000.000 telah dikembalikan ke kas negara karena tidak terserap oleh kegiatan.

Secara umum, progres penetapan SK PPK dan pencairan bantuan BPS pada delineasi perkotaan di Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik dan mendekati target penuh, dengan tingkat realisasi yang tinggi serta pengelolaan pengembalian dana yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Progress Fisik Kegiatan BPS Delineasi Perkotaan 07 Januari 2026:

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI		PROGRES					KETERANGAN
		AWAL	FINAL	0 %	0-30 %	30 %	30-100 %	100 %	
1	KOTA SOLOK	23	23	-	-	-	3	20	
2	KOTA PADANG	168	167	-	-	2	114	51	1,5 PB Pengganti
JUMLAH DELINEASI PERKOTAAN		191	190	-	-	2	117	71	1,5 PB Pengganti

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Program BPS pada delineasi perkotaan di Provinsi Sumatera Barat hingga tanggal 07 Januari 2026, capaian progres fisik tercatat sebesar **87,13%** dari rencana **100%**, sehingga terdapat deviasi minus sebesar **12.87%** terhadap Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Secara umum, kegiatan telah berjalan meliputi penerimaan bahan bangunan Tahap I dan II, pelaksanaan konstruksi secara paralel di seluruh lokasi dampingan fasilitator, serta pembayaran upah tukang Tahap I pada sebagian besar kabupaten.

Kendala dan masalah kegiatan BSPS Perkotaan:

1. Sebanyak 79 PB di Kota Padang dan 4 PB di Kota Solok berpotensi tidak selesai hingga 31 Desember 2025 karena penyedia bahan bangunan kesulitan mendapatkan material lokal (pasir, kerikil, batako, kayu), kondisi jalan penghubung rusak sementara lokasi PB tersebar dan berjauhan, tukang yang sudah berkomitmen memilih bekerja di tempat lain, serta 6 PB (4 di Padang & 2 di Solok) terdampak langsung oleh bencana.
2. PB atas nama Yusni tidak dapat dilanjutkan karena bahan bangunan yang sudah distok hanyut dan semen rusak akibat terendam, rumah berada di tepi sungai baru hasil banjir bandang, sehingga pembangunan tidak mungkin diteruskan hingga selesai..

Strategi Pengangan kendala dan masalah kegiatan BSPS:

1. Strategi penanganan PB yang masih bisa dilanjutkan dilakukan dengan memfasilitasi toko bahan bangunan agar tetap menyalurkan material, baik fabrikasi maupun non-fabrikasi, kepada penerima bantuan. Selain itu, koordinasi dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan agar permasalahan dapat ditanggulangi secara bersama. PB yang bersangkutan juga difasilitasi untuk saling membantu dalam pekerjaan sehingga dapat mengurangi beban pembayaran upah. Sementara itu, PB yang terdampak langsung bencana telah didata secara lengkap dan dilaporkan kepada pihak terkait.
2. Untuk PB yang tidak dapat dilanjutkan atas nama Yusni, hasil analisa lapangan menunjukkan bahwa posisi rumah semakin berbahaya dan tidak layak huni sebagai tempat tinggal. Korkot dan TFL melibatkan KPB serta pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisa kasus tersebut, kemudian membuat berita acara lengkap dengan justifikasi lapangan yang diperkuat oleh dokumentasi foto. Dana Tahap II sebesar Rp10.000.000 yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dikembalikan ke Kas Negara karena tidak terserap.

Dokumentasi:



PENUTUP

Demikian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program ke depan. Secara umum, pelaksanaan BPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan.

Diharapkan hasil pemantauan dan evaluasi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program BPS pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.